

**KEBANGKITAN KEMBALI
PARTAI KOMUNIS INDONESIA
(1949-1955)**

(Peranan Pemimpin PKI dalam Membangun dan Mengembangkan Partai)

TESIS



Oleh

SUWEMPRI
NIM 10567

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
Mendapatkan gelar Magister Pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KONSENTRASI PENDIDIKAN SEJARAH**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2011

ABSTRACT

Suwempri (10567). Re-Awakening of Partai Komunis Indonesia 1949-1955. (The Role of PKI Leadership in Rebuilding and Developing the Party). Thesis. Graduate Program of State University of Padang.

This research studied about PKI awakening since the PKI Madiun rebellion 1948 up to 1955 the first general election, it is viewed from the role of leadership of PKI and the conditions covered the Indonesia from PKI rebellion of Madiun to 1955 general election. This research aimed to find out what are activities which were done by the leaders of PKI in rebuilding their party from Madiun rebellion to 1955 general election? To find out what are the strategies done by the leaders of PKI in rebuilding and redeveloping their party? And to find out what are the conditions covered the Indonesia after PKI rebellion of Madiun which effects toward the awakening and developing of PKI.

Research method used historical method. That consisted of heuristic or data collection (*heuristic*) done by finding the document, news paper and magazine as well as the books related to Partai Komunis Indonesia. To analyze the data and for the data thrush worthiness, the researcher did prior critical to the resources. Selected them based on category or research focus, and described them in written form.

The result of this research was PKI figures the role of developing was important the party after the Madiun rebellion in 1948 Alimin, Aidit, Lukman, Njoto and Sudisman. In the period of Alimin, the activities done are: organizing the temporary Secretariat of Komite Central, activating the Socialist Party, erasing the negative image of party, developing the cadre of party, and applying the infiltration toward mass organization. In the period of Aidit, Lukman, Njoto and Sudisman leadership, some attempts done are: developing the organization structure, rising the PKI as the quality mass party, uniting all the communism potentials, rehabilitating the party and figures involved in Madiun rebellion of PKI, and applying the strategy of right wing by cooperating with some mass organization, or organizing the national unity front. Domestic political crisis, aggression of Netherlands Indies Civil Administration, and attitude of the government that was not clear in punishing the PKI as the rebelling party. Benefit the PKI and this situation was taken into advantage by figures of PKI for redeveloping the PKI from ruins. Because of the attempts done the leaders of PKI, so PKI could win in the 1955 general election.

ABSTRAK

Suwempri (10567). Kebangkitan Kembali Partai Komunis Indonesia 1949-1955. (Peranan Pemimpin PKI Dalam Membangun dan Mengembangkan Partai). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini membahas tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia setelah pemberontakan PKI di Madiun 1948 sampai pemilu 1955. Penelitian ini melihat peranan pemimpin PKI dan kondisi yang melingkupi bangsa Indonesia setelah pemberontakan PKI Madiun 1948 sampai pemilu 1955. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apa saja cara pemimpin PKI membangun kembali partai setelah pemberontakan tahun 1948? Mengetahui strategi pemimpin PKI dalam membangun dan mengembangkan partai? Serta mengetahui kondisi yang melingkupi negara Indonesia setelah pemberontakan PKI Madiun berpengaruh terhadap bangkit dan berkembangnya PKI.

Metode penelitian adalah metode penelitian sejarah. Dimulai dari pengumpulan data (*heuristik*) yaitu mencari dokumen, surat kabar dan majalah serta buku-buku yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan kritik sumber, memilah-milah berdasarkan kategori atau fokus penelitian, dan mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh PKI yang berperan membangun dan mengembangkan partai setelah pemberontakan Madiun 1948 diantaranya Alimin, Aidit, Lukman, Njoto dan Sudisman. Dimasa kepemimpinan Alimin usaha yang dilakukan antara lain: membentuk sekretariat *Comite Central* sementara, menghidupkan Partai Sosialis, menghapus citra buruk partai, membangun partai kader, dan menerapkan strategi infiltrasi kedalam organisasi massa. Dimasa kepemimpinan Aidit, Lukman, Njoto dan Sudisman, usaha yang dilakukan antara lain: membangun struktur organisasi, menjadikan PKI sebagai partai massa yang berkualitas, menyatukan semua potensi komunisme, merehabilitasi partai dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun, dan menerapkan strategi kanan yakni menjalin kerjasama dengan berbagai kekuatan massa atau menggalang front persatuan nasional. Krisis politik dalam negeri, serangan Agresi Militer Belanda II dan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menghukum PKI selaku partai yang pemberontak memberi keuntungan bagi PKI dan situasi ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh PKI untuk membangun kembali PKI dari kehancuran. Berkat usaha yang dilakukan pemimpin PKI, maka PKI dapat memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum tahun 1955.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama Mahasiswa : Suwempri

N I M : 10567

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan
Pembimbing I

Prof. Dr. Mestika Zed, MA.
Pembimbing II

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang

Ketua Program Studi IPS

Prof. Dr. Mukhaiyar, M. Pd.
NIP. 19500612 197603 1 005

Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum.
NIP.

PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan</u> (Ketua)	_____
2.	<u>Prof.Dr. Mestika Zed, MA.</u> (Sekretaris)	_____
3.	<u>Prof. Dr. Abizar</u> (Anggota)	_____
4.	<u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.</u> (Anggota)	_____
5.	<u>Dr. Lindayanti, M.A.</u> (Anggota)	_____

Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Suswempri
N I M : 10567
Tanggal Ujian :

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, berupa tesis dengan judul **Kebangkitan Kembali Partai Komunis Indonesia Tahun 1949-1955 (Peranan Pemimpin PKI dalam Membangun dan Mengembangkan Partai)**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan secara tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing tesis.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 15 Juni 2011

Saya Yang Menyatakan

Suwempri

NIM 10567

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan tesis ini merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Tesis ini berjudul **Kebangkitan Kembali Partai Komunis Indonesia Tahun 1949-1955 (Peranan Pemimpin PKI dalam Membangun dan Mengembangkan Partai)**”.

Tesis ini tentu tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya pertolongan dari Allah SWT, melalui orang-orang yang telah diketuk pintu hatinya untuk mengulurkan tangan membagikan sebagian ilmu yang dimilikinya, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, selaku pembimbing I dan kepada Bapak Prof. Dr. Mestika Zed, MA, selaku pembimbing II. Beliau berdua, dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan, saran-saran, dan motivasi yang sangat berharga kepada penulis selama dalam penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abizar, Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum., Ibu Dr. Lindayanti, MA., sebagai kontributor/penguji yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran-saran, arahan dan koreksi selama penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Mukhaiyar, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, beserta staf yang telah memberi pelayanan administrasi dengan baik.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah M.Pd., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Para dosen Konsentrasi Pendidikan Sejarah Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
6. Yang mulia Ayahanda Wakimin dan Ibunda Marsiyem yang telah memberikan bekal pendidikan, penuh kesabaran, keimanan pada Allah SWT, memberikan dorongan dan do'a. Saudara-saudaraku tersayang Siti Wasliyah, Sri Wahyuni, Sis Afandi, dan Ade Lima Damayanti, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan. Serta sanak keluarga yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan mahasiswa Konsentrasi Pendidikan Sejarah angkatan 2008 khususnya dan Prodi Pendidikan IPS yang penulis banggakan.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang dalam kesempatan ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kehadiran Allah jualah tempat penulis memohon, semoga segala bantuan yang telah Bapak/Ibu berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Nya. Semoga tesis ini bermanfaat. Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Padang, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR	iii
PERSETUJUAN KOMISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	16
1. Partai Politik.....	16
a. Pengertian Konseptual.....	16

b. Fungsi Partai Politik.....	21
c. Klasifikasi Partai Politik.....	23
2. Kepemimpinan.....	29
a. Pengertian Konseptual.....	29
b. Teori-teori Kepemimpinan.....	31
c. Tipologi Kepemimpinan.....	34
B. Penelitian yang Relevan	36
C. Kerangka Berfikir.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	42
B. Pengumpulan Data	43
C. Pengolahan Data	45
D. Analisis Data.....	46
E. Penulisan Laporan.....	46

BAB IV. TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PARTAI KOMUNIS DI INDONESIA HINGGA PEMBERONTAKAN MADIUN 1948

A. Partai Komunis Indonesia Pada Masa Kolonial	47
B. “ <i>Come Back</i> ” nya PKI Pada Masa Kemerdekaan	58
C. Pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan Penumpasannya	63

BAB V. KONDISI INDONESIA PASCA PEMBERONTAKAN PKI

MADIUN 1948

A. Agresi Militer Belanda II	82
B. Sikap Pemerintah Terhadap PKI Pasca Pemberontakan PKI Madiun 1948.....	97
C. Keadaan Politik dan Ekonomi di Indonesia Pasca Pemberontakan PKI Madiun 1948	104

BAB VI. KEBANGKITAN KEMBALI PARTAI KOMUNIS INDONESIA

PASCA PEMBERONTAKAN MADIUN 1948

A. Tampilnya Alimin Sebagai Pemimpin Partai Komunis Indonesia	115
B. Usaha dan Strategi Alimin Membangun Partai Komunis Indonesia.....	119
C. Beralihnya Kepemimpinan Partai Komunis Indonesia Dari Alimin ke Aidit	123
D. Kepemimpinan DN. Aidit	126
E. Usaha Aidit Membangun dan Menyatukan Partai Komunis Indonesia	141
1. Membangun Struktur Organisasi.....	141
2. Memperbaiki Citra dan Tokoh Partai	145
3. Menyatukan Potensi Komunisme Serta Tantangan Yang di Hadapi.....	151

a. Pertentangan Aidit dengan Lukman dan Sudisman, Tentang “Strategi Partai”	153
b. Pertentangan Aidit dengan Wikana tentang “Partai”	155
c. Pertentangan Aidit dengan Tan Ling Djie tentang Kedudukan Partai Sosialis sebagai “Partai Penampung”	158
d.”Razia Agustus” Cobaan Yang di Hadapi DN Aidit di Masa Awal Kepemimpinannya	163

BAB VII. STRATEGI AIDIT MENGEMBANGKAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA PASCA PEMBERONTAKAN MADIUN 1948 HINGGA PEMILU 1955

A. Membangun PKI Menjadi Partai Massa	171
1) Menguasai Organisasi Buruh	174
2) Menguasai Organisasi Tani.....	175
3) Menguasai Organisasi Pemuda dan Pelajar	176
4) Menguasai Organisasi Wanita.....	178
5) Melakukan Pendekatan Kepada Seniman Dan Budayawan.....	179
B. Ideologi dan Disiplin Partai Pada Masa Kepemimpinan Aidit	181
C. Strategi Aidit Menggalang Front Persatuan Nasional	191
D. Strategi Subversi PKI Tahun 1954	202
E. Strategi Pemimpin PKI untuk Memenangkan Pemilu 1955	206

BAB VIII. PENUTUP

A. Simpulan	222
B. Implikasi	227
C. Saran	228

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Besarnya Iuran Partai	190
2. Hasil Pemilihan Umum 1955	220

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Penelitian	41
2. Struktur Organisasi PKI	144

DAFTAR ISTILAH

ACOMA	: Angkatan Komunis Muda
AGITPROP	: Agitasi dan Propaganda
AKK	: Aliansi Anti Komunis
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APRA	: Angkatan Perang Ratu Adil
BI	: Bank Indonesia
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CC	: Komite Central
CDB	: Komite Daerah Besar
CDR	: Komite Djakarta Raya
COMINFORM	: Communist Information Bureau, Biro Informasi Komunis/ Wadah Kerjasama Partai-Partai Komunis Eropa
CR	: Komite Ranting
CS	: Komite Seksi
CSI	: Central Sarekat Islam, Sarekat Islam Pusat
CSS	: Komite Sub Seksi
CPB	: Komite Pulau Besar
CPM	: Corps Polisi Militer

DI/TII	: Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
FUI	: Forum Umat Islam
GERINDOM	: Gerakan Indonesia Merdeka
GERWANI	: Gerakan Wanita Indonesia
GERWIS	: Gerakan Wanita Indonesia Sedar
HIS	: Hollands Inlandsche School, Sekolah Belanda-Pribumi
IPPI	: Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
ISDV	: Indische Social Democratische Vereniging, Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNIL	: Koninklijk Nederlandsche Indische Leger, Tentara Hindia Belanda
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KOMINTERN:	Komunis Internasional
KTN	: Komisi Tiga Negara
LEKRA	: Lembaga Kebudayaan Rakyat
MASJUMI	: Majelis Sjuro Muslimin Indonesia
MKTBP	: Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan
MULO	: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Pendidikan Rendah yang Lebih Diperpanjang
MURBA	: Musyawarah Rakyat Banyak

NIS	: Negara Indonesia Serikat
NU	: Nahdlatul Ulama
PARI	: Partai Republik Indonesia
PARTINDO	: Partai Indonesia
PBI	: Partai Buruh Indonesia
PERBEPSI	: Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia
PERMAI	: Persatuan Marhaen Indonesia
PERMESTA	: Perjuangan Rakyat Semesta
PERTI	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia
PESINDO	: Pemuda Sosialis Indonesia
PI	: Perhimpunan Indonesia
PID	: Politieke Inlichtingen Dienst , Polisi Rahasia Belanda
PII	: Partai Islam Indonesia
PIR	: Partai Indonesia Raya
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PPI	: Panitia Pemilihan Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPTI	: Partai Indonesia Raya
PRD	: Partai Rakyat Demokrat
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PRRI	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia

PSI	: Partai Sosialis Indonesia
RERA	: Rekonstruksi dan Rasionalisasi (Angkatan Perang)
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RMS	: Republik Maluku Selatan
RRC	: Republik Rakyat Cina
RTI	: Rukun Tani Indonesia
RUP	: Rencana Urgensi Perekonomian
SAKTI	: Serikat Tani Indonesia
SARBUFIS	: Serikat Buruh Film Indonesia
SARBUPRI	: Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SBG	: Serikat Buruh Gula
SBKA	: Serikat Buruh Kereta Api
SBKSB	: Serikat Buruh Kendaraan Bermotor
SBPTT	: Serikat Buruh Pos dan Telegraf
SDAP	: Social Democratische Arbeiders Partij, Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda
SDI	: Sarekat Dagang Islam
SEBDA	: Serikat Buruh Daerah Autonum
SEPDA	: Serikat Pegawai Daerah Autonum
SERBAUD	: Serikat Buruh Angkatan Udara
SI	: Sarekat Islam
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SPBU	: Serikat Buruh Pekerjaan Umum

SPDT : Staf Pertahanan Djawa Timur

SS-BOND : Staats Spoor Bond, Serikat Buruh Kereta Api

STC : Sub Teritorial Commando

TNI : Tentara Nasional Indonesia

UUDS : Undang-Undang Dasar Sementara

VSTP : Verenigingen van Spoor en Tramsweg Personeel, Serikat Pekerja
Kereta Api dan Trem

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan instrumen dari negara modern baik yang menganut sistem demokrasi maupun sosialis. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut keterwakilan baik dalam lembaga formal kenegaraan maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian¹. Keberadaan partai politik sangat penting, sehingga muncul pameo dalam masyarakat, “*politisi modern tanpa partai politik sama dengan ikan yang berada di luar air*”.² Hubungan antara partai sebagai institusi yang menjadi alat bagi manusia untuk mengendalikan kekuasaan dengan masyarakatnya sangat erat. Dalam perkembangannya, partai mengalami pasang naik dan pasang surut pada kurun waktu dan tempat tertentu, tergantung dengan kebudayaan yang dianut oleh suatu masyarakat.

Munculnya partai politik di Indonesia dilihat dari sudut ideologi dasar, pada masa-masa awal kelahirannya, pada dekade kedua dan ketiga abad ke-20, merupakan aktualisasi dari tiga aliran utama atau pandangan politik. Ketiga aliran itu adalah Islam, nasionalisme dan marxisme/sosialisme.³

¹ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 1

² Richard M. Marelsman dalam Maurice Duverger, *Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Kepentingan* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. v

³ Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. vii. Untuk lebih jelasnya lihat Herbeth Feith, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1955), hlm. liv

Aktualisasi aliran Islam muncul pertama kali dalam Sarekat Islam (SI). SI didirikan di Surakarta (Solo) pada tahun 1912. Sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911 di Surakarta dengan tujuan melindungi kepentingan para pedagang batik Muslim dari kompetisi yang tidak adil dengan para pedagang batik Cina di Jawa⁴, dan secara keseluruhan demi memajukan kehidupan ekonomi rakyat Indonesia.⁵ Sebagai partai politik pertama dalam sejarah Indonesia yang bercorak nasional, Sarekat Islam merupakan partai pelopor. Pada masa pergerakan nasional Sarekat Islam berkembang menjadi organisasi yang cukup penting dengan memiliki anggota yang cukup besar dan mencakup banyak wilayah.⁶ Akan tetapi kepopuleran SI tidak bertahan lama karena mendapat saingan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Dua partai ini lahir dari ideologi dasar Marxisme dan Nasionalisme. Islam yang diwakili SI dalam gerakan politik ternyata belum mampu bersaing dengan ideologi-ideologi modern yang berasal dari barat itu dalam merebut massa.

⁴ Ahmad Suhelmi, *Islam dan Kiri: Respons Elite Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca-Soeharto* (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2007), hlm. 10

⁵ Ruth T Mc Vey, *Kemunculan Komunisme Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 12. Pada tanggal 10 September 1912 ditetapkan tujuan Sarikat Islam Sebagai berikut: 1. Memajukan perdagangan. 2. Memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang kesukaran. 3. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani dari penduduk asli. 4. Memajukan kehidupan agama Islam. Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1970), hlm. 27

⁶ Sarekat Islam sangat populer di mata masyarakat. Sarekat Islam lain daripada Budi Oetomo (Perkumpulan kaum atasan) Sarekat Islam sejak berdirinya diarahkan ke rakyat jelata. Sarekat Islam adalah suatu organisasi yang telah lama diinginkan oleh rakyat umum (juga diantara kaum pedagang dan kalangan agama) lebih jelasnya lihat: A.K. Pringgogidgo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 20

Pada tanggal 23 Mei 1920 berdiri Partai Komunis Indonesia. PKI berkembang dengan cepat, baik dibidang organisasi maupun dalam usaha memasyarakatkan marxisme/komunisme. PKI tidak saja berhasil mempengaruhi massa rakyat, tetapi juga berhasil memikat kaum intelektual Indonesia, terutama dengan memperkenalkan analisa Lenin dan Bucharin tentang imperialisme sebagai tingkat terakhir dari kapitalisme.⁷ Pada tahun 1926/1927 PKI mencetuskan pergolakan rakyat di beberapa tempat, yaitu di Keresidenan Jakarta, Banten, Priangan, Surakarta, Kediri dan Silungkang.⁸ Pemerintah kolonial melakukan penghancuran dan penindasan terhadap kekuatan PKI pasca pemberontakan 1926-1927 di Jawa Barat, Batavia, dan Sumatera Barat. Mahkamah Agung Hindia Belanda tanggal 17 Nopember 1926 memerintahkan untuk menangkap kaum komunis, sebanyak 13.000 orang ditahan, 1.380 orang dibuang ke Boven Digul, dan 4.500 dipenjarakan dan sebagian dihukum mati.⁹ Pergolakan rakyat ini dapat diatasi oleh pemerintah Hindia Belanda.

Akibat pemberontakan yang terjadi tahun 1926/1927, PKI hancur berantakan. Selama masa pemerintahan Hindia Belanda, seluruh aktivitas PKI dinyatakan terlarang. Jika ketahuan pemerintah segera menindasnya. Untuk tahun-tahun berikutnya, sisa-sisa PKI meneruskan kegiatan-kegiatan secara

⁷ Anthony JS Reid, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 8

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 13

⁹ Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 51

illegal. Kemudian aktif kembali secara resmi setelah proklamasi kemerdekaan.¹⁰

Pada tanggal 4 Juli 1927 Soekarno dan kawan-kawannya mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI).¹¹ PNI adalah partai non kooperatif. Tujuannya jelas yakni kemerdekaan. Partai ini dengan cepat mendapat dukungan rakyat, tetapi PNI tidak bertahan lama, dikarenakan pada akhir tahun 1929 Soekarno dan beberapa tokoh lainnya ditangkap dan dihukum, kemudian partai itu dibubarkan pada tahun 1931. Pembubaran partai ternyata mengundang perpecahan. Pertama dikalangan pendukung ideologi nasionalis sekuler. Pihak yang pro pembubaran PNI mendirikan Partai Indonesia (Partindo) dengan pimpinan Mr. Sartono, sedangkan yang menentang mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir.

Sarekat Islam (sejak 1930 berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia-PSII) menjelang Perang Dunia II tidak saja menjadi partai kecil, tetapi juga diancam perpecahan. PSII terpecah menjadi dua yakni PSII Barisan Penyadar dibawah pimpinan H. Agus Salim dan Partai Islam

¹⁰ Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang berisi tentang anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan, maka Pada tanggal 21 Oktober 1945 muncul kembali PKI di bawah pimpinan Moh. Yusuf. Tetapi secara resmi baru diperkenalkan secara terbuka tanggal 7 Nopember 1945.

¹¹ PNI merupakan penjelmaan dari Algemene Studie Club di Bandung. Algemene Studie Club sendiri merupakan salah satu dari studie-studie club yang ada di Indonesia. Munculnya studie club sebagai akibat dari pengaruh propaganda yang diadakan Perhimpunan Indonesia di Nederland. Awalnya pada tahun 1918 tujuan Perhimpunan Indonesia hanya untuk memperhatikan kepentingan bersama dari Penduduk Hindia Belanda yang ada di Negeri Belanda. Tahun 1922 tujuannya berubah supaya pemerintah di Indonesia bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia karena meskipun sudah ada Volksraad, tetapi pemerintah Hindia Belanda tidak bertanggung jawab kepada pemerintah pusat di Nederland. Lalu tahun 1924 tujuannya berubah lagi yakni menjadi '*de vrijmaking van Indonesie* (kemerdekaan dari Indonesia). Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1970), hlm. 48-49

Indonesia (PII) dibawah pimpinan Surjopranoto dan Sukiman Wirjo Sandjojo. Dengan demikian, baik partai yang lahir dari ideologi Islam maupun nasionalis sama-sama tidak mampu membebaskan dirinya dari ancaman perpecahan.

Sesudah PNI dibubarkan sampai dengan berkuasanya Jepang (1942-1945) seluruh kegiatan partai politik di Indonesia dihentikan. Setelah Indonesia merdeka pemerintah menganjurkan untuk mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan. Lalu atas usulan BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) diumumkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai-partai Politik.¹² Sesudah proklamasi kemerdekaan keadaan menjadi berubah sama sekali. Indonesia saat itu memilih demokrasi sebagai sistem politik, namun dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, karena bangsa Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan (1945-1949).

Pada tanggal 21 Oktober 1945 PKI kembali dihidupkan secara legal. Pada bulan Februari 1946 diadakan Kongres PKI yang pertama yang dihadiri lebih dari 3.000 anggota PKI.¹³ Namun sebulan kemudian PKI yang dipimpin Mohammad Jusuf melakukan pemberontakan di Cirebon. Penyebabnya karena PKI tidak puas dengan kepemimpinan birokrasi lokal yang masih diisi oleh pamong praja lama. Pemberontakan tersebut berhasil digagalkan oleh

¹² Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Penerbit: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 33

¹³ Seri Buku Tempo, *Musso: Si Merah di Simping Republik* (Jakarta: Kepustakaan Gramedia, 2011), hlm. 27.

kekuatan RI. Kemudian, tokoh-tokoh PKI seperti Sardjono, Abdul Madjit Djojodiningrat, Setiadjit, Marutto Darusman, Alimin dan tokoh lain yang selama ini bersembunyi ke luar negeri, datang ke Indonesia dan mereka sepakat menggelar Kongres pada akhir April 1946 di Solo, sejak saat itu PKI kembali berdiri secara resmi.

Pada tanggal 10 Agustus 1948, Musso datang ke Indonesia dan mengambil alih kepemimpinan Partai Komunis Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 September 1948 di bawah kepemimpinan Musso¹⁴, PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Musso, Amir, serta para pemimpin PKI lainnya, mereka memproklamkan berdirinya negara “Sovyet Republik Indonesia” di kota Madiun.¹⁵

Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI terus meluas hingga ke Solo, Magetan, Purwodadi, dan Cepu. Dalam gerakan tersebut para pejabat,

¹⁴ Musso (1897-1948) adalah pemimpin PKI tahun 1920-an yang menganut pemikiran Stalinis bahwa hanya ada boleh satu partai kelas buruh. Ia merupakan salah satu tokoh komunis Indonesia yang terkemuka. Sejak tahun 1926 Musso tidak pernah menginjakkan kakinya ke Indonesia, karena ketika itu PKI memberontak tahun 1926 ia berhasil melarikan diri ke Singapura. Dalam kunjungannya secara rahasia pada tahun 1935 di Surabaya Musso mendirikan organisasi PKI bawah tanah atau “illegal”, Amir dan pemimpin lainnya yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengakui keberadaan PKI bawah tanah dan sejak saat itu ikut bergabung dengan PKI bawah tanah bentukan Musso. Ketatnya pengawasan dinas rahasia pemerintah kolonial dan karena faktor kecerobohan, konsolidasi PKI terbongkar oleh Belanda. Ia pun melarikan diri ke Uni Soviet. Pada tanggal 10 Agustus 1948 ia datang lagi ke Indonesia dengan menyamar sebagai sekretaris Soeripno, utusan pemuda dalam International Union of Student di Praha yang berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Bersama dengan Amir Sjarifoeddin ia menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia.

¹⁵ Menurut Aidit “tindakan mengangkat Wakil Walikota Madiun menjadi Residen sementara Madiun dikarenakan keadaan yang mulai mencekam di Madiun, terutama setelah terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan di Solo dan terjadinya pertempuran antar kelompok-kelompok dalam Angkatan Darat yakni antar kelompok yang pro dan yang anti penculikan. Walikota Madiun ketika itu sedang dalam keadaan sakit dan tidak ada di Madiun. Karena itu FDR (Front Demokrasi Rakyat) termasuk PKI mendesak agar Wakil Walikota Supardi bertindak dan berani bertanggung jawab serta bersedia menjabat residen sampai walikota kembali. Setelah itu Supardi diminta supaya segera melapor ke pemerintah pusat dan minta instruksi untuk melakukan tindakan selanjutnya. Tindakan ini bukan merobohkan Republik Indonesia, atau tindakan mengadakan *coup d’etat* atau mendirikan pemerintah Sovyet” seperti yang dituduhkan. Lihat DN. Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 Peristiwa Sumatra 1956* (Jakarta: Yayasan pembaruan, 1957), hlm. 10-11.

perwira, prajurit, lurah, kiai, santri, dan masyarakat yang anti komunis menjadi korban kekerasan dan keganasan PKI.¹⁶ Selanjutnya pemerintah menumpas pemberontakan tersebut dan akibatnya terjadi pertempuran yang menurut sejarawan Ricklefs telah menewaskan kaum komunis sebanyak sekitar 8.000 orang.¹⁷

Pemberontakan PKI tahun 1948 tidak menyebabkan PKI dibubarkan karena saat ini bangsa Indonesia direpotkan dengan agresi militer Belanda II. Ketika Pemerintah Republik Indonesia sedang sibuk melakukan konsolidasi setelah pemberontakan PKI berhasil ditumpas di Karasidenan Madiun, Kabupaten Purwodadi dan Kecamatan Cepu, Belanda melaksanakan lagi agresi militernya terhadap wilayah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda yang kedua inilah yang menyebabkan pemberontakan PKI tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Tindakan hukum kepada pemimpin dan anggota PKI dan tindakan hukum kepada PKI sebagai partai tidak dapat dilakukan. Pada tanggal 7 September 1949, Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo justru mengeluarkan pernyataan bahwasanya, hanya pelaku pemberontakan yang bertindak kriminal yang diadili, sedangkan yang lain tidak akan dituntut. Pemerintah justru mengharapkan kerjasama dari kaum komunis untuk melawan Belanda dan

¹⁶ Jusuf Badri, *Inilah Komunisme dan Agama Komunis* (Jakarta: Restu Agung, 2001), hlm 283. Lihat juga Fadli Zon, *Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948* (Jakarta: Komite Waspada Komunisme, 2005). Serta AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 8* (Jakarta: Disjarah TNI, 1979).

¹⁷ MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu, 2009), hlm. 482

sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintah membenarkan adanya oposisi dalam kehidupan parlementer.

Tahun 1950 adalah lahirnya negara kesatuan di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Mulai tahun ini dijalankan sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer secara penuh. Semula diharapkan sistem ini akan mampu membangun demokrasi yang sehat di Indonesia, tetapi yang terjadi adalah praktik-praktik ultrademokrasi.¹⁸ Pada periode ini, terjadi perpecahan politik dalam kubu ideologi Islam dan ideologi nasionalisme. Sejak 1952 pendukung utama Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia) tinggal Muhammadiyah sedangkan NU (Nahdlatul Ulama) telah mengubah dirinya dari gerakan sosial-keagamaan menjadi partai politik. Pada periode ini partai politik yang mewakili ideologi Islam antara lain: Masjumi, NU, PSII, PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia) dan PPTI (Partai Parsatuan Tarikat Indonesia). Dari kubu nasionalis diantaranya PNI, PIR (Partai Indonesia Raya), PRN (Partai Rakyat Nasional) dan lain-lain. Dari ideologi komunis diantaranya Partai Komunis Indonesia dan Acoma (Angkatan Komunis Muda). Secara relatif perpecahan di kalangan penganut komunis ternyata lebih kecil.

Sesudah keadaan kembali normal, pemimpin-pemimpin PKI berusaha mengonsolidasi partainya.¹⁹ Tidak mudah untuk membangun kembali partai yang sudah tercerai berai. Rex Mortimer mengatakan:

¹⁸ M. Rusli Karim, *Partai Politik.....*, hlm. x

¹⁹ PKI pada awal tahun 1950-an sibuk melakukan kampanye membersihkan diri dengan menyatakan bahwa PKI dalam *Madiun Affair* tidak bersalah, tetapi PKI hanyalah korban dari suatu konspirasi. PKI juga mengeluarkan buku putih tentang pemberontakan ini.

“Ketika PKI di bangun kembali oleh DN. Aidit, partai ini menderita banyak sekali kelemahan, ketidaksatuan internal, keterisolasian politik, dan reputasi buruk “menikam Republik dari belakang” selama perang kemerdekaan menghadapi Agresi Militer Belanda”.²⁰

Namun pada tahun 1950 PKI mampu tumbuh dan berkembang menjadi partai massa. Pengaruhnya dapat dirasakan di setiap lapangan kehidupan sosial politik. Wakil-wakil partai bisa duduk di kabinet dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di samping dalam bidang politik, jalur partai pun merembes ke bidang ekonomi, pendidikan, kesenian dan kesusasteraan.²¹ Pada pemilihan umum pertama tahun 1955, Partai Komunis Indonesia mendapat tempat dan menduduki posisi keempat setelah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Suara yang diperoleh Partai Komunis Indonesia sebanyak 6.176.914 atau 16,4% dari seluruh pemilih di Indonesia yakni sejumlah 37.785.299.²² Hal itu merupakan sesuatu yang menakjubkan dan bertolak belakang dengan perilaku yang dilakukan PKI selama ini,²³ ternyata trauma politik pemberontakan Madiun 1948 yang belum lama terjadi tidak berpengaruh terhadap eksistensi partai.²⁴

²⁰ Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hlm. 4

²¹ Ismail Saleh, *Tragedi Nasional: Percobaan KUP G 30 S/PKI di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 5

²² Untuk lebih lengkapnya lihat MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2009), Hlm. 496

²³ Saat pemberontakan Madiun tahun 1948 terjadi, yang menjadi sasaran mereka yang pertama adalah orang-orang Masyumi, terutama para pemimpin dan kiayi-ulamanya, orang-orang PNI, anggota-anggota pemerintah dan pegawai-pegawai pemerintah lainnya. (Jusuf Badri Halaman: 283). Kenapa mereka yang menjadi sasaran PKI karena selama ini mereka mencela aksi-aksi komunis dan tidak pernah mendukung PKI. Lebih lengkapnya, lihat Fadli Zon dan M. Halwan Aliudin, *Kesaksian Korban Pemberontakan PKI 1948* (Jakarta: KWK, 2005)

²⁴ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 58

Keadaan seperti tersebut di atas hanya mungkin sekali terjadi karena peranan pimpinan-pimpinan PKI yang berusaha dengan keras membangun dan mengembalikan citra baik partai di mata masyarakat, serta kondisi bangsa Indonesia pascakemerdekaan dan pascapemberontakan Madiun 1948 ketika itu memungkinkan partai ini bisa hadir lagi ditengah-tengah masyarakat. Kesempatan ini digunakan secara baik oleh para pemimpin PKI untuk membangun dan mengembangkan partainya setelah mengalami kehancuran akibat pemberontakan Madiun 1948.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa bangkitnya Partai Komunis Indonesia pascapemberontakan Madiun 1948 hingga partai ini menang dalam pemilu tahun 1955 menarik untuk diteliti. *Pertama*, meskipun PKI pernah digilas dan dibuat hancur, baik oleh pemerintah pada masa kolonial dan oleh pemerintah Indonesia serta masyarakat yang anti terhadap PKI, akan tetapi PKI bisa bangkit lagi. Seperti keyakinan yang dikatakan Sudisman dalam pledoi sidang terakhir tahun 1967:

“Meskipun PKI sekarang diserak-serakkan, aku tetap berkeyakinan kuat kalau hanya waktu, dan dalam proses sejarah itu sendiri, kalau PKI pada akhirnya akan bangkit lagi, karena selamanya PKI anak zaman, dilahirkan ke dunia oleh zaman itu sendiri...”²⁵

PKI merupakan partai yang pandai meraih simpati massa, memanfaatkan situasi krisis, partai yang mengidentikkan diri sebagai pembela rakyat jelata, anti penjajahan, pejuang demokrasi, penyokong revolusi dan sebagainya.

²⁵ Dikutip dari Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hlm. xiii

Kedua, PKI tidak pernah berhenti menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Sejarah membuktikan, sesudah pemberontakan tahun 1926/1927, PKI dinyatakan dilarang oleh pemerintah kolonial. Karena dilarang, PKI selama 20 tahun bergerak secara ilegal atau melakukan gerakan bawah tanah untuk melawan pemerintah kolonial. Begitu juga yang dilakukan PKI setelah PKI ditumpas oleh pemerintah Indonesia setelah melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948. Meskipun partai dilarang tetapi keberadaannya tidak pernah hilang. Untuk saat ini, jika tahun 1965 gerakan komunisasi nampak jelas dengan warna “merah”nya, justru sekarang multiwarna. Hal itulah yang membuat PKI sulit diidentifikasi.²⁶ Jika dulu pada masa Orde Lama, PKI jelas bergerak lewat Nasakom-nya, kini telah berkolaborasi dengan berbagai elemen serta berintegrasi dengan sejumlah partai politik. Meskipun sebelumnya Partai ini sudah beberapa kali ditumpas dan dibuat hancur, akan tetapi PKI bisa bangkit, tumbuh dan berkembang kembali.

Ketiga, kebangkitan kaum “kiri” di era reformasi paling menyolok diindikasikan oleh maraknya perkembangan kajian dan penerbitan buku-buku “kiri” sepanjang tahun 1998-2001.²⁷ Ini merupakan gejala yang tidak pernah terjadi di masa Orde Baru ketika Soeharto berkuasa sepanjang tiga dekade

²⁶ Aminuddin Kasdi dalam diskusi “*Menyikapi Bangkitnya Neo Komunis Pada Era Reformasi*”. Tanggal 9 Februari 2010. Di Surabaya. Sumber: www.hidayatullah.com.

<http://www.voa-islam.com/lintasberita/hidayatullah/2010/02/10/3232/gerakan-pki-saat-ini-multiwarna-dan-lebih-susah-diidentifikasi/> Diakses tanggal 30 Oktober 2010

²⁷ Ada sekitar 24 judul karya-karya Marxis, Komunis dan PKI yang diterbitkan di Indonesia selama periode tahun 1998-2001. Sumber: Ahmad Suhelmi, *Islam dan Kiri: Respons Elite Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca Soeharto* (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2007) Lebih lengkapnya lihat lampiran.

lebih. Dalam upaya membendung perkembangan ideologi kiri, kelompok Aliansi Anti-Komunis (AKK) berupaya membendung perkembangan ideologi kiri. AKK melakukan manuver politik yang menimbulkan kontroversi dengan melakukan aksi pembakaran buku-buku kiri pada tanggal 19 April 2001 di Jakarta. Disamping itu, ada aksi sekelompok orang ketika membubarkan paksa kegiatan sosialisasi yang dilakukan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ribka Tjiptaning, Rieke Diah Pitaloka dan Nur Suhud di Banyuwangi, Jawa Timur, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010. Kelompok itu menuduh pertemuan yang digelar tiga anggota dewan tersebut di sebuah rumah makan di Pakis sebagai temu kader komunis. Sebab, di antara pesertanya terdapat eks tapol.²⁸

Kemunculan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada tahun 1996 yang pada tahun 1999 berhasil menjadi salah satu kontestan Pemilihan Umum di era paska Orde Baru yang mengklaim dirinya “progresif revolusioner” merupakan tonggak penting dalam perjuangan kaum kiri dalam pentas politik nasional. Kemunculan PRD telah berhasil mencairkan kembali kebekuan dalam pergerakan kaum kiri akibat politik represi Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, ada upaya untuk mencabut TAP MPRS No. XXV/1996 yang berisi larangan Marxisme-Leninisme di Indonesia. Apapun keberatan yang ditujukan terhadapnya, telah

²⁸ *Tempo Interaktif*, 29 Juni 2010. Ketua dan anggota Komisi Kesehatan, Komisi IX DPR RI pada tanggal 24 Juni 2010 di Rumah Makan Pakis Ruyung Banyuwangi, mengadakan pertemuan yang tujuannya adalah hendak memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hak untuk memperoleh pengobatan gratis sekaligus sosialisasi RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akan tetapi sekelompok orang membubarkan acara tersebut dengan alasan “temu kangen eks anggota PKI,” begitulah kata Ketua Forum Umat Islam (FUI) Aman Faturahman.

membangkitkan optimisme kaum “kiri” untuk kembali tampil dalam pentas politik nasional.²⁹ Menurut Aminuddin Kasdi, “...di era reformasi ini sudah selayaknya keberadaan PKI untuk diwaspadai dan dijadikan pembelajaran akan kebangkitan kembali PKI meskipun tanpa partai”.

Keempat, karya-karya tentang Partai Komunis Indonesia sebenarnya sudah banyak. Sebagian besar karya tentang PKI banyak membahas tentang berbagai gerakan atau pemberontakan-pemberontakan yang pernah dilakukan PKI. Akan tetapi masih jarang karya yang secara khusus menulis tentang bangkitnya PKI maupun peranan pemimpin-pemimpinnya dalam membangun dan mengembangkan partai yang terpecah belah, khususnya lagi setelah pemberontakan di Madiun tahun 1948. Berdasarkan alasan serta argumen yang sudah diungkapkan di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang bangkitnya Partai Komunis Indonesia dilihat dari peranan pemimpin Partai Komunis Indonesia setelah pemberontakan PKI 1948-1955.

²⁹ Munculnya berbagai kelompok politik beraliran Kiri-khususnya Kaum Sosialis, Marxis dan Komunis di era pemerintahan BJ. Habibie (1998-1999) dan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) bisa dilihat sebagai produk dari arus demokratisasi dan liberalisasi yang terjadi ditingkat Internasional. Gerakan demokratisasi di negara-negara Afrika, Asia (Filipina) dan Amerika Latin misalnya telah memberikan inspirasi bagi lahirnya PRD di Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai kebangkitan kaum komunis di Indonesia pasca Orde Baru dapat dilihat pada disertasi yang ditulis Ahmad Suhelmi di Departement of Political Science, International Islamic University, Malaysia yang sudah diterbitkan menjadi buku dengan judul “*Islam Dan Kiri: Respons Elite Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca Soeharto.*” Penerbit: Yayasan SAD Satria Bhakti. Jakarta. 2007.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Apa yang dilakukan pimpinan PKI sehingga mampu membangun kembali dan mengembangkan partainya yang terpecah belah setelah pemberontakan PKI Madiun 1948 hingga pemilu tahun 1955?
2. Siapa-siapa saja tokoh PKI yang berperan membangun dan mengembangkan partai setelah pemberontakan PKI di Madiun? dan strategi apa saja yang dilakukan pemimpin PKI dalam membangun dan mengembangkan partai?
3. Apakah kondisi yang melingkupi negara setelah pemberontakan PKI Madiun berpengaruh terhadap bangkit dan berkembangnya PKI?

Periodesasi yang digunakan yaitu tahun 1949-1955. Tahun 1949 dipakai setelah PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Sedangkan tahun 1955 diambil sebagai akhir penelitian yakni ketika PKI ikut serta dalam pemilihan umum dan dinyatakan menang dan menduduki posisi nomor empat dalam perolehan suara.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemimpin-pemimpin PKI dalam membangun kembali partainya setelah memberontak tahun 1948 sampai pemilu tahun 1955,

mengetahui strategi apa saja yang dilakukan pemimpin PKI dalam membangun dan mengembangkan partai. Serta untuk mengetahui apakah kondisi negara Indonesia setelah pemberontakan PKI di Madiun 1948 berpengaruh dan memberi kesempatan bagi bangkitnya PKI ketika itu.

D. Manfaat Penelitian

Dari tulisan ini peneliti harapkan ada manfaatnya:

1. Secara teoritis, tulisan ini nantinya merupakan karya sejarah, dimana PKI sebagai salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia mampu tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik meskipun beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap negara.
2. Mengingatkan agar masyarakat mengetahui dan tidak melupakan bahwa Partai Komunis Indonesia dapat tumbuh dan bangkit kembali setelah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.
3. Menambah kasanah karya/ literatur mengenai sejarah Partai Komunis Indonesia 1949-1955.

BAB V

KONDISI INDONESIA PASCAPEMBERONTAKAN PKI MADIUN 1948

A. Agresi Militer Belanda II

Sesudah pemberontakan PKI berhasil ditumpas, kedudukan PKI dalam Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi beku, sekalipun tidak ada pernyataan yang tegas tentang pembubaran PKI. Kegiatan politik setelah pemberontakan PKI, menurun dan untuk sementara waktu oposisi terhadap Kabinet Hatta mereda. Meskipun kebijaksanaan pemerintah dirongrong baik dari dalam dan luar, tetapi Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan tetap pada pendiriannya dan berusaha dengan sekuat tenaga menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.¹

Perundingan-perundingan yang dilakukan antara Belanda dengan pihak Republik Indonesia setelah kemerdekaan, ternyata hanya sekedar taktik Belanda saja untuk memperkuat kedudukannya. Sebaliknya perundingan-perundingan yang dilakukan justru membuat lemah posisi Indonesia. Dalam dua kali perundingan yang dilakukan dengan pihak republik sejak tahun 1946, Belanda selalu mengingkari, sehingga berakhir dengan dua kali agresi militer. Perundingan pertama Linggar Jati, berakhir dengan Agresi Militer pertama; dan perundingan berikutnya dalam perundingan Renville, diakhiri Belanda dengan agresi militernya

¹ Ahmad Husein Dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/ Riau 1945-1950 Jilid II*, (Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPSIM), 1992), hlm. 1

yang ke dua.² Agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 menimbulkan reaksi hebat dari dunia. Tindakan Belanda terhadap republik dalam agresi pertama telah mengundang simpati dari berbagai negara di dunia, terutama di Asia,³ sehingga masalah Indonesia-Belanda mulai menjadi masalah Internasional.

Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, maka dilakukanlah gencatan senjata antara Belanda dengan pihak Republik Indonesia. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dibentuk Komisi Konsuler. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa ternyata Belanda masih mengadakan gerakan militer. Dewan Keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia, akhirnya menyetujui usul Amerika bahwa untuk mengawasi permusuhan dibentuk Komisi Jasa-Jasa Baik (Komisi Tiga Negara) oleh PBB.⁴

Pada tanggal 17 Agustus 1947 diumumkan gencatan senjata secara resmi antara kedua belah pihak. Kemudian di bawah pengawasan KTN (Komisi Tiga Negara) perundingan antara Belanda dengan pihak republik kembali dilakukan. Hasilnya disetujui perundingan *Renville* yang ditanda tangani kedua pihak tanggal 17 Januari 1948.⁵ Akan tetapi di antara butir-butir perjanjian Renville

² Mestika Zed, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Kota Padang dan Sekitarnya 1945-1949*, (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2002), hlm. 285

³ Pada tanggal 30 Juli 1947 India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera di masukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan PBB.

⁴ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 220

⁵ Mestika Zed, *Sejarah Perjuangan....*, hlm. 286-287

menimbulkan persoalan baru yakni masalah penetapan batas wilayah (garis Van Mook⁶), serta rencana pembentukan negara federal, khususnya di Jawa, Sumatera dan Madura.⁷

Ketika perundingan masih berlangsung pemerintah melakukan *reshuffle* Kabinet Amir Sjarifoeddin. Tujuannya untuk memperkuat Kabinet Amir dalam rangka mempersiapkan dan menghadapi perundingan dengan Belanda. Kabinet Amir Sjarifoeddin mendapat tantangan dari kelompok-kelompok militer serta terjadi pro kontra dari partai-partai politik yang berkoalisi (Partai Soialis dan Masyumi⁸) disusul kemudian dari PNI yang menolak persetujuan Renville. Hal ini menyebabkan pada tanggal 23 Januari 1948 Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden setelah setengah jumlah anggota kabinetnya membelot. Ia kemudian hari dikecam oleh Musso karena “kesalahan yang sangat penting...bahwa kabinet mengundurkan diri secara

⁶ “Garis Van Mook” merupakan garis demarkasi khayal yang ditetapkan secara sepihak oleh Belanda setelah Agresi Militer I. Garis tersebut menghubungkan titik-titik terdepan posisi Belanda di setiap daerah pendudukan yang dinyatakan sebagai daerah yang dikuasai Belanda. Operasi “pembersihan” sering dilakukan Belanda terhadap kekuatan Republik yang masih bertahan di “wilayah” ini. Tidak jarang Belanda menerobos melampaui garis itu. Lihat Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950* (Jakarta: Penerbit: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hlm. 438-439

⁷ George Mc.Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 268-269

⁸ Masyumi yang merupakan pendukung utama Kabinet akhirnya menarik Menteri-Menterinya. Tindakan ini diambil karena Masyumi berpendapat bahwa Amir Sjarifoeddin menerima begitu saja ultimatum Belanda atas dasar 12 prinsip politik dan 6 tambahan dari KTN. Prinsip Belanda adalah: pengurangan pasukan, menghidupkan kegiatan ekonomi, tetapi dalam usul tersebut tidak disebutkan masalah penarikan tentara Belanda. Sehingga menurut KTN sikap Belanda ini dianggap bahaya lalu diusulkan 6 prinsip tambahan oleh KTN yang diantara poin prinsip tersebut dinyatakan bahwa antara enam bulan sampai satu tahun sesudah ditandatanganinya persetujuan politik akan diadakan plebisit di seluruh Indonesia di bawah pengawasan KTN untuk menentukan apakah rakyat berhasrat bergabung dengan Republik atau tidak.

sukarela, tanpa mengadakan perlawanan sedikitpun...kaum komunis mengucilkan diri ke dalam oposisi”.⁹ Amir sendiri marah atas lawan-lawannya dari Masyumi karena telah menggunakan isu Renville untuk menjatuhkannya.¹⁰

Kedudukan Amir Sjarifoeddin digantikan oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. Kabinet baru terbentuk pada tanggal 19 Januari 1948. Mohammad Hatta yang menduduki jabatan Perdana Menteri secara eksplisit menerima semua pasal dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Persetujuan Renville. Semua pasukan republik yang berada di daerah “kantong”, daerah *Front* tempat markas kesatuan-kesatuan tempur TNI, harus ditarik mundur dari belakang garis demarkasi. Hatta menyatakan bahwa republik bersedia ambil bagian dalam “Pemerintahan Federal Sementara” dan bekerjasama menentukan masa depan Indonesia, melahirkan Negara Indonesia Serikat (RIS) pada Agustus 1948.¹¹

Perdana Menteri Hatta berusaha memperbaiki segala persoalan dalam tubuh pemerintahan republik. Salah satu kebijakannya di bidang kemiliteran adalah RERA (Rekonstruksi dan Rasionalisasi).¹² Supaya program tersebut berjalan dengan lancar, Hatta merangkap jabatan Menteri Pertahanan. Kebijakan

⁹ Anthony J.S. Reid, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 169

¹⁰ *Ibid*, hlm. 224

¹¹ Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950* (Jakarta: Penerbit: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hlm. 439

¹² Kebijakan RERA pemerintahan Hatta adalah untuk merampingkan jumlah personil angkatan bersenjata (TNI) sehingga organisasi militer semakin efisien. Pihak militer yang sebelumnya dikucilkan diajak berpartisipasi dalam proses politik. Hatta mencoba menghilangkan dualisme yang tajam antara pemerintah (Kementrian Pertahanan) yang dipandang terlalu dominan dalam fungsi administrasi dan pengawasan kemiliteran dengan staf Panglima TNI yang diperlukan sebagai perwira-perwira operasi. Lihat Mestika Zed, *Kepialangan.....*, hlm. 439

RERA ditentang banyak kalangan, khususnya kelompok Amir Sjarifoeddin. Bulan Februari 1948 kelompok oposisi membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR), Front Persatuan Partai Sosialis, PKI, Pesindo, Partai Buruh, dan Federasi serikat Buruh Indonesia. Kegiatan politik FDR makin radikal setelah meleburkan diri ke dalam PKI. Amir Sjarifoeddin menentang program RERA, karena dianggap program ini telah memecah belah angkatan bersenjata.¹³ Aktivitas kelompok FDR semakin meningkat sejak bulan Juli 1948. Mereka menyerang langsung Pemerintahan Sipil dan Tentara Reguler di Solo dan berusaha menduduki kota Madiun pada pertengahan September 1948.¹⁴

Program Kabinet Hatta selanjutnya adalah melanjutkan perundingan Indonesia-Belanda atas dasar persetujuan Renville. Sebagai ketua delegasi RI diangkat Mr. Moh. Roem sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Widjojoatmodjo. Pertemuan pertama antara kedua delegasi bertempat di Kaliurang tanggal 21 Februari 1948. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pertemuan selanjutnya diadakan di dua tempat secara berganti-ganti sekali tiga

¹³ Setiadi Reksoprodjo, bekas Menteri Penerangan pada masa Kabinet Amir Sjarifoeddin mengatakan: jasa Amir dalam mengefektifkan angkatan bersenjata Indonesia, sejak Nopember 1945-Januari 1948, Amir berturut-turut menjadi Menteri Keamanan Rakyat/ Menteri Pertahanan. Pada awal kemerdekaan, unsur tentara terdiri atas berbagai kelompok terlatih (eks didikan Belanda/Jepang) dan Laskar. Dalam masa transisi, menurut Amir, diperlukan Tentara Masyarakat. Amir juga berpendapat RI hanya bisa bersandar pada perjuangan kekuatan rakyat, bukan pada tentara konvensional. Tentara RI haruslah tentara rakyat, tidak boleh bersifat elitis, karena bila terpisah dari rakyat, mereka tidak berdaya apa-apa. Kelaskaran memiliki tradisi akrab dengan rakyat, tetapi memang kedisiplinanya dalam berorganisasi harus ditingkatkan. Ini berbeda dengan tentara didikan Belanda dan Jepang, yang umumnya kurang mengerti perlunya keterlibatan rakyat. Untuk itu, Amir mendirikan badan pendidikan politik tentara untuk menjembatani perbedaan antara kelaskaran dan tentara regular. Skema itu sudah mulai dijalankan, tapi belum berlangsung lama karena agresi Belanda, bahkan kemudian Amir digantikan Hatta sebagai Perdana Menteri. (*Tempo*, 14 November 2010, hlm. 97).

¹⁴ Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi*, hlm. 440

minggu, yakni di Kaliurang dan Jakarta. Agenda perundingan berkisar persoalan politik, yakni pembentukan pemerintahan Federal, Uni Indonesia-Belanda, pemerintahan peralihan, dan sidang konstituante.¹⁵

Sebagai pendahuluan, Hatta melakukan pembicaraan dengan van Mook mengenai masalah plebisit, kedudukan RI, dan penyerahan kekuasaan RI kepada pemerintah sementara. Hatta juga mengemukakan bahwa jumlah negara bagian tidak boleh lebih dari ketentuan yang terdapat dalam persetujuan Linggajati, yakni RI, Negara Indonesia Timur dan Borneo. RI juga harus diakui secara *de facto* dan hubungan dengan luar negeri tetap terpelihara agar tidak terjadi kekosongan.¹⁶

Perundingan selanjutnya yakni di Kaliurang, ternyata mengalami jalan buntu dikarenakan perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan plebisit. Menurut versi RI, plebisit dilakukan di daerah-daerah pendudukan Belanda saja. Sedangkan Belanda juga sebaliknya, plebisit dilakukan di wilayah RI. Kedua delegasi juga berselisih pendapat mengenai agenda perundingan. Belanda bersikeras agar masalah gencatan senjata yang lebih dahulu dibicarakan, baru ke masalah politik. Sementara pihak RI yang juga mendapat dukungan KTN lebih mengutamakan masalah politik yang terlebih dahulu di bicarakan.

Tidak ada hasil dari perundingan yang dilakukan, akhirnya KTN mengusulkan supaya daerah-daerah Jawa, Madura, serta Sumatera diadakan

¹⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI....*, hlm. 242-243

¹⁶ *Ibid*, hlm. 245

pemilihan umum untuk membentuk konstituante. Namun usul ini pun tidak mencapai kesepakatan.¹⁷ Sementara itu terdengar isu bahwa pemerintah RI melalui duta besar di Praha, Suripno mengadakan perundingan dengan Uni Sovyet dan negara-negara Blok Timur. Hal ini membuat pemerintah Belanda mengirimkan *Aide Memoire* kepada pemerintah RI. Isinya *pertama*, meminta supaya RI melaksanakan hal-hal yang disetujui persetujuan Linggajati, yaitu pengakuan kedaulatan Belanda di seluruh Indonesia saat masa peralihan. *Kedua*, sampai di mana hubungan luar negeri RI khususnya dengan Uni Sovyet.¹⁸ Tanggal 10 Juni 1948 pemerintah RI menjawab bahwasanya RI bersedia memasrahkan kekuasaan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS). Sebelum NIS dibentuk, kedudukan RI tetap seperti sekarang. Tentang hubungan dengan Uni Sovyet, karena belum diratifikasi oleh KNIP, maka perjanjian itu belum dianggap berlaku.¹⁹

Pada akhir bulan Mei 1948 Du Bois dan Thomas Critcley (anggota KTN yang berasal dari AS dan Australia) mengajukan usul “*Rencana Du Bois Critcley*”. Usul tersebut adalah agar sebelum terbentuk pemerintahan federal sementara, diadakan pemilihan umum yang harus dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah tercapainya penyelesaian politik. Untuk itu perlu dibentuk komisi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil RI dan Belanda. Komisi ini bertanggung jawab dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan pemilu tersebut. Belanda

¹⁷ *Merdeka*, 5 Mei 1948.

¹⁸ Marwati Djoened Poesponegoro. *SNI Jilid VI.....*, hlm. 244

¹⁹ *Merdeka*, 10 dan 11 Juni 1948.

justru menginginkan dibentuk dulu pemerintah federal sementara baru pemilu. Pemerintahan federal ini yang akan menyelenggarakan pemilu.

Du Bois Critchley juga mengusulkan masalah hubungan luar negeri, mereka mengusulkan agar hubungan luar negeri RI diurus oleh pemerintah federal sementara. Sedangkan Belanda menuntut agar hubungan luar negeri RI dilepaskan. Du Bois Critchley juga mengusulkan agar TNI secara keseluruhan ditampung dalam Angkatan Perang Federal. Namun Belanda menuntut agar TNI dihilangkan ketentaraannya dan dijadikan “*gendarmerie*” saja.²⁰ Namun usulan ini juga jalan ditempat akibat bocornya rencana. Du Bois dan lainnya menolak untuk melanjutkan perundingan. Tanggal 23 Juli 1948 RI menyatakan perundingan tidak dapat dilanjutkan.

Cochran pengganti Du Bois, pada tanggal 10 September 1948 memberikan usul baru yang isinya mengenai pembentukan negara federal sementara serta lembaga-lembaga yang terdiri atas Komisaris Tinggi, Perdana Menteri dengan Kabinetnya, Dewan Federal, dan Majelis Permusyawaratan Federal.²¹ Namun usul Cochran ini tidak pernah dibahas oleh kedua delegasi sebab perundingan selanjutnya diadakan antar pemerintah. Antara tanggal 3-7 Nopember 1948

²⁰ “Gendarmerie sama dengan polisi”. Edi Saputra, *Sumatera Dalam Perang Kemerdekaan: Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris dan Belanda* (Jakarta: Yayasan Bina Satria, 1987), hlm. 464. Pada tanggal 15 Juli 1947 Belanda memberikan ultimatum yang isinya: 1. Gendarmeri bersama harus dibentuk. 2. Permusuhan umum dari Republik terhadap Belanda harus dihentikan terhitung mulai tanggal 16 Juli 1947 tengah malam. Maulwi Saelan, *Dari Revolusi '45 Sampai Kudeta '66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa* (Jakarta: Penerbit Yayasan Hak Bangsa, 2001), hlm. 106

²¹ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 245

diadakan pembicaraan antara Hatta dan Menteri Luar Negeri D.U. Stikker. Isi pembicaraan tersebut hanya berisi penajakan, sebab Stikker tidak diberi wewenang untuk membicarakan masalah politik sebelum RI menghentikan pelanggaran gencatan senjata.

Pada tanggal 9 Nopember 1948 Hatta menyampaikan *Aide Memoire*, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. RI bersedia bekerjasama dengan Belanda untuk membentuk pemerintah federal sementara pada tanggal 1 Desember 1948 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lembaga pemerintah federal sementara terdiri atas dewan menteri di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri; b. Dewan Perwakilan sementara terdiri atas wakil-wakil Negara bagian dan wakil-wakil RI; c. Dalam Dewan Federal jumlah wakil RI seperdua dari jumlah seluruh anggota.
2. Pemilihan umum untuk membentuk konstituante yang selanjutnya akan bertindak sebagai Parlemen, diadakan enam bulan setelah pemerintahan federal sementara terbentuk. Konstituante ini yang akan memilih Presiden.
3. Perwakilan RI di luar negeri ditampung oleh pemerintah federal sementara.²²

Hatta juga mengusulkan angkatan perang pemerintah federal sementara terdiri atas TNI, KNIL dan batalyon-batalyon keamanan yang terdapat di negara bagian. Komando Angkatan Perang berada di tangan pemerintah federal sementara, sedangkan Wakil Tinggi Mahkota Belanda²³ hanya memegang Komando atas Angkatan Perang Belanda. Beel menolak usul ini dan tetap

²² *Ibid*, hlm. 245-246

²³ Wakil Tinggi Mahkota Belanda adalah Dr. L.J.M Beel. Ia menggantikan kedudukan Letnan Gubernur Jenderal van Mook tanggal 3 Nopember 1948 yang diberhentikan atas permintaan van Mook sendiri.

mengatakan komando harus tunggal sedang TNI harus dibubarkan dan ia pun mengancam akan menyerang Yogya serta membinasakan RI.

Sebelumnya, antara tanggal 27-30 Nopember 1948 sempat diadakan perundingan di Kaliurang. Akan tetapi kedua pihak masih tetap dalam pendiriannya masing-masing dan gagal mencapai kesepakatan.

Sementara itu, pihak komunis di seluruh dunia justru menyerang RI dibarengi dengan propagandanya. Seperti yang di muat dalam surat kabar *Daily Worker* dari komunis Inggris pada tanggal 8 Desember 1948 sebagai berikut:

“Sejarah! Demikian Marx, senantiasa berulang kembali, mula-mula sebagai suatu lakon sedih kemudian seperti lakon lucu. Dua puluh tahun yang lalu Chiang Kai Shek di Tiongkok menyeberang masuk barisan imperialism. Dengan tindakan itu dia membawa lakon sedih bagi Tiongkok. Akan tetapi sekarang, pemerintah terornya sedang ambruk, dan Chiang sendiri akan jatuh.

Maka dengan buru-buru dan tiada pikir panjang seorang kandidat yang baru mengisi tempatnya itu. Wakil Presiden Hatta, yang juga menjadi Perdana Menteri RI sebagaimana dilakukan oleh Chiang kai Shek, juga menyeberang masuk barisan imperialisme dan menahan 25.000 orang komunis dan progresif dalam penjaranya.

Akan tetapi bukalah mata, tuan Hatta! Coba lihat ke Nanking tuan tidak akan dapat memegang kekuasaan selama 20 tahun. Bahkan selama satu tahunpun tidak.

Untuk memberikan kesempatan padanya, maka Trotskis Tan Malaka dikeluarkan dari penjara dan bersama-sama dengan orang ini Hatta mulai menaangkapi pembesar-pembesar komunis dan progresif dari kalangan tentara Republik. Tidak diketahui apa yang terjadi di Madiun, akan tetapi cerita-cerita pers tentang “pemberontakan” komunis dan pembentukan “Republik Baru” oleh kaum komunis bukan main banyaknya disiarkan oleh kantor persuratkabaran Hatta yang bernama Antara.²⁴

²⁴ AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9* (Jakarta: Disjarah AD, 1978), hlm. 139

Pada tanggal 9 Desember 1948 pemerintah RI mengirimkan nota kepada KTN mengenai pendirian RI yakni:

1. Pemerintah RI telah mengalah sedapat-dapatnya untuk mendekati pendirian Belanda.
2. Petunjuk yang diberikan kepada para Menteri Belanda terbatas pada penajakan apakah pada dasarnya RI menerima baik syarat-syarat yang diajukan Belanda, sehingga tidak merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian lewat perundingan.
3. Pemerintah Belanda terbukti pada tahun 1948 akan membentuk pemerintah interim tanpa RI, tanpa perundingan terlebih dahulu dengan RI di bawah pengawasan KTN.

Pada tanggal 11 Desember 1948, KTN juga menerima nota dari pemerintah Belanda yang isinya:

1. Dalam perundingan di Kaliurang terbukti RI tidak mempunyai kekuasaan yang nyata terhadap tentaranya, karena itu tidak dapat diharapkan kerjasama yang sungguh-sungguh untuk mencegah pelanggaran persetujuan gencatan senjata.
2. Pendirian RI mengenai Wakil Tinggi Mahkota, terutama mengenai kekuasaan terhadap tentara di masa peralihan, bertentangan dengan kedaulatan Belanda sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian pertama pokok asasi persetujuan Renville, yang berarti berlangsungnya suatu keadaan yang tidak dapat dipertahankan, yakni adanya dua tentara saling berhadapan di bawah pimpinan yang terpisah.
3. Penolakan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan menyebabkan tidak ada harganya RI menerima naskah persetujuan yang direncanakan oleh KTN dan Amerika Serikat pada tanggal 10 September sebagai dasar perundingan.
4. Pemerintah Belanda harus bertindak melaksanakan keputusan mengenai pembentukan pemerintahan interim yang direncanakan atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah federal.

Pemerintah Belanda menutup nota tersebut dengan pernyataan bahwa perundingan di bawah KTN tidak berfaedah karena pada hakikatnya RI tidak mau mengakui perjanjian gencatan senjata dan persetujuan Renville.²⁵

Untuk membuka jalan kebuntuan ini Hatta sempat menulis surat kepada Cochran pada tanggal 13 Desember 1948 yang isinya RI bersedia menunda penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Negara Indonesia Serikat, RI juga bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Pada hari yang sama Kabinet Belanda sudah memerintahkan Beel untuk melancarkan serangan terhadap RI (tanggal 17 Desember 1948). Karena adanya surat Hatta penyerangan diundur sampai tanggal 21 Desember untuk menjawab surat Hatta terlebih dahulu. Tanggal 17 Desember surat baru sampai ditangan Hatta. Dalam jawabannya, Kabinet Belanda menyatakan bahwa surat Hatta tidak memadai untuk dijadikan dasar membuka kembali perundingan dan Hatta diminta mempertegas argumentasinya. Dikarenakan tidak dicantumkan kapan batas waktu surat balasan/ jawaban, namun Bell menyampaikan paling lambat tanggal 18 Desember pukul 10.00 hal ini mustahil bagi Hatta untuk mengumpulkan anggota kabinet dalam menyusun jawaban dalam waktu yang sangat singkat.

Pada tanggal 18 Desember 1948 pihak Belanda menyampaikan surat kepada Jusuf Ronodipuro, *liaison officer* delegasi RI di Jakarta.²⁶ Isinya terhitung mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville dan perjanjian gencatan senjata. Tanggal 18 Desember Pukul

²⁵ Marwati Djoenod Poesponegoro, *SNI Jilid VI.....*, hlm. 245-247

²⁶ *Ibid.* Hlm. 248

23.30 *Riphagen* (Jusuf Ronodipuro) datang ke rumah Mr. Sujono, Sekretaris Delegasi Indonesia untuk menyampaikan pemberitahuan tentang sikap Belanda ini.²⁷ Setengah jam kemudian tentara Belanda melakukan pengledahan ke rumah Sujono. Malam itu juga Belanda melakukan penangkapan-penangkapan. Tanggal 18 Desember 1948 pukul 24.00 telah mulai berlaku hari “H” serangan Belanda secara besar-besaran untuk menghancurkan RI dan TNI-nya.

Keesokannya hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, tepat jam 06.00 pagi, wakil Mahkota Belanda Dr. Beel mengeluarkan pernyataan melalui Radio Batavia. Katanya “pemerintah Belanda terpaksa membatalkan gencatan senjata dan mengangkat senjata untuk mengobati negeri ini yang hanya dapat berhasil baik sesudah dilakukan aksi pembersihan terhadap aksi-aksi kaum teroris dalam daerah republik.”²⁸

Bersamaan dengan pernyataan tersebut Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap ibukota Republik Yogyakarta. Setelah menduduki lapangan terbang Maguwo, Belanda meneruskan gerakannya ke dalam kota. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, beserta sejumlah menteri sempat melakukan sidang darurat.²⁹ Dari hasil sidang tersebut menghasilkan dua keputusan. *Pertama*, Presiden dan Wakil Presiden tidak akan meninggalkan ibu kota. Karena tidak ada yang mengawal mereka ke luar kota. Lagi pula selama di

²⁷ AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9* (Jakarta: Disjarah AD, 1978), hlm. 139

²⁸ *Ibid*, hlm. 330

²⁹ MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 347

kota hubungan dengan KTN masih bisa dilakukan dengan harapan Belanda mau berunding kembali. *Kedua*, memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera. Mandat juga diberikan kepada dr. Sudarsono, A.A. Maramis, dan L.N. Palar untuk membentuk *exile government* di luar negeri bila usaha Sjafruddin gagal.³⁰

Pada saat tentara Belanda menyerbu Yogyakarta, tokoh-tokoh PKI seperti Alimin, Tan Ling Djie, Ngadiman, Abdulmadjid dan lain-lain sempat meloloskan dan melarikan diri dari penjara Wirogunan di Yogyakarta. Tentu saja tentara republik tidak bisa menanganinya karena menghadapi serdadu-serdadu Belanda terlebih dahulu.³¹ Hal ini sangat mempengaruhi eksistensi kaum komunis. Belanda telah memindahkan sekitar 400 orang komunis ke dalam wilayah RIS karena tertahan di garis demarkasi. Dalam situasi yang diluar kontrol itu membuat tokoh-tokoh komunis yang ditahan berhasil meloloskan diri. Mereka bergabung dengan pasukan gerilya atau membentuk pasukan sendiri, bahkan banyak yang tidak diketahui lagi aktivitasnya.³²

Sementara itu, pemimpin Angkatan Perang yang sudah lama mengantisipasi segala kemungkinan dalam menghadapi serangan Belanda mulai melakukan perlawanan dengan cara perang gerilya yang agresif yang dilakukan

³⁰ Marwati Djoenod Poesponegoro, *SNI Jilid VI.....*, hlm. 258. Untuk lebih jelas dan lengkap dapat dilihat karya Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle: PDRI, Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*, (Jakarta: Grafiti, 1997).

³¹ Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia 1926-1948-1965* (Jakarta, 1988), hlm. 34

³² Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 10

oleh tentara dan rakyat.³³ Dengan demikian riwayat TNI dan Pemerintah RI tetap eksis tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh Belanda bahwa keduanya sudah berakhir.

Dunia internasional mulai bereaksi, sikap Belanda itu tidak dibenarkan sama sekali, bahkan dikutuk oleh bangsa-bangsa lain. Dewan Keamanan PBB menghukum secara moril perbuatan yang dilakukan Belanda. Penghentian permusuhan diusahakan, jalan-jalan menuju kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dicarinya.

Dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 Nopember 1949, diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949, Negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk Papua, kepada RIS, sebuah negara federal yang hanya bertahan secara utuh selama beberapa minggu saja.³⁴ Indonesia menjadi sebuah negara baru yakni menjadi sebuah negara serikat (Republik Indonesia Serikat-RIS), dan Republik Indonesia (RI) hanya salah satu dari tujuh negara yang bergabung ke dalam RIS. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang berlaku pada masa itu telah memberikan banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa.³⁵

³³ Pimpinan Angkatan Perang RI usai membasmi Pemberontakan PKI Madiun segera menyusun konsep pertahanan RI yakni Pertahanan Rakyat Semesta (*Total People's Defence*) guna menghadapi Belanda. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman menjabarkan konsepsi pertahanan semesta dalam Perintah Siasat No. 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam karya Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember 1948: Jenderal Spoor (Operatie Kraai) Versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No. 1)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

³⁴ MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 466

³⁵ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 19

Demikianlah persetujuan Renville yang sudah disepakati ternyata tidak bisa membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Perundingan-perundingan yang dilakukan selalu mengalami kebuntuan. Keduanya saling memegang prinsip dan keyakinannya masing-masing. Sedangkan peran KTN sebagai penengah justru tidak membuahkan hasil.³⁶

B. Sikap Pemerintah Terhadap PKI Pascapemberontakan Madiun 1948.

Penyelesaian pemberontakan PKI Madiun tidak sempat diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah RI dikarenakan adanya Aksi Militer Belanda II yang dilancarkan tanggal 19 Desember 1948. Dengan adanya peristiwa ini, banyak tokoh-tokoh atau kader PKI yang berhasil bersembunyi menyelamatkan diri (terutama di daerah pendudukan Belanda).³⁷

Pemberontakan Madiun merupakan salah satu titik balik revolusi yang sangat penting. PKI tidak lagi merupakan ancaman bagi republik sampai tahun 1950-an. Golongan kiri pada umumnya tidak dipercaya lagi dan banyak pemimpinnya yang dijebloskan ke dalam penjara atau mati.³⁸ Akibat dari pemberontakan Madiun 1948, pemerintah republik berencana untuk menuntut

³⁶ Mestika Zed, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Kota Padang dan Sekitarnya (1945-1949)*, (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 200, hlm. 290

³⁷ Soetopo Soetanto. PKI dan Gerakan Komunis Internasional. Dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis :Kumpulan tulisan terpilih tentang gerakan komunis dan bahaya ekstrim lainnya di Indonesia* (Jakarta: Penerbit: Intermasa, 1997), hlm. 187.

³⁸ MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 461

melalui jalur hukum terhadap para pelaku baik yang terlibat langsung maupun tidak. Posisi FDR/PKI secara organisasi sangat lemah, bahkan eksistensinya sudah dibubarkan, meskipun keputusan secara tertulis tidak pernah diumumkan. Pembicaraan menyangkut nasib PKI dan umumnya kaum komunis diupayakan terus. Dalam sidang-sidang Kabinet dibicarakan secara khusus tentang tindakan pemerintah berikutnya dalam mengantisipasi terulangnya pemberontakan Madiun 1948.

Berbagai pokok pembicaraan penting mengenai masa depan PKI pada akhirnya memberikan peluang kembali partai itu melakukan aktivitasnya. Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo pada tanggal 7 September 1949 mengeluarkan pernyataan yang sangat melegakan kaum komunis. Bahwa pelaku yang terlibat dalam pemberontakan Madiun tidak akan dituntut, kecuali bagi mereka yang bertindak kriminal. Kerjasama orang-orang komunis diperlukan dalam menghadapi bahaya-bahaya yang datang dari luar. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut, pemerintah dapat membenarkan adanya oposisi dalam kehidupan parlementer.³⁹ Keputusan itu diterima secara luas dalam kabinet pada tanggal 7 september 1949.⁴⁰

Meski pemerintah mengeluarkan keputusan yang kurang memuaskan, tetapi ada alasan tertentu bagi pemerintah. Soekarno mempunyai pertimbangan

³⁹ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III* (Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 6

⁴⁰ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 11

sendiri sehingga tidak menumpas anasir komunis. Bisa jadi karena berupaya memelihara persatuan dan keutuhan bangsa dalam menghadapi imperialisme Belanda. Hal ini juga menandakan konsistensi pemikiran Soekarno tentang “*Islamisme-Nasionalisme-Marxisme*” sebagai suatu konsepsi persatuan nasional. Tentang hal ini Arnold Brackman sebagaimana yang dikutip Subhan Sd, berpendapat:

1. Pemerintah dan rakyat mengetahui bahwa para pemimpin PKI banyak dimusnahkan. Maka pemerintah dan wakil rakyat mempunyai anggapan bahwa PKI tidak menjadi lawan politik yang berat.
2. Pemerintah mempunyai pandangan bahwa lebih mudah mengawasi gerak legal PKI ketimbang ilegal.
3. Semangat dan jiwa besar Presiden Amerika Abraham Lincoln yang tertanam pada sebagian besar pemimpin bangsa, menyebabkan mereka beranggapan bahwa berakhirnya perang, maka saling memaafkan antar saudara harus diutamakan untuk membangun kesatuan bangsa.
4. Sebagian pemimpin percaya bahwa kaum komunis akan menyadari kesalahan-kesalahan masa lalu dan akan memperbaikinya di masa depan.
5. Ada dorongan kuat untuk menunjukkan kedewasaan Indonesia ke dunia luar, terutama Belanda, bahwa Indonesia cukup matang untuk menghayati kehidupan demokrasi. Bila di negara barat saja partai komunis tidak dilarang, di Indonesia pun mendapat hak yang sama.
6. Ada pandangan dari sebagian pemimpin, antara lain Dr. Buntaran Martoadmojo bahwa bila PKI dibubarkan, berarti Indonesia telah memihak salah satu blok (timur) dalam era perang dingin yang baru berlangsung.
7. PNI menganggap PKI diperlukan untuk menjadi sekutu dalam menetralisasi modal asing (Belanda) yang beroperasi di Indonesia.⁴¹

Kebijakan pemerintah tersebut bisa jadi dianggap lunak karena tidak menghukum PKI yang berontak secara tegas seperti yang pernah dilakukan pada

⁴¹ *Ibid*, hlm. 12

masa pemerintah Hindia Belanda ketika PKI memberontak tahun 1926/1927. Tampak bahwa RI sebetulnya menunjukkan sikap toleran, baik kepada bangsa sendiri maupun pihak luar. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia siap memasuki gerbang kemerdekaan yang bebas mempraktikkan sistem demokrasi, dan mampu menggalang berbagai kekuatan politik. Sebagai negara baru hampir semua kekuatan yang ada masih sangat diperhitungkan dalam revolusi menghadapi kekuatan asing. Nasib PKI dan kaum komunis menjadi jelas ketika tanggal 4 Februari 1950 pemerintah menegaskan kembali bahwa PKI tidak dilarang dengan catatan apabila mau mematuhi hukum dan tata tertib negara.

Pemerintah berangsur-angsur memaafkan kesalahan PKI sehingga dalam proses politik seperti keputusan politik kenegaraan, pemerintah memandang PKI sebagai suatu kekuatan yang harus disertakan. Untuk membicarakan masalah pembentukan Kabinet Presiden Soekarno mengundang partai-partai. Pertemuan itu berlangsung dua hari dengan peserta yang berbeda. Pada hari pertama, Sabtu 19 Agustus 1950, Presiden mengundang Masyumi, PNI, Parindra, PSI, PNI-Merdeka, Blok Nasional, Parkindo, dan Partai Katholik Indonesia. Hari kedua, Senin 21 Agustus 1950 diundang PKI, PBI (Partai Buruh Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), BTI, Partai Murba, dan Partai Sosialis. Agenda pokok yang dibahas adalah tentang keikutsertaan partai-partai dalam Kabinet, calon-calon Perdana Menteri yang diajukan partai serta persyaratannya, serta program-program yang dilaksanakan.

Dalam pertemuan tersebut PKI mengutus Ngadiman Hardjo Subroto, Hutomo Supardan, Djaetun Dirdjowijoto, dan Achmad Sumadi. Kepada Presiden mereka mengemukakan pandangan tentang kabinet. Titik sentral ide mereka adalah kabinet harus bertanggung jawab penuh kepada parlemen, masalah program merupakan yang penting dicanangkan ketimbang masalah siapa orangnya. Usulan mereka selanjutnya adalah perlu adanya jaminan pelaksanaan hak-hak demokrasi, hak yang layak bagi buruh menyangkut pekerjaannya dan upahnya, masalah nasionalisasi perusahaan asing, serta diterapkannya Undang-undang Agraria Nasional. Dengan melenggangnya PKI di pentas nasional, eksistensi PKI semakin transparan.⁴²

Enam tahun setelah pemberontakan Madiun, PKI kembali menggenggam kekuatan di Indonesia. Orang luar heran dengan sikap pemerintah Indonesia yang memberikan toleransi kepada PKI untuk bangkit lagi. Jelas-jelas kalau PKI tersebut niatnya memberontak. Menurut Boyd Compton⁴³ alasannya rumit sekali, tapi yang perlu diperhatikan karena sikap nasionalis yang toleran telah menjadi syarat pokok bagi rekovery komunis, selanjutnya Compton menyatakan ada empat alasan:

⁴² *Ibid*, hlm. 13-14

⁴³ Boyd Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton* (Jakarta:PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1993), hlm. 171. Boyd R. Compton tinggal di Indonesia tahun 1952-1956. Pada tahun-tahun tersebut ia membuat surat-laporan kepada *International of Current Worl Affairs* (ICWA). ICWA sendiri adalah sebuah lembaga independen yang banyak memberikan sponsor kepada para sarjana Amerika yang berminat mempelajari negara-negara baru yang relatif belum dikenal di Amerika Serikat.

Alasan pertama bersifat praktis. Belanda melancarkan aksi polisional kedua mereka atas republik tak lama setelah pemberontakan Madiun. Banyak komunis yang selamat dari pertempuran Madiun diberi amnesti selama keadaan darurat itu. Ketika kemerdekaan penuh dicapai tahun 1949, tidak ada cara praktis untuk mengganjar para komunis yang telah beringsut dari Madiun untuk memerangi Belanda. Lagi pula sulit menarik garis antara komunis yang bertempur di Madiun dan mereka di daerah-daerah lain yang tak berontak.⁴⁴

Alasan kedua adalah perasaan umum bahwa kaum komunis Indonesia tidak berbeda dari kelompok-kelompok lain dalam hal tujuan, kesetiaan dan cara “revolusioner” telah dan masih merupakan sebuah kata sifat yang bermakna luhur. Semua kelompok politik yang konsekuen, ingin dipandang revolusioner, biarpun makna kata ini agak sulit diletakkan dalam situasi Indonesia saat itu. Semua kelompok besar politik berhaluan sosialis dalam program, jikapun bukan dalam kenyataan. Kelompok-kelompok lain pernah merencanakan satu atau lain jenis kudeta. Menteri Pendidikan Dan Juga Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri terlibat dalam urusan semacam itu. Usaha-usaha untuk mengubah komposisi atau kebijakan pemerintah dengan intrik ataupun kekerasan tidaklah lazim bagi pentas

⁴⁴ Misalnya di daerah Sumatera, khususnya di Sumatera Barat. Ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun, dalam pembicaraan antara pemimpin PKI Sumatera Barat Bachtaroesdin dengan Residen Sumatera Barat dan Panglima divisi IX menyatakan, bahwa PKI di Sumatera Barat tidak ikut campur tangan dengan apa yang terjadi di Jawa dan tetap berdiri dibelakang pemerintah. Begitu juga pemimpin-pemimpin PKI di Sumatera dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera telah menyatakan, bahwa PKI di Sumatera tidak melibatkan diri dalam pemberontakan Jawa dan tetap menyokong pemerintah. (selengkapnya lihat: Ahmad Husein Dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/ Riau 1945-1950 Jilid I*, (Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPISM), 1991), hlm. 674

Indonesia. Banyak yang pernah mencoba dan banyak yang mengampuni perbuatan tak lumrah mereka.

Alasan ketiga berkaitan dengan suatu mentalitas tertentu. Ditegaskan bahwa kaum komunis secara politik memang tak menyenangkan, tetapi mereka akan lebih berkembang jika bergerak di bawah tanah daripada secara terbuka. Dengan ditoleransi, mereka dapat diawasi dan jika perlu dikendalikan. Argumen ini menarik para optimis yang sangat yakin harfiah dengan teori demokrasi.

Alasan keempat dianut oleh para optimis jenis lain, yang yakin bahwa komunisme ortodoks dan materialistik tidak dapat meruyak dalam lingkungan bangsa Indonesia, dengan kombinasi uniknya yang berunsur Islam, Hindhu-Budha, Barat dan Budaya Asli. Asumsi inilah yang tampaknya melandasi filsafat sosial sinkretis Presiden Soekarno. Seiring dengan garis alasan ini adalah sikap PNI, yang agaknya memandang ekstremisme muslim jauh lebih berbahaya bagi Indonesia daripada komunisme.⁴⁵

⁴⁵ Boyd Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1993), hlm. 171-173

C. Keadaan Politik dan Ekonomi di Indonesia Pascapemberontakan PKI

Madiun 1948.

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi Indonesia belumlah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Karena hingga menjelang akhir tahun 1940-an, Indonesia masih menghadapi agresi militer Belanda pertama dan kedua. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia,⁴⁶ Kemudian selama dekade 1950-an Indonesia dilanda gejolak politik didalam negeri,⁴⁷ diantaranya beberapa pemberontakan di sejumlah wilayah seperti: Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung yang dipimpin Kapten Westerling, Pemberontakan Andi Azis di Makassar, Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin Dr. Soumokil dan J.A. Manusama, Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, DI Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah, DI Aceh Pimpinan TM. Daud Beureuh, gerakan separatisme seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) di Sumatera dan

⁴⁶ Republik Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaannya (pengakuan kedaulatan) pada tanggal 27 Desember 1949 dari Pemerintah Belanda sebagai hasil Konperensi Meja Bundar di Belanda (Den Hag) Pada tanggal 23 Agustus 1949.

⁴⁷ Herbert Feith menyatakan bahwa masa antara tahun 1945-1950 adalah masa mengarungi lautan yang tidak dikenal, meraba-raba mencari doktrin, kebijakan, serta metode-metode pemerintahan untuk mengisi kemerdekaan yang baru diperoleh. (Kata pengantar Herbert Feith dalam Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. Xli

Sulawesi.⁴⁸ Akibatnya selama pemerintahan Orde Lama, karena situasi politik di dalam negeri membuat keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk.

Pada masa demokrasi parlementer terjadi perubahan kabinet sebanyak 8 kali, yang diawali oleh Kabinet Hatta (Desember 1949-September 1950), dan setelah itu berturut-turut Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), Kabinet Ali I (Agustus 1953-Juli 1955), Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955-Maret 1956), Kabinet Ali II (April 1956-Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (Maret 1957-1959).⁴⁹

Jatuh banggunya kabinet itu pada dasarnya mencerminkan proses politik yang dimainkan oleh partai-partai itu sendiri. Pada era Demokrasi Parlementer, dua partai besar saling bersaing menguasai elite pemerintahan, yakni Masyumi dan PNI. Persaingan keduanya terlihat saling membagi dalam memimpin kabinet. Mohammad Natsir, Sukiman Wirjosandjojo, Burhanuddin Harrahap adalah tokoh-tokoh Masyumi. Sementara Wilopo dan Ali Sastroamidjojo merupakan pemimpin PNI. Persaingan kedua partai ini semakin terbuka menjadi konflik ideologis. Justus Van der Kroeft sebagaimana yang dikutip Subhan mengidentifikasi beberapa

⁴⁸ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V.. Edisi Pemutakhiran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 345. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini bisa dilihat dalam tulisan: Barbara Sillars Havey, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati* (Jakarta: PT Pustaka Grafiti, 1989), Audrey R Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan* (Jakarta: PT Pustaka Grafiti, 1990), Anthony J.S. Reid, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) dan sebagainya

⁴⁹ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 16-17

perbedaan keduanya, antara lain dalam masalah penentuan dasar ideologi negara, masalah organisasi militer, masalah pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, dan masalah struktur kepresidenan serta tentang kabinet dalam bidang politik dan ekonomi.⁵⁰

Pada tahun 1952 PNI semakin didekati PKI. Kedekatan kedua partai ini disebabkan adanya persamaan visi, dalam hal ini menyangkut masalah modal asing, kolonialisme dan masalah Irian Barat. Berbeda dengan langkah PNI, Masyumi mempunyai hubungan yang buruk dengan PKI karena memiliki lembaran sejarah yang kelam. Pemberontakan Madiun 1948 membuat Masyumi tertekan, sehingga ketika PKI aktif kembali tahun 1950-an gantian Masyumi yang menekan PKI, di samping itu juga bersamaan dengan pertentangan dengan partai-partai nasionalis, “sayap kiri” PNI, dan Partai Murba.⁵¹

Identitas nasional merupakan obsesi yang harus dicapai setelah proklamasi kemerdekaan. Berbagai ideologi berlomba untuk mencapai hal tersebut yang manifestasinya tampak dalam perjuangan partai-partai politik. Menurut Herbeith Feith ada lima aliran pemikiran politik atau ideologi yaitu: Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme-Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme. Persaingan yang menonjol terjadi antara ideologi Islam yang dipelopori Masyumi dengan nasionalisme yang dipelopori oleh PNI. Ideologi negara menjadi

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 18

⁵¹ Pengantar Herbeit Feith dalam Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. lv

perdebatan sehubungan dengan proses pencarian identitas nasional. Falsafah Pancasila seringkali menjadi tema sentral ajang diskusi. Partai bermotif agama lain seperti kelompok Kristen justru tidak memainkan peranannya. Bernhard Dahm sebagaimana yang dikutip Subhan menyatakan hal tersebut, bahwasanya tujuan partai Kristen bersifat terbatas yakni untuk memastikan berlakunya jaminan kebebasan beragama di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dari sisi ideologi, Dahm menyimpulkan, posisi partai Kristen terletak ditengah-tengah antara ideologi nasionalisme PNI dan Sosialisme PSI.⁵²

Pergulatan ideologi serta persaingan partai pada gilirannya melahirkan fenomena lain. Secara umum telah terjadi dikotomi kelompok dengan timbulnya kelompok “ideologis’ dan “pemerintah”. Partai-partai seperti PNI, PKI, Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) serta partai-partai yang cenderung pembangkang seperti Masyumi, PSII, dan NU bisa dikelompokkan dalam klasifikasi pertama, sedangkan kelompok kedua adalah PSI, PIR (Partai Indonesia Raya), dan partai-partai Kristen dan anggota-anggota Masyumi. Dikotomi tersebut memberi warna tersendiri. Kelompok ideologis sering kali menuduh kelompok pemerintah sebagai alat imperialism-kapitalisme, penyokong modal asing, dan mendukung sistem ekonomi bebas. Sebaliknya kelompok pemerintah menuding kelompok ideologis

⁵² Subhan Sd, *Langkah Merah.....*, hlm. 20

terlampau berkuat dengan teori-teori usangnya, bahkan ada yang memanfaatkan perbedaan kelas masyarakat untuk memecah belah.⁵³

Pada masa demokrasi Parleментар terus terjadi konflik politik dan ideologi yang berkepanjangan. Akibatnya umur rata-rata setiap Kabinet hanya bertahan setahun saja. Waktu yang sangat pendek ini disertai keributan internal pula di dalam kabinet, hal ini tentu tidak memberi kesempatan maupun waktu yang tenang bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi saat itu, apalagi menyusun suatu program pembangunan dan melaksanakannya.

Kebijakan ekonomi paling penting yang dilakukan Kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada bulan Maret 1950 yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia. Pada masa Kabinet Natsir untuk pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi, yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Pada masa Kabinet Sukiman, kebijakan-kebijakan penting yang diambil adalah antara lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan sistem kurs ganda. Pada masa Kabinet Wilopo, langkah-langkah kongkrit yang diambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu adalah untuk pertama kalinya

⁵³ *Ibid*, hlm. 21

memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), memperketat impor, melakukan “rasionalisasi” angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan jumlah personil, dan pengiritan pengeluaran pemerintah. Pada masa Kabinet Ali I, hanya dua langkah kongkrit yang dilakukan yaitu, pembatasan impor dan kebijakan uang ketat. Selama masa Kabinet Burhanuddin yang dilakukan adalah liberalisasi impor dan kebijakan uang ketat untuk menekan laju uang beredar, dan penyempurnaan Program Benteng,⁵⁴ mengeluarkan kebijakan yang membolehkan modal asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus kepada pengusaha-pengusaha pribumi, dan pembatalan (secara sepihak) persetujuan KMB sebagai usaha untuk menghilangkan sistem ekonomi kolonial atau menghapuskan dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam perekonomian Indonesia. Sedangkan pada masa Kabinet Ali II dan Djuanda tidak banyak yang bisa dilakukan dalam bidang ekonomi.⁵⁵

Walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahunnya hanya 1,9% atau nyaris mengalami stagflasi.⁵⁶ Selain laju pertumbuhan

⁵⁴ Program Benteng (PB) adalah bagian dari RUP yang diterapkan pertama kali pada masa Kabinet Natsir. BP adalah implementasi dari kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif-rasial (seperti yang juga dilakukan Malaysia) sebagai suatu upaya untuk menahan atau mengurangi dominasi ekonomi oleh pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa. Melalui BP ini, pemerintah berusaha untuk membentuk suatu kelas menengah nasional yang kuat dengan memberi berbagai fasilitas kemudahan termasuk membatasi alokasi impor hanya kepada pengusaha-pengusaha nasional.

⁵⁵ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pascakrisis* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2006), hlm. 30-31

⁵⁶ Stagflasi adalah stagnasi produksi atau kegiatan produksi terhenti dengan tingkat inflasi yang tinggi.

ekonomi yang menurun terus, defisit saldo neraca pembayaran dan defisit APBN terus membesar dari tahun ke tahun. Jumlah pendapatan pemerintah rata-rata per tahun selama periode 1950-an sekitar 151 juta rupiah, sedangkan besarnya pengeluaran pemerintah rata-rata per tahun sebesar 359 juta atau lebih dari 100% lebih besar dari rata-rata pendapatannya.⁵⁷

Selain itu kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun non fisik seperti pendanaan dari bank. Akibat rendahnya volume produksi dari sisi suplai, dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai 300%.⁵⁸

Selain manajemen moneter yang buruk, banyaknya rupiah yang dicetak disebabkan oleh kebutuhan pada saat itu untuk membiayai pembebasan Irian Barat melalui jalur diplomasi dan untuk membiayai penumpasan sejumlah pemberontakan di beberapa daerah di dalam negeri seperti pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung, Pemberontakan Andi Azis di Makassar, Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan sebagainya.

⁵⁷ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia.....*, hlm. 28

⁵⁸ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia.....*, hlm. 29

Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia pada masa tahun 1950-an disebabkan oleh hancurnya insfrastruktur ekonomi, fisik maupun non-fisik, selama pendudukan Jepang,⁵⁹ perang Dunia II, dan Perang Revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri di tambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang jelek selama rezim orde lama. Dari Belanda dan Jepang, Indonesia mewarisi tradisi-tradisi, asumsi-asumsi, dan struktur hukum sebuah negara polisi. Rakyat Indonesia kebanyakan buta huruf, miskin, terbiasa dengan kekuasaan yang otoriter dan paternalistik.

Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar. Diantaranya, menurut Ricklefs:

Perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak berat. Jumlah penduduk meningkat tajam. Jumlah penduduk pada tahun 1950 diperkirakan 77,2 juta jiwa, pada tahun 1955 berjumlah 85, 4 juta jiwa. Produksi pangan meningkat tapi tidak cukup. Di Jawa produksi beras per kapita sedikit menurun sejak tahun 1950. Sejumlah besar impor makanan masih diperlukan. Pertanian banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya meningkat terus. Tetapi dengan menurunnya jumlah lahan yang dimiliki, banyak keluarga petani tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk menafkahi hidup mereka dengan menjadi buruh upahan. Banyak dari mereka akhirnya berduyun-duyun ke kota-kota yang tumbuh secara cepat sekali. Antara tahun 1945-1955, jumlah penduduk Jakarta meningkat dua kali lipat menjadi 1,8 juta jiwa. Jumlah penduduk Surabaya dan Bandung

⁵⁹ Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, kegiatan produksi yang mendukung kekuatan perang Jepang di Asia Tenggara sangat tinggi hingga terjadi eksploitasi khususnya di sektor pertambangan (khususnya minyak bumi) dan sektor pertanian (terutama karet dan kayu). Sedangkan produksi barang-barang untuk kebutuhan konsumsi non-militer di dalam negeri terhenti karena semua bahan baku dan faktor produksi seperti kapital dan tenaga kerja yang ada dikerahkan ke industri-industri untuk keperluan militer Jepang. (Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia.....*, hlm. 29).

masing-masing sekitar 1 juta jiwa. Serta jumlah penduduk tiga kota lainnya adalah sekitar 0,5 juta jiwa (Semarang, Palembang dan Medan).⁶⁰ Banyak orang yang mencari pekerjaan, termasuk mereka yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan, para mantan pejuang gerilya, serta para mantan pejabat negara-negara federal dan Republik. Pemerintah dari tahun 1950-an memberi kedudukan kepada banyak dari mereka di dalam birokrasi, dan jumlahnya terus membengkak. Mereka menjadikan pekerjaan di pemerintahan sebagai salah satu rebutan utama dari kekuasaan politik. Pada tahun 1950, birokrasi bekas negara-negara federal (kira-kira 180.000 orang) dan birokrasi Republik (kira-kira 240.000 orang) dijadikan satu. Kemudian banyak mantan gerilya diberi pekerjaan kantor. Para pelajar, dan para politikus mengganjar para pendukung mereka. Di Indonesia secara keseluruhan terdapat sekitar 807.000 pegawai negeri tetap pada tahun 1960. Kira-kira satu orang pegawai mewakili setiap 118 orang penduduk. Gaji tergolong rendah dan sangat dipengaruhi inflasi. Ketidak efisienan, salah urus, dan korupsi kecil-kecilan menjadi biasa. Sehingga pemerintah semakin tidak mampu berbuat apa-apa. Kemerdekaan yang diraih ternyata tidak dapat menghasilkan kemakmuran umum seperti yang diharapkan banyak orang.⁶¹

PKI mempunyai pandangan mengenai keadaan ekonomi Indonesia pada masa tahun 1950-an. PKI berpendapat bahwa kedudukan Indonesia dilapangan ekonomi masih tetap seperti zaman kolonial yang berarti bahwa Indonesia dalam hubungan ekonomi dunia mempunyai kedudukan; tempat penanaman modal asing, produsen bahan mentah, pasar untuk menjual barang industri negeri-negeri kapitalis, dan sumber tenaga manusia yang murah sehingga.⁶²

Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonial. Sektor formal/modern seperti pertambangan, distribusi,

⁶⁰ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semsta, 2009), hlm. 494-495

⁶¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...*, hlm. 497-498

⁶² *Bintang Merah*, nomor 11-12. Tahun ke-XI- November/ Desember 1955, hlm. 389

transportasi, bank, dan pertanian komersil, yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal/ tradisional terhadap out put nasional di dominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor.⁶³

Melihat kondisi politik, ekonomi dan sosial pada masa demokrasi Parlementer, PKI semakin meningkatkan agitasi⁶⁴ dan tekanan-tekanan politik. Gawatnya keadaan ekonomi Indonesia karena inflasi dan kekurangan bahan pokok telah menyukarkan kehidupan di dalam masyarakat. Kesulitan ekonomi mengharuskan kaum komunis mencurahkan perhatiannya kepada bidang ekonomi mereka, dan ini menyebabkan mereka tidak mungkin bekerja bagi kesempurnaan partai.

Dalam membangun kekuatannya, kaum komunis tidak langsung menekankan agitasi/ propoaganda kepada rakyat untuk menerima teori-teori komunis. Akan tetapi mereka mengeksploitasi dan mengintensifkan kekurangsenangan atau ketidakpuasan akan keadaan sosial, politik, ekonomi, dengan memanipulasi dan mengorganisasi bermacam-macam golongan, untuk menciptakan suasana revolusioner yang akan menjamin bahwa pada serangan terakhir terhadap pemerintah yang ada, Partai Komunis akan muncul sebagai

⁶³ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia....*, hlm. 32

⁶⁴ MH. Lukman mendefinisikan agitasi sebagai perbuatan membangkitkan massa untuk aksi politik mengenai sesuatu ketidak-adilan sosial. Agitasi bukan diartikan menghasut. Sedangkan menurut Musso menjelaskan agitasi artinya “membangkitkan semangat orang banyak dan menarik mereka kepada pihak kita (PKI)”. (*Bintang Merah*, nomor 2. Tahun ke-VIII-September 1952, hlm. 57-58)

partai penguasa. Inilah yang disebut dengan *program minimum*.⁶⁵ Muncul pertanyaan, mengapa masyarakat Indonesia tertarik pada marxisme.⁶⁶ Secara teoritis Gabriel Almond sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Suhelmi mengatakan:

Pertama, kemiskinan (*poverty*) dan situasi-situasi dimana orang tidak mempunyai harapan hidup lebih baik (*hopeless*), jatuhnya status sosial akibat kesewenang-wenangan, kesenjangan pendapatan, kekayaan dan kesempatan, *kedua* disorganisasi sosial dengan hancurnya loyalitas dan hubungan-hubungan lama mengakibatkan munculnya perasaan terisolasi dan kerentanan sosial masyarakat. Dalam konteks sosial seperti itu komunisme memberikan kepuasan dan menjadi substitusi terhadap keadaan sosial yang porak poranda itu, *ketiga*, alasan-alasan psikologis seperti kondisi neuritik masyarakat dan terakhir, adanya pola-pola struktur dan institusional yang memfasilitasi perkembangan komunisme.⁶⁷

PKI selalu memanfaatkan setiap situasi yang ada dalam masyarakat. Terutama sekali apabila timbul rasa ketidakpuasan dan ketidaksenangan dalam masyarakat itu sendiri. Apabila situasi ini sudah tercipta, agitasi yang dilancarkan PKI akan lebih mudah mengena. Mulailah tahap berikutnya, yaitu sesuai dengan garis-garis komunis memanipulasi dan mengorganisasi golongan-golongan dalam masyarakat yang merasa tidak puas tersebut. Dengan demikian, pada tahap berikutnya akan terwujud suatu masyarakat komunis yang dicita-citakan yang merupakan program maksimum Partai Komunis Indonesia.

⁶⁵ Eddy Hardjanto, *Kemelut Ekonomi Serta Agitasi PKI*, Dalam Alex Dinuth: *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis* (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 146

⁶⁶ Marxisme merupakan ajaran atau ideologi resmi komunisme. Istilah marxisme sendiri adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx yang terutama oleh temannya Friedrich Engels dan Karl Kautsky. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu marxisme. Lihat Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

⁶⁷ Ahmad Suhelmi, *Islam dan Kiri: Respons Elite Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca-Soeharta*, (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2007), hlm. 3

BAB VI

KEBANGKITAN KEMBALI PARTAI KOMUNIS INDONESIA PASCA PEMBERONTAKAN MADIUN 1948

A. Tampilnya Alimin Sebagai Pemimpin Partai Komunis Indonesia

PKI bisa bernafas kembali pada pertengahan tahun 1949. Debat panjang dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akhirnya memutuskan memberikan hak hidup kepada PKI. Partai palu arit itu diminta turut mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia yang hendak diacak-acak Belanda lagi. Argumen yang berkembang di KNIP, di negara-negara barat partai komunis dibiarkan hidup, maka di Indonesia juga tidak boleh dibinasakan.¹ Pada tanggal 7 September 1949, Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo mengeluarkan surat keputusan yang isinya: pemerintah tidak akan menuntut PKI, asalkan PKI tidak terlibat tindakan kriminal.

PKI lalu memilih Alimin sebagai pemimpin sementara. Munculnya kepemimpinan Alimin terjadi pada bulan September 1949. Hal ini mengejutkan semua orang ketika itu, karena sebelumnya tersiar kabar bahwasanya ia telah mati tertembak ketika pemberontakan PKI di Madiun.² Ternyata berita ini tidak benar,

¹ Seri buku Tempo, Musso: *Si Merah di Simping Republik*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Tempo, 2011), hlm. 117

² Hal ini sudah lazim dilakukan oleh komunitas PKI, ketika partai dalam keadaan bahaya mereka berusaha mengelabui masyarakat, terutama lawan politik demi menyelamatkan partai dan tokoh-tokohnya.

karena setelah Muso dan Amir Sjarifoeddin tertangkap dan pemberontakan PKI di Madiun dinyatakan selesai.³

Tidak lama kemudian, tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda menyerbu daerah Republik. Belanda menggunakan kesempatan posisi yang lemah pada negara usai menumpas pemberontakan PKI Madiun untuk menyerang kembali. Tentara Republik terpaksa menghadapi serdadu-serdadu Belanda lebih dahulu. Ketika tentara Belanda menyerang kota Yogyakarta, tokoh-tokoh PKI yang dipenjara seperti Alimin, Tan Ling Djie, dan Ngadiman berhasil meloloskan diri dari penjara Wirogunan Yogyakarta.⁴ Alimin, Tan Ling Djie, Wikana, Sudisman, Aidit, Njoto dan Lukman hanya sebagian kecil dari pentolan partai yang selamat dari pemberontakan Madiun. Tokoh-tokoh PKI yang lolos inilah yang nantinya membangun kembali Partai Komunis Indonesia yang tercerai berai setelah pemberontakan di Madiun tahun 1948.

Sebuah pernyataan mengejutkan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo mengenai nasib PKI setelah pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Yakni, pemerintah tidak akan melarang PKI dan tidak akan menangkap tokoh-tokohnya, kecuali yang melanggar hukum. Kebijakan pemerintah tersebut kemudian disambut positif, terbukti diikuti banyaknya tokoh

³ Sebelas orang tokoh PKI di eksekusi, yakni Amir Sjarifoeddin, Maroeto Daroesman, Suripno, Oey Gee Hwat, Sardjono, Harjono, Sukarno, Djokosujono, Katamhadi, Ronomarsono dan D. Mangku. Sebelum mereka dieksekusi, Musso telah terlebih dahulu ditembak mati oleh tentara. Sedangkan yang lainnya di penjarakan.

⁴ Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia 1926-1948-1965* (Jakarta, 1988), hlm. 35

PKI yang muncul dari tempat persembunyiannya. Salah satunya adalah Alimin—tokoh tua PKI, yang muncul di Yogyakarta. Pada waktu itu kekosongan di kursi kepemimpinan partai karena tewasnya Muso membuatnya mampu mengisi jabatan itu. Apalagi ditambah dia memiliki sikap besar seorang pemimpin, praktis membuat namanya menonjol, ia pun dihormati oleh generasi muda komunis Indonesia. Hal ini memberikan Alimin peluang untuk memimpin PKI.⁵

Sejarah memang belum memberi lelaki yang lahir pada 1889 ruang besar bagi namanya untuk menjulang seperti Semaun, Darsono, Musso, dan Aidit. Padahal ia merupakan tokoh lama yang telah bergeliat sejak awal Partai Komunis Indonesia (PKI) terbentuk. Alimin Prawirodirdjo adalah tokoh kawakan/ tokoh tua di dalam Partai Komunis Indonesia dan orang yang sangat dihormati oleh kalangan muda PKI.⁶ Alimin diakui sebagai “*Great Old Man*”⁷ gerakan komunis Indonesia, sebagai orang yang kaya pengalaman, yang namanya sudah masuk dalam sejarah, dan sebagai tokoh penting yang sokongannya kepada generasi muda sangat dibutuhkan dan sangat dihargai, tidak salah jika diberi tempat

⁵ [Http://lilihprilianaripranowo.blogspot.com/2008/07/alimin-great-old-man.html](http://lilihprilianaripranowo.blogspot.com/2008/07/alimin-great-old-man.html). Diakses hari Rabu, 16 Juli 2010.

⁶ Jacques Lecrec, *Aidit dan Partai Tahun 1950*, Prisma, 7 Juli 1982, hlm. 65. Alimin adalah tokoh komunis yang satu-satunya dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata.

⁷ Sejarah hidup Alimin menarik. Ia dilahirkan di Surakarta, 1889 dari keluarga sangat miskin. Dr. G.A Hazeu, ketika itu penasehat pemerintah kolonial Belanda mengangkatnya sebagai anak asuh. Hazeu menyekolahkan Alimin sehingga ia menjadi orang terpelajar. Alimin tertarik dengan dunia jurnalisme dan politik, maka ia pun lalu bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi murid Tjokroaminoto. Di organisasi massa Islam ini Alimin muncul sebagai tokoh radikal yang disegani. Karakternya sebagai muslim berubah setelah ia (melalui Sneevliet) berkenalan Marxisme komunisme. Ia menjadi seorang ‘kiri’ radikal yang pada tahun 1928 memimpin ISDV yang didirikan Sneevliet dan menjadi salah satu tokoh PKI, Alimin juga pernah dipenjarakan karena aktivitas-aktivitas politiknya. Lihat Ahmad Suhelmi, *Islam dan Kiri: Respons Elite Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca-Soeharto* (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2007), hlm. 18

kehormatan didalam daftar pimpinan. Alimin dikenal sebagai sosok pejuang rakyat yang aktif dan konsisten sejak masa pergerakan nasional, Ia mempunyai banyak pengalaman berjuang menghadapi Belanda. Ia juga banyak memberi dukungan kepada generasi muda dalam melanjutkan perjuangan. Sikap inilah yang membuat ia makin menonjol dan dihormati dikalangan kaum muda komunis.⁸ Sehingga ia dipercaya untuk memimpin Partai Komunis Indonesia setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun 1948. Dengan kehadirannya, maka tampuk kepemimpinan partai dia kendalikan.

⁸ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 25

B. Usaha dan Strategi Alimin Membangun Partai Komunis Indonesia

Setelah pemberontakan PKI di Madiun 1948, kenyataan yang terjadi adalah struktur organisasi partai hancur, citra partai dimata masyarakat menjadi buruk, aktivis partai banyak yang mati terbunuh dan dipenjarakan, serta orang-orang yang selama ini menghidupi partai tidak jelas lagi keberadaanya,⁹ yang jelas pemberontakan PKI Madiun 1948 itu telah melumpuhkan PKI. Partai yang sempat melancarkan perlawanan pada era kolonial ini harus menemui kenyataan diperangi oleh saudara sebangsanya sendiri saat negeri telah merdeka. Sebagian pengikut PKI kocar-kacir menyelamatkan diri. Tidak mudah membangun kembali partai dalam kondisi traumatik dan serbasulit. Melihat kenyataan seperti itu maka Alimin berusaha menyatukan kembali sisa-sisa kekuatan komunis yang tercerai berai.

Alam demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada kurun waktu 1950-an memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengadakan rehabilitasi walaupun sebelumnya Partai Komunis telah melakukan pemberontakan. Tokoh-tokoh komunis muncul kembali memimpin partai secara illegal. Selama Aksi Militer Belanda II sampai saat pengakuan kedaulatan, PKI dipimpin oleh *Central Komite Sementara*.

Untuk menampung kader-kader partai yang belum berani memasuki PKI maka Alimin menghidupkan kembali Partai Sosialis dan Partai Buruh. Partai

⁹ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 25

Sosialis ini dipimpin oleh Tan Ling Djie, sedangkan Partai Buruh dipimpin oleh Asmu Sakirman, sementara itu PKI resmi/legal membuka kantornya di Yogyakarta yang dipimpin oleh Djaetun sebagai Sekretaris Djenderal, sedangkan PKI ilegal yang mengendalikan kegiatan-kegiatan terbuka dipimpin oleh Tan Ling Djie dan Ngadiman.¹⁰

Alimin mengaktifkan kembali PKI pada tanggal 4 Februari 1950.¹¹ Aktifitas selanjutnya yang dilakukan Alimin adalah membentuk susunan *Sekretariat Central Komite Sementara* pada tanggal 10 Juni 1950, yang terdiri dari Sudisman (mantan Sekretaris Jendral Pesindo), Djaetun (mantan Digulis), dan Ngadiman Hardjosubroto (dulu mengurus Fraksi Komunis di KNIP). Meskipun telah ada susunan *Sekretariat Central Komite*, akan tetapi belum ada kegiatan partai pada masa awal ini, khususnya untuk memperluas keanggotaannya, yang ada hanya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat parlementer yang dimotori oleh Tan Ling Djie selaku pemimpin semacam Sekretariat Bersama golongan Marxis.¹²

Upaya yang dilakukan Alimin selanjutnya adalah menghapus citra partai yang sudah buruk di mata masyarakat. Diantara usaha untuk merehabilitasi nama PKI adalah tuntutan agar dilakukan penggalian dan penguburan kembali tokoh-

¹⁰ Soetopo Soetanto. PKI dan Gerakan Komunis Internasional. Dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis: Kumpulan tulisan terpilih tentang gerakan komunis dan bahaya ekstrim lainnya di Indonesia* (Jakarta: Penerbit: Intermasa, 1997), hlm. 187.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* (Jakarta, 1994), hlm. 23

¹² Jacques Lecrec, *Audit dan Partai Tahun 1950*, (Prisma, 7 Juli 1982), hlm. 63

tokoh PKI yang dihukum mati akibat pemberontakan PKI-Madiun. Namun usaha ini ditolak pemerintah RI waktu itu.¹³

Selanjutnya adalah untuk mengembalikan kekuatan partai, Alimin dan sebahagian tokoh-tokoh PKI yang selamat dari penumpasan pemberontakan Madiun menganggap strategi yang diterapkan Musso sungguh sangat keliru. Musso terlalu yakin dengan kekuatan massa, padahal kondisi PKI tidak didukung oleh faktor tersebut. Masyarakat yang tercerai berai dan terkotak-kotak ketika itu tidak bisa dipahami oleh Musso. Karena itu, Alimin tidak mau mengulangi kekeliruan tersebut. Berpedoman pada kasus-kasus yang menimpa partai, Alimin menerapkan strategi yang berbeda dengan Musso. Alimin tidak terpaku pada faktor massa.¹⁴

Alimin menghendaki PKI sebagai partai kader. Tentu saja diterapkan kebijakan yang lebih ketat dan selektif untuk memperoleh kader yang cakap dan berkualitas. Alimin menghimpun kembali para anggota dari awal dan mengkaderinya dengan selektif. Intinya adalah kelompok kecil yang militan atau biar sedikit yang penting berkualitas.

Menggunakan strategi seperti yang diterapkan Sneevliet untuk menginfiltrasi Sarekat Islam, Alimin menerapkan metode yang sama. Alimin juga menerapkan taktik infiltrasi. Para kader partai diperintahkannya untuk masuk ke

¹³ Sekretariat Negara, *Gerakan 30 September.....*, hlm. 23

¹⁴ Subhan Sd, *Langkah Merah.....*, hlm. 37

dalam organisasi kepemudaan, buruh, petani, wanita dan lain sebagainya. Seperti yang diperintahkan kepada Tan Ling Djie agar membangun kembali Partai Sosialis. Namun upaya untuk membangun kembali Partai Sosialis ini ditentang keras oleh kalangan golongan muda yang dimotori oleh Aidit.¹⁵ Ada perbedaan visi antara kelompok tua yang diawaki Alimin dengan kelompok muda yang dimotori DN. Aidit. Perbedaan ini semakin menguat dengan munculnya friksi di kedua kubu, yang menjelma menjadi perebutan pengaruh.¹⁶ Aidit secara terang-terangan mengecam strategi Alimin tersebut. Menurut Aidit strategi itu hanya pantas diterapkan di negara-negara Barat yang memiliki kelas proletar. Tetapi di Indonesia strategi itu sangat sulit karena struktur masyarakatnya tidak mengenal sistem kelas seperti itu.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27

¹⁶ [Http://lilihprilianaripranowo.blogspot.com/2008/07/alimin-great-old-man.html](http://lilihprilianaripranowo.blogspot.com/2008/07/alimin-great-old-man.html). Diakses hari Rabu, 16 Juli 2010.

C. Beralihnya Kepemimpinan Partai Komunis Indonesia dari Alimin ke Aidit.

Pada masa kepemimpinan Alimin, terjadi perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai strategi-strategi serta cara-cara ketika menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi partai. Misalkan ketika Njono memimpin Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) melakukan aksi mogok justru Alimin menentangnya. Sementara Tan Ling Djie lebih percaya melakukan cara-cara resmi lewat jalur parlemen. Cara-cara yang dilakukan Alimin dan Tan Ling Djie mendapat tentangan dari kelompok PKI lainnya. Perbedaan kedua golongan itu pada akhirnya berubah menjadi perebutan pengaruh. Keputusan-keputusan politik golongan tua dirasakan sangat lamban mengantisipasi persoalan. Taktiknya pun dianggap oleh golongan muda sudah tidak laku lagi karena bisa mengakibatkan PKI tidak populer di mata masyarakat.

17

Dalam Sidang Pleno CC PKI pada tahun 1951, golongan pemuda Aidit (27 tahun) dengan dibantu oleh MH. Lukman (30 tahun), Njoto (25 tahun) dan Sudisman (30 tahun) berhasil menyingkirkan pimpinan terdahulu yang didominasi oleh kelompok tua (Alimin dan Tan Ling Djie). Sebagai kelompok muda yang berambisi besar, maka Aidit dan kawan-kawanya mencoba membenahi PKI yang telah porak poranda akibat pemberontakan PKI Madiun 1948. Pergantian

¹⁷ Subhan Sd, *Langkah Merah.....*, hlm. 28

pimpinan ini tidak melalui pemilihan sebagaimana biasanya berlaku dalam organisasi, dan juga bukan kudeta dalam arti pergantian melalui kekerasan.¹⁸

Beralihnya kepemimpinan dari yang tua kepada yang muda pun dibumbui kabar tak sedap. Ada kabar bahwa, Aidit cs banyak disebut-sebut sebagian kalangan melakukan kup terhadap kepemimpinan partai tanpa menghiraukan kepemimpinan golongan tua. “Aidit dianggap kup terhadap kepemimpinan CC PKI yang lama”.¹⁹ Seperti yang dikatakan Rex Mortimer Sebagai berikut:

“Dua tahun setelah insiden Madiun PKI memang sanggup bangkit lagi dalam beberapa bulan, namun tanpa taring kepemimpinan yang kuat dan kepastian langkah partai ke depan, ia hanya sanggup bermain bertahan sekadarnya untuk menjaga 10.000 anggotanya agar tidak lari. Tidak sabar dengan kurangnya upaya dan ciutnya nyali untuk unjuk gigi, dan yang lebih penting lagi, kritik-kritik dan keluhan pedas para anggota atas kegagalan pemimpin partai dan ketidakpuasan kaum muda radikal atas buah kemerdekaan yang bisa diperoleh partai, Aidit dan kelompoknya memimpin pemberontakan internal, dan berhasil, sehingga sejak Januari 1951 para tua-tua lama penjaga partai praktis tersingkir dan keempatnya mulai mengukuhkan diri sebagai pengganti mereka”.²⁰

Pendapat bahwa Aidit cs. melakukan kup terhadap Alimin dibantah oleh sejarawan Hilmar Farid. Menurutnya sejak peristiwa Madiun praktis kepemimpinan PKI sebenarnya kosong. Oleh karena itu agak sulit untuk mengatakan kalau Aidit, Njoto MH Lukman dan Sudisman melakukan kup. Mereka sulit untuk dibilang kup karena pimpinan memang tidak ada. Mereka

¹⁸ Zulfikar Gazali dalam Alex Dinuth. Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional Dan Bahaya Laten Komunis* (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1997), hlm. 162

¹⁹ *bonietriyana.majalah historia.com*. Diakses hari Jum’at, tanggal 2-7-2010

²⁰ Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35

sendiri sudah jadi anggota *Comite Central* (CC) sejak 1 September 1948. Jadi yang tepat mungkin bukan kup tapi ambil alih karena pimpinan kosong dan bukan didongkel. Juga tidak ada serah terima karena tak ada yang menyerahkan.” Bagi kalangan muda cara penyingkiran pejuang kawakan Alimin secara resmi disebabkan karena masalah kesehatan.²¹

Ada dua hal penting dalam mengerti jalannya pergantian pimpinan dalam tubuh partai komunis. *Pertama*, gaya otoriter yang dihasilkan oleh pola sentralistis. Ini berarti segala kegiatan dipusatkan pada tubuh pimpinan partai yang memberikan kekuasaan tidak terbatas pada sekelompok orang yang menjadi pimpinan. *Kedua*, adanya sentralisme demokrasi. Sentralisme demokrasi berarti adanya suatu lingkaran spiral yang dimulai dari kalangan elit pimpinan di bawah politbiro/presidium ke tingkat anggota yang paling bawah. Dewan pimpinan partai dibentuk dengan pemilihan. Namun demikian keputusan dewan pimpinan partai tidak boleh dikritik atau diubah oleh badan-badan yang lebih rendah. Sentralisme ini berkaitan dengan hal pengambilan keputusan yang membawa akibat tidak terdapatnya sanggahan terhadap kebijaksanaan yang dijalankan oleh pimpinan

²¹ Keputusan CC, “*Bintang Merah*” 9/10, 1953, halaman 414. Oleh kongres 1954, Alimin tidak dipilih menjadi anggota CC lagi. Pada tanggal 8 Agustus 1956, Alimin mengeluarkan pernyataan bahwa karena kesehatannya yang semakin memburuk, maka Alimin mengambil keputusan mengundurkan diri dari PKI baik dalam lapangan politik maupun organisasi, menurutnya kesehatan lebih berharga dari apapun juga. Meskipun tidak lagi menjadi anggota PKI tetapi ia tetap setia dan konsekuen mempertahankan ideologi komunis. (*Bintang Merah*, Tahun ke-XXI-Januari 1956, halaman 330).

partai.²² Pimpinan organisasi yang paling rendah hanya punya hak membahas pelaksanaan teknis untuk masalah-masalah lokal atau regional atas prakarsa sendiri.²³

Sampai munculnya Aidit sebagai pimpinan PKI, yang dimulai dengan kegagalan perebutan kekuasaan kedua kalinya, partai ini belum pernah memainkan peranan yang sepenting sewaktu PKI dipimpin oleh Aidit, baik ditingkat daerah maupun di tingkat nasional.

D. Kepemimpinan DN. Aidit, Lukman, Njoto dan Sudisman.

Achmad Aidit adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya (Abdullah Aidit dan Mailan). Riwayat hidup Aidit memperlihatkan bahwa ia seorang yang berasal dari keluarga pekerja, ayahnya adalah seorang mantri kehutanan, pegawai *boschwezen* atau pegawai menengah jawatan kehutanan zaman Belanda, dan pernah duduk di DPR-RIS dan DPRS RI mewakili daerah Belitung sampai ia mengundurkan diri pada 16 Juni 1954.²⁴

D.N. (Dipa Nusantara²⁵) Aidit lahir di Kampung Pagalarang, Tanjungpandan, Kepulauan Belitung.²⁶ Sekitar dua kilometer dari rumahnya

²² Zulfikar Gazali, dalam Alex Dinuth. Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis* (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 162. Untuk lebih jelasnya lihat: "Apa Partai Komunis Itu". Disusun oleh Depagitprop (Departemen Agitasi dan Propaganda) CC PKI, 1958.

²³ Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965* (Yogyakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa dan Centre Indonesian Communities Studies (CICS), 2001), hlm. 71

²⁴ Jacques Lecrec, *Aidit dan Partai Tahun 1950-an*, (Prisma, 7 Juli 1982), hlm. 66

²⁵ Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara. Alasannya untuk menghormati tokoh pejuang idola pahlawan Diponegoro dan agar memberi inspirasi bagi Aidit dalam usahanya

terdapat sebuah perusahaan tambang timah milik Belanda. Sewaktu Aidit masih remaja, disamping suka bergaul dengan teman-teman sebayanya, ia juga suka bergaul dengan para buruh di *Gemeenschappelijke Minjbouw Maatschappij Billiton*. Terdapat perbedaan yang sangat kontras kehidupan para buruh tambang timah dengan para tuan-tuan dan none-none Belanda. Aidit melihat buruh berlumur lumpur, bermandi keringat, dan hidup susah sedangkan tuan dan none Belanda bisa hura-hura dan berpesta pora di dalam gedung khusus *societet* menonton film terbaru sambil menenggak minuman keras. Sedangkan buruh cuma bisa menelan ludah sambil sesekali mengintip bioskop. Dari sini Aidit tertarik untuk mendalami hidup para buruh. Menurut Murad pergaulan Aidit dengan kaum buruh itu yang menentukan jalan pikiran dan sikap politik Achmad ketika sampai di Jakarta.²⁷

Tanggal 30 Juli 1923, Ia pernah sekolah HIS (*Hollands Inlandsche School*) di Tanjungpandan dan antara tahun 1936-1938 ia melanjutkan Sekolah Dagang Menengah di Jakarta. Rencananya Aidit ingin sekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), akan tetapi ketika ia tiba di Jakarta

membebaskan Nusantara. Cara mengubah nama atau memilih gelar mengandung arti politik sudah biasa dikalangan pemuda nasionalis (misalnya A.M. Hanafi diberi gelar Anak Marhen). Menurut Soegiarso, sebenarnya bukan Dipa Nusantara tetapi Djafar Nawawi. Soegiarso tidak memberikan penjelasan asal muasal kata Djafar Nawawi. Dalam Aidit, *Dua Wajah Dipa Nusantara* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan majalah Tempo, 2010), hlm. 24. DN atau “Djafar Nawawi” karena ia sering disebut-sebut berdarah Minangkabau. Lihat: Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* (Jakarta: Penerbit antar kota, 1989), hlm. 88

²⁶ Mengenai tempat lahir, ada yang mengatakan bahwa Aidit lahir di Medan. Misalnya menurut Koran-koran PKI seperti *Review of Indonesia*, 1 September 1963, halaman 11. Sebagaimana yang di kutip oleh Jacques Lecrec. Dalam *Prisma*, 7 Juli 1982, halaman 65. Hal ini tidak benar dan di luruskan oleh Sobron Aidit adik kandung Aidit. Lebih lengkapnya lihat: Sobron Aidit: *Aidit: Abang, Sahabat Dan Guru di Masa Pergolakan* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2003).

²⁷ Aidit, *Dua Wajah Dipa Nusantara* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan majalah Tempo, 2011), hlm. 9-17

pendaftaran MULO sudah ditutup. Sehingga ia harus puas bersekolah di Middestand Handel School (MHS), sebuah sekolah dagang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.²⁸

Untuk biaya makan dan sekolah ia bekerja sebagai tukang jahit *part timer* dan juga berjualan buku dan majalah²⁹ sambil melanjutkan sekolahnya karena orang tuanya tidak sanggup membiayai. Aidit dapat memperoleh kemajuan antara lain berkat keaktifannya berorganisasi. Pada tahun 1939, untuk pertama kalinya Aidit berorganisasi dalam Persatuan Timur Muda (Pertimu) yaitu satu organisasi mahasiswa dan pemuda, bukan komunis tapi banyak orang komunis di dalamnya.³⁰ Ia tertarik untuk masuk ke organisasi tersebut karena tidak rasialis karena anggota-anggotanya terdiri dari orang Cina, Arab, dan berbagai suku minoritas lainnya.

Ketika di Jakarta, ia berkesempatan berhubungan dengan organisasi pergerakan pemuda seperti *Barisan Pemuda Gerindo* yang dipimpin Wikana, Ismail Widjaja, A.M. Hanafi, Amir Sjarifuddin dan lain-lain. Ia tertarik dengan pandangan-pandangan kaum Kiri. Selama penjajahan Jepang, Aidit mulai mengenal ide-ide sayap kiri, ia terus berkembang di bawah binaan Muhammad

²⁸ *Ibid*, hlm. 22

²⁹ Pekerjaan ini memberi kesempatan bagi Aidit untuk membaca buku. Karena kegemarannya membaca, ia sangat tertarik dengan buku-buku klasik tentang politik dan ekonomi serta mempelajari buku yang sifatnya komunis dan sosialis serta kiri. Seperti *Das Kapital* karya Karl Marx [1818-1883], Friederich Engels [1820-95], Vladimir Ilich Lenin [1817-1924], buku karya George Wilhelm Friederich Hegel [1771-1831], Nietzsche [1844-1900], Mao Zedong dan pemimpin Tiongkok lainnya.

³⁰ Arbi Sanit, *Badai Revolusi*...., hlm. 64

Jusuf, seorang pemimpin PKI di awal kemerdekaan. Dari Muhammad Jusuf ia meminjam buku salinan *Marx Das Kapital* berbahasa Belanda. Ia kemudian bergabung dengan PKI ilegal tahun 1943³¹ serta bergabung dengan *Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia* yang diketuai oleh Chaerul Saleh.³²

Pada masa penjajahan Jepang, organisasi-organisasi pemuda banyak yang ditutup. Gerindo merupakan organisasi di bawah pengaruh komunis. Organisasi ini berorientasi anti fasis dan berbasis kesatuan. Pada masa Jepang Gerindo diburu dan dihancurkan. Dikarenakan Gerindo berusaha bekerjasama dengan Belanda dan mempersiapkan rakyat untuk melawan Jepang. Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh mendirikan asrama-asrama pendidikan politik di mana tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Yamin, Hatta dan Amir Sjarifuddin sering memberikan ceramah dan kuliah. Di sinilah Aidit bisa berjumpa dengan tokoh nasional serta Muhammad Hatta (MH) Lukman³³ teman dekat Aidit kemudian.

Lukman adalah sahabat akrab Aidit. Usianya tiga tahun lebih tua dari Aidit. Ayahnya seorang kiai di Jawa Tengah dan termasuk anggota Sarekat

³¹ Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno: Ideologi dan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 26

³² Jacques Lecrec, *Aidit dan Partai.....*, hlm. 66

³³ Pada tahun 1929 Haji Muchlas (Ayah Lukman) dan keluarganya, termasuk Lukman kecil bersama adiknya ikut dibuang ke kamp tahanan Boven Digul, Papua Barat. Lukman, yang saat itu baru berusia 9 tahun, ikut dalam pembuangan tersebut. Dia tumbuh dewasa di antara tahanan politik. Saat di Boven Digul ayah Lukman dekat dengan Bung Hatta. Lukman pun diangkat anak oleh Bung Hatta. Karena persahabatan ayah Lukman dengan Bung Hatta yang begitu mendalam, Haji Muklas lalu memberikan nama M.H. di depan nama Lukman. M.H. artinya Muhammad Hatta Lukman (http://id.wikipedia.org/wiki/M.H._Lukman). Diakses hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2010.

Rakyat, organisasi sempalan Sarekat Islam yang berorientasi komunis. Karena terlibat pemberontakan komunis tahun 1926, Ayahnya beserta Lukman sendiri tahun 1929 dibuang ke Boven Digul. Tahun 1938, Lukman diizinkan pulang ke rumah ayahnya di Tegal. Ia sempat bekerja sebagai kondektur bus sampai Jepang mulai masuk ke tanah air. Karena keadaan ekonomi yang menekannya dan semangat revolusi yang ia miliki dari ayahnya, iapun merantau ke Jakarta, kemudian bergabung dengan PKI ilegal, diwaktu bersamaan dengan masuknya Aidit ke dalam organisasi tersebut.³⁴

“Aidit mengaku kalau Sukarnolah yang memberinya pelatihan pertama Marxisme di tempat ini”³⁵. Aidit, MH Lukman, dan Wikana kemudian mempunyai kontak dengan Widarta, penanggung jawab PKI bawah tanah di Jakarta. Kemudian mereka menyusun perkumpulan rahasia *Gerindom* (Gerakan Indonesia Merdeka).³⁶

Aidit kemudian dicap Jepang sebagi orang yang berpotensi bisa membuat masalah sehingga harus diawasi dan ditundukkan. Kemudian Aidit ikut bergabung dengan Barisan Pelopor, perpanjangan Jawa Hokokai, Organisasi bentukan Jepang. Ia mendapat instruksi yang ketat, kuliah-kuliah patriotic, dan pengalaman-pengalaman memobilisasi massa. Aidit mendapatkan

³⁴ Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno: Ideologi dan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 32

³⁵ Dikutip oleh Rex Mortimer dari Hasil wawancara dengan Aidit tahun 1965 pada *Harian Rakyat*, 13 Maret 1965. Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno: Ideologi dan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 27

³⁶ *Ibid.*

pengalaman khusus yang luar biasa selama pendudukan Jepang. Rex Mortimer menyimpulkan sebagai berikut:

“ Aidit sejak tahun 1943 melekat kepada Marxisme dan PKI illegal, melakukan kontak dengan konsentrasi tinggi ke sejumlah metode propaganda dan budaya Jepang, mengikuti aktivisme politis bergaya bushidoisme Jepang, menjalin hubungan erat dengan para pemimpin “pemuda” paling radikal dan bersemangat, mendapat pelajaran nasionalisme dari ideology paling bergengsi seperti Soekarno dan Yamin...dan punya hubungan dekat dengan Soekarno.”³⁷

Saat Jepang menghadapi masa keruntuhan, Aidit bersama kelompok pemuda lainnya terlibat dalam peristiwa penculikan Soekarno Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun ketika terjadi perdebatan antara Soekarno-Hatta dengan pemuda tentang proklamasi kemerdekaan, Aidit dan Lukman tidak ikut serta karena mereka bertugas menjaga markas Pemuda.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 Aidit dan Lukman ambil bagian membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Tujuan organisasi ini melucuti senjata dan mengambil alih sarana-prasarana tentara Jepang.³⁸

Pada tanggal 19 September 1945 Aidit, MH Lukman ditangkap³⁹ dan dikebloskan ke penjara Bukit Duri oleh tentara militer Jepang karena secara

³⁷ Rex Mortimer, *Indonesian Communism...*, hlm. 28

³⁸ Rex Mortimer, *Indonesian Communism ...*, hlm. 29

³⁹ Ribuan rakyat Jakarta yang dipelopori oleh pemuda mengadakan aksi-aksi untuk menentang balatentara Jepang. Kempetai Jepang beraksi pula melakukan penangkapan-penangkapan. Para pemuda yang nekad ini berkumpul di Menteng 31 diantaranya termasuk Aidit dan MH Lukman. Mereka menghadiri rapat besar di Lapangan Ikada, Gambir, yang dihadiri lebih dari 200.00 orang.

aktif mereka menghimpun pemuda-pemudi dan melakukan demonstrasi. Aidit berhasil meloloskan diri ketika Inggris mendarat, tetapi pada akhir Nopember 1945, ia ditangkap lagi oleh tentara Inggris dan ditawan di penjara Glodok. Kemudian diserahkan kepada Belanda dan oleh Belanda ditawan di pulau Onrust, di gususan Kepulauan Seribu, utara Jakarta selama tujuh bulan.⁴⁰

Aidit bebas setelah kesepakatan *Huge Voluwe* di Belanda pada 24 April 1946. Ketika itu ibukota negara sudah pindah ke Yogyakarta. Sesudah bebas dari tahanan Aidit dan MH Lukman pergi ke Solo ke kantor pusat PKI yang diketuai oleh Sardjono tokoh PKI yang baru kembali dari Digul dan pada bulan April 1946 menjadi ketua Partai. Di sana mereka juga bertemu dengan Alimin yang baru datang dari Uni Sovyet pada bulan Juli 1946, di mana tugas ketua partai selanjutnya lebih banyak dipegang oleh Alimin.⁴¹ Di sinilah Aidit, MH Lukman dan Njoto berguru kepada orang-orang yang berpengalaman, bekerjasama dengan tokoh-tokoh tua dan menjadi fungsionaris partai. Sejak itu Aidit, Njoto dan Lukman menjadi akrab.

Njoto, lahir di Jawa Timur pada tahun 1925. Usianya dua tahun lebih muda dari Aidit. Ayahnya seorang pekerja profesional PKI di Solo sejak tahun 1920-an, yang kemudian pada tahun 1925 lari ke Besuki untuk berdagang. Sejak usia 14 tahun Njoto sudah masuk ke dalam PKI. Selama pendudukan

Polisi militer Jepang (Kempetai) segera menangkap pemimpin pemuda (Aidit dan MH Lukman). Lihat selengkapnya: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia 1926-1948-1965* (Jakarta, 1988), hal 38. Lihat juga: Ibrarruri Putri Alam, *Roman Biografis Anak Sulung DN. Aidit*, (Jakarta: Hastra Mitra, 2006), hlm. 5

⁴⁰ *Bintang Merah*, September/Oktobre 1953, hlm. 480

⁴¹ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 8

Jepang ia ambil bagian aktivitas bawah tanah. Ketika Jepang kalah perang, ia bergabung dengan API Jawa Timur melucuti senjata Jepang. Pada tahun 1945, ia pun ikut dalam pertempuran Surabaya. Pada bulan Nopember 1945, ia membentuk PKI wilayah Besuki, dari sini karirnya menanjak sampai ke tingkat propinsi, kemudian menjadi utusan untuk ke Jakarta dan menjadi Pemimpin nasional PKI. Njoto dan Aidit adalah pemimpin Front Demokrasi Rakyat.⁴²

Sudisman, lahir di Surabaya tahun 1920. Ia dibesarkan sejak kecil hingga sekolah tingkat SMP di Surabaya. Ketika lulus sekolah, ia aktif di Gerindo, setelah itu menjadi anggota PKI ilegal semasa pendudukan Jepang. Bulan September 1942 ia ditangkap Jepang karena terlibat ikut gerakan mahasiswa anti Jepang. Setelah keluar dari penjara, tahun 1945 ia terlibat dalam pertempuran Surabaya kemudian bergabung dengan PNI di Jawa Timur. Ia pindah ke Yogyakarta karena dipercaya menjadi Sekretaris Umum untuk Kongres Pemuda 1945. Kemudian, ia dipercaya sebagai Sekjen Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dan pemimpin sayap kiri pertama, ia kemudian masuk ke dalam Front Demokrasi Rakyat di bawah kepemimpinan Aidit dan Njoto.⁴³

Pada bulan Januari 1947 berlangsung kongres PKI di Solo yang merupakan usaha pertama PKI untuk mencapai stabilisasi partai. Karena selama ini diantara grup-grup komunis saling bertentangan dalam hal konsepsi organisasi, garis dan pimpinannya masing-masing. Aidit, berkat bimbingan

⁴² Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno...*, hlm. 32

⁴³ Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno...*, hlm. 33

Alimin dapat diangkat menjadi anggota Central Komite untuk bagian pendidikan/penerangan (Agit-Prop), dibantu oleh MH Lukman.⁴⁴

Pada bulan Maret 1947 Aidit dipilih menjadi ketua fraksi PKI di dalam sidang KNIP di Malang. Jabatan parlementer ini telah melibatkannya dalam sekretariat sayap kiri di bawah pimpinan politik Sekretaris Partai Sayap Kiri, Sekjend Partai Sosialis Tan Ling Djie. Menurut Jacques Lecrec, Aidit waktu itu memiliki gagasan untuk menjadikan Sayap Kiri sebagai suatu partai. Seperti yang dikatakan Aidit pada saat memperkenalkan program kerja Sayap Kiri tanggal 18 April 1947:

“ Sayap Kiri adalah sistem bekerja bersama antara PKI, Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis dan Pemuda Sosialis Indonesia, serta organisasi-organisasi lain yang menyokong Sayap Kiri. Sayap Kiri harus dituntun seterusnya oleh teori, strategi dan taktik perjuangan yang revolusioner, dimana tiap-tiap peraturan Sayap Kiri hingga yang sekecil-kecilnya diikuti oleh anggota dan penyokong Sayap Kiri.”⁴⁵

Njoto bersama Aidit dan Lukman pada awal tahun 1948 masuk menjadi Komisi penterjemah, yang tugasnya menerjemahkan Manifesto Partai Komunis, karya Karl Marx dan Friederich Engels. Pada bulan Agustus 1948, tiga serangkai sama-sama menjadi anggota Komite Central PKI. Aidit mengurus

⁴⁴ Jacques Lecrec, *Aidit dan Partai Tahun 1950-an*, (Prisma, 7 Juli 1982), hlm. 68-69.

⁴⁵ *Penghela Rakyat*, tanggal 19 April 1947, hal 1. Dalam Jacques Lecrec, *Aidit dan Partai....*, hlm. 70

bidang agraria, Lukman di Sekretariat Agitasi dan Propaganda, sedangkan Njoto menjalin relasi dengan badan-badan perwakilan.⁴⁶

Pada tanggal 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia. Kedatangannya membawa angin segar bagi PKI. Ia memperkenalkan konsepsi yang disebut “*Jalan Baru Untuk Republik Indonesia*”. Rapat Polit-Biro CC PKI tanggal 13-14 Agustus 1948 di Yogyakarta mengambil resolusi jalan baru yang diperkenalkan Musso tersebut yakni:

1. Di lapangan organisasi, golongan kiri seperti Partai Komunis Indonesia Ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis, harus dilebur menjadi satu Partai dengan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang legal.
2. Dilapangan politik, menentang politik luar negeri RI yang kompromistis, sedangkan untuk politik dalam negeri agar diadakan pembenahan struktur dan aparatur pemerintahan.
3. Mengadakan front nasional sebagai prasyarat tercapainya revolusi demokrasi, serta mengerahkan kekuatan massa untuk menghadapi Belanda dan memperbaiki kesalahan prinsipil yakni ideologi partai.⁴⁷

Konsep “Jalan Baru” ini dijadikan sebagai koreksi bagi gerakan komunis, sekaligus juga koreksi terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah RI menyangkut politik luar negeri. Karena selama ini RI banyak dirugikan dalam perundingan dengan Belanda.

⁴⁶ Seri Buku Tempo, *Njoto: Peniup Saksofon di Tengah Prahara* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan majalah Tempo, 2010), hlm. 15

⁴⁷ Selengkapnya lihat: Musso, *Djalan Baru Untuk Republik Indonesia* (Jakarta: Penerbit Yayasan Pembaruan, 1952). Aidit juga menjabarkan lebih lengkap mengenai konsep jalan baru Musso ini. Lihat juga: DN. Aidit: *Lahirnya PKI dan Perkembangannya* (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1955). Bagian III. Revolusi Agustus dan Perjuangan Melawan Teror Putih Kedua (1945-1950).

Musso menggeser kepemimpinan Politbiro PKI yang dipegang oleh Sardjono dan Alimin. Pada Tanggal 1 September 1948 *Comite Central* (CC) PKI pertama terbentuk dengan Musso sebagai ketua PKI. Alimin dan Sardjono diberi tugas dibagian Agit-prop yang ketuai oleh MH Lukman. Suripno mengurus masalah luar negeri. Amir Sjarifoeddin memegang bidang pertahanan, Wikana memegang bidang kepemudaan, Njoto diangkat menjadi wakil PKI dalam Badan Pekerja KNIP sedangkan Aidit dibidang masalah buruh.⁴⁸

Pada tanggal 19 September 1948. PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Pemerintah segera melakukan tindakan untuk memadamkan pemberontakan ini. Ketika TNI melaksanakan penumpasan di Madiun tanggal 30 September Aidit dan MH Lukman berhasil lolos dan melarikan diri ke Cina dan Vietnam.⁴⁹ Versi lain mengatakan Aidit berhasil ditangkap di Solo dalam suatu razia pada bulan September 1948 tetapi berhasil lolos dan menghilang. Menurut Ibrarruri Putri Alam, Putri Sulung Aidit, melukiskan, ayahnya bisa lolos ke Jakarta dengan menyamar menjadi pedagang Cina. “Rambutnya

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*, (Jakarta, 1994), hlm. 21. Lihat juga: Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 12

⁴⁹ Mc. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 461. Isyu mengenai kehadiran Aidit dan MH Lukman di Cina telah disiarkan guna mengelabui penguberan polisi Belanda (Sesaat ketika TNI menumpas pemberontakan PKI Madiun, Belanda melakukan Agresi Militernya yang kedua). Di Cina dikabarkan Aidit sebagai pimpinan utama PKI menghadiri Proklamasi RRC. Setelah Pemberontakan Madiun (September 1948), selama beberapa bulan Aidit melawat ke luar negeri: di Vietnam ia berjuang bersama-sama Vietminh, dan Tiongkok, dimana, dalam bulan Nopember 1949 ia bersama MH Lukman menghadiri Konferensi Serikat Buruh Australia-Asia yang dilangsungkan di Peking. (Lihat: A. Kohar Ibrahim. “Aidit Pelita Nusantara”. Dalam Sobron Aidit, *Aidit: Abang, Sahabat dan Guru di Masa Pergolakan* (Jakarta: Yayasan Nuansa Cendekia, 2003), hlm. 123-124

digundul habis dan ikut iring-iringan konvoi barang”.⁵⁰ Hal ini hanya sebagian dari puluhan kejadian bagi orang komunis, yang selama berbulan-bulan tidak diketahui orang sama sekali apa yang terjadi terhadap diri mereka. Menurut Jacques Leclerc, sebenarnya pada awal tahun 1949, Aidit, MH Lukman dan Njoto berada di Jakarta. Mereka lebih banyak tinggal di rumah seorang teman di Kemayoran.⁵¹

Pada bulan Juli 1950 surat kabar Jakarta memberitakan tentang penahanan terhadap Aidit dan MH Lukman di Tanjung Priok, disebabkan mereka keluar tanpa karcis dari sebuah kapal yang baru datang dari Singapura. Namun tidak lama kemudian mereka dibebaskan.⁵²

Terbunuhnya banyak kader dalam pemberontakan Madiun membuat mereka harus mandiri. Mereka menjadi independen karena tidak punya lagi tempat bertanya. Setelah kembali ke dalam masyarakat, Seperti halnya

⁵⁰ Aidit, *Dua Wajah Dipa Nusantara* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan majalah Tempo, 2010), hlm. 45

⁵¹ Jacques Leclerc, *Aidit dan Partai....*, hlm. 64. Lihat juga kisah yang dituturkan oleh Sobron Aidit. Tentang keberadaan Aidit di Jakarta tepatnya di daerah sekitar Matraman Raya, Gondangdia Lama dan Kemayoran. Dalam Sobron Aidit, *Aidit: Abang, Sahabat dan Guru di Masa Pergolakan* (Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, 2003).

⁵² Ketika mereka mendarat di Tanjung Priok mereka dibantu oleh Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah alias Sjam, yang pada saat itu mempunyai kedudukan sebagai salah seorang pimpinan buruh di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Suryoputro, sekitar 1949, Sjam sempat membuat skenario “penjemputan Aidit” sepulang dari Vietnam sumber lain menyebutkan dari Cina di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia diajak Sjam berboncengan sepeda. Di pelabuhan, Suryoputro sebagian tugas menjaga sepeda, sedangkan Sjam berpura-pura menjemput Aidit yang baru turun dari kapal. Skenario penjemputan ini dibuat untuk memberikan kesan bahwa Aidit menyingkir ke Vietnam atau Cina dan mempelajari Marxisme di sana setelah pemberontakan Madiun. Kemudian Aidit ditangkap oleh yang berwajib karena tidak punya karcis, tetapi Walikota Jakarta Suwirjo ikut campur, dan DN. Aidit dilepaskan kembali. (Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia 1926-1948-1965* (Jakarta, 1988), hlm. 23. Lihat juga Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Manuai Badai* (Jakarta: Penerbit Antar Kota, 1989), hlm. 53 dan Buku seri Tempo: *Sjam: Lelaki Dengan Lima Alias* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Tempo, 2010), hlm. 43

Sneevliet dan Semaun dengan koran-korannya sebagai terompet PKI pada dekade kedua dan menjelang dekade ketiga abad ke-20, demikian pula Aidit dan MH Lukman menerbitkan kembali majalah *Bintang Merah*⁵³ pada tanggal 15 Agustus 1950, yang bertempat di Jalan Kernolong Jakarta, yakni di rumah Peris Pardede selaku sekretaris redaksi majalah *Bintang Merah*. Melalui media ini Aidit melancarkan tuduhan terhadap Alimin yang dianggap mematikan sikap kritik dan otokritik dilingkungan partai. Aidit tidak setuju dengan gagasan Alimin yang menginginkan PKI sebagai partai kecil yang militan. Sebaliknya Aidit menginginkan agar PKI menjadi partai yang besar dan dikenal rakyat, terutama buruh dan tani yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia.⁵⁴ Terbitnya kembali *Bintang Merah* memberikan kesempatan bagi PKI untuk berpropaganda. Aidit mengatakan “dihidupkannya kembali *Bintang Merah* selain berfungsi sebagai terompet PKI juga berfungsi untuk memusatkan seluruh partai pada satu pimpinan sentral”. Melalui jurnal inilah berlangsung kontak-kontak dengan seluruh anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.⁵⁵

Tampilnya Aidit, Njoto, MH Lukman dan Sudisman sebagai pimpinan PKI, diartikan Jacques Leclerc sebagai:

PKI secara badaniah bermaksud mempererat hubungannya dengan mereka yang aktif melahirkan proklamasi, dan mau menjadikan dirinya sebagai alat untuk melahirkan kembali semangat pemuda,

⁵³ Majalah *Bintang Merah* sebelumnya sudah didirikan pada bulan Nopember 1945. *Bintang Merah* merupakan jurnal teoritis PKI, keberadaannya kemudian dilarang ketika terjadi Pemberontakan madiun 1948. Pemimpin PKI di awal pascapemberontakan Madiun waktu itu (Alimin) tidak berani menerbitkan majalah *Bintang Merah* karena larangan ini.

⁵⁴ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III* (Jakarta, Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 8

⁵⁵ Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), *Rangkaian Peristiwa...*, hlm. 36.

semangat berdemonstrasi yang telah berkobar pada pertengahan tahun 1945. Meski dilakukan pengambil alihan kepemimpinan dari tangan Alimin yang merupakan pejuang kawakan sekaligus guru Aidit di seksi Agit-prop CC, bisa memperlihatkan sejauhmana PKI dengan pimpinan yang baru mau bertindak mengidentifikasi dirinya dengan revolusi Agustus. Artinya, kelahiran Indonesia merdeka, mengidentifikasi kelahiran RI dengan kelahiran PKI kembali.⁵⁶

PKI bisa bebas bergerak kembali untuk pertama kalinya setelah pemberontakan Madiun 1948, ketika pemerintah RIS mengeluarkan surat keputusannya tertanggal 4 Februari 1950 yang menegaskan bahwa PKI tidak dilarang dengan catatan apabila mau mematuhi hukum dan tata tertib negara.⁵⁷

Pemimpin PKI setelah pemberontakan Madiun adalah Alimin. Menurut Jacques Leclerc pada masa kepemimpinan Alimin belum ada kegiatan partai yang sesungguhnya, khususnya memperluas keanggotaan partai. Yang ada hanya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat parlementer yang dipimpin oleh Tan Ling Djie selaku pemimpin sekretariat bersama golongan kiri.⁵⁸ Di samping itu, perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda yang dimotori oleh Aidit dan MH Lukman mengenai strategi-strategi serta cara-cara ketika menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi partai. Keputusan-keputusan politik golongan tua dirasakan sangat lamban mengantisipasi persoalan.

⁵⁶ Jacques Leclerc, *Aidit dan Partai.....*, hlm. 72

⁵⁷ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 12

⁵⁸ Jacques Leclerc, *Aidit dan Partai Pada Tahun 1950-an*, (Prisma, 7 Juli 1982), hlm. 63

Taktiknya pun dianggap oleh golongan muda sangat kaku sudah tidak laku lagi karena bisa mengakibatkan PKI tidak populer dimata masyarakat.⁵⁹

Dalam sidang pleno CC PKI tahun 1951, Aidit dengan dibantu oleh MH Lukman, Njoto dan Sudisman berhasil mengambil alih kepemimpinan PKI dari tokoh tua. Pada Tanggal 7 Januari 1951, enam bulan semenjak kembalinya Aidit dan MH Lukman diumumkan bahwa PKI telah memiliki pimpinan harian yang baru yang terdiri dari: Alimin, Aidit, MH Lukman, Njoto dan Sudisman. Aidit dan Sudisman dipilih menjadi Sekretaris Central Komite (CC) dengan pemimpinnya adalah Alimin. Akan tetapi setelah kelompok Aidit, MH Lukman dan Njoto dipilih menjadi anggota pimpinan harian, yaitu Polit-Biro PKI, mereka mengambil alih posisi Sekretariat Jenderal⁶⁰ Partai yang sebelumnya dipegang Alimin. Seperti yang diberitakan dalam majalah *Bintang Merah* yang dikutip oleh Jacques Leclerc berikut ini:

“Orang-orang yang telah memegang pimpinan Partai baik di pusat maupun di daerah-daerah, yang selama ini ternyata tidak ada usahanya untuk bisa memenuhi pekerjaan memegang pimpinan Partai, dengan dijalankannya kritik dan self kritik dari atas dan dari bawah, mulai jatuh satu persatu dan digantikan oleh tenaga-tenaga baru yang lebih mempunyai harapan untuk maju”.⁶¹

Aidit dipilih oleh CC menjadi Sekjend, MH Lukman Wakil Sekjend I, Njoto Wakil Sekjend II. Sedangkan Sudisman sebagai anggota Polit-Biro. Ini

⁵⁹ Subhan Sd, *Langkah Merah....*, hlm. 28

⁶⁰ Sekretariat Jenderal Partai pada tahun 1959 berubah namanya menjadi Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, lalu kemudian berubah lagi menjadi Ketua dan Wakil Ketua, seperti di Partai Komunis Cina.

⁶¹ “Memasuki tahun 1951”, *Bintang Merah*, nomor 1 dan 2, 1951, hlm. 4. Dalam Jacques Leclerc, *Aidit dan Partai Pada Tahun 1950-an*, Prisma, 7 Juli 1982, hlm. 64-65

adalah kemenangan suatu garis politik dan juga kemenangan suatu generasi.⁶² Sebagai kelompok muda yang memiliki ambisi besar, Aidit dan kawan-kawannya mencoba membenahi PKI yang telah porakporanda akibat pemberontakan Madiun 1948.⁶³ Aidit kemudian sebagai pemimpin PKI, mengikuti “Jalan Baru” Musso dan berusaha mengembangkan organisasi buruh, Tani, pemuda dan front wanita.⁶⁴

E. Usaha Aidit Membangun dan Menyatukan Partai Komunis Indonesia.

1. Membangun Struktur Organisasi.

Setelah berhasil menguasai pimpinan partai, Aidit kemudian berusaha membangun struktur organisasi partai yang hancur akibat pemberontakan Madiun. Kemudian Aidit menunjukkan bagaimana cara partai dibangun kembali dari pimpinan pusatnya yang baru dan untuk memperkuat pimpinan baru ini:

“Usaha-usaha pembangunan partai di daerah-daerah pada tingkat pertama dilakukan oleh pembantu-pembantu CC yang terpercaya, mereka yang sehati dan sepikiran dengan CC, yaitu komisariat-komisariat CC yang dikepalai oleh seorang komisaris CC yang ditetapkan oleh CC, jadi tidak dipilih oleh bawah. Komisariat CC diadakan untuk provinsi-provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan,

⁶² *Ibid*, hlm. 65

⁶³ Zulfikar Gazali, *Pola Kepemimpinan PKI 1945-1966*. Dalam Alex Dinuth: *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis* (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 162

⁶⁴ Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 65

Sumatera Tengah dan Sulawesi. Cara ini adalah tepat, karena dengan jalan ini CC mempunyai hubungan langsung dengan komite-komite seksi dan dengan ini juga CC mengenal langsung kader-kader yang memimpin Komite-Komite tersebut. Hal ini perlu karena keadaan Partai di daerah masih ruwet dan dikacaukan oleh elemen-elemen oportunis baik kanan maupun “kiri”. Dalam masa pembangunan kembali Partai ini (...), dalam keadaan terdapatnya kekacauan dan keruwetaan organisasi, politik dan ideologi dalam partai, perlu pertama-tama sekali memperjuangkan persatuan yang kokoh dan kebulatan pikiran marxis-leninis dari badan pimpinan sentral (CC). kemudian organisasi-organisasi bawahan mulai dibangun kembali dari atas.”⁶⁵

Struktur kekuasaan tertinggi berada dalam Kongres Nasional, sedangkan Badan Pimpinan tertinggi adalah Central Komite (CC) yang menggariskan tugas-tugas partai. Anggota-anggotanya adalah pejabat-pejabat penting partai, pemimpin-pemimpin Departemen dari CC. Politbiro adalah penentu garis kebijaksanaan politik partai dan langsung bertanggung jawab kepada ketua CC, yakni Aidit sendiri yang juga menjabat sekretaris CC. untuk tugas-tugas khusus yang juga penuh rahasia yang penting sekali, dibentuklah Biro Khusus yang langsung bertanggung jawab kepada ketua partai. Tugas biro khusus antara lain, membina pejabat-pejabat penting pemerintah, anggota-anggota organisasi atau anggota-anggota non partai komunis, warga angkatan bersenjata yang dianggap mau bekerjasama dengan PKI dan bertindak sebagai badan intelligen.⁶⁶

Menurut regional, organisasi di bawah CC adalah Komite Daerah Besar (CDB), Komite Pulau Besar (CPB), Komite Jakarta Raya (CDR) yang

⁶⁵ DN. Aidit, *Revolusi Indonesia dan Tugas-Tugas Mendesak PKI*. Dalam kumpulan: Kibarkan Tinggi Pandji Revolusi (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964), hlm 19-21

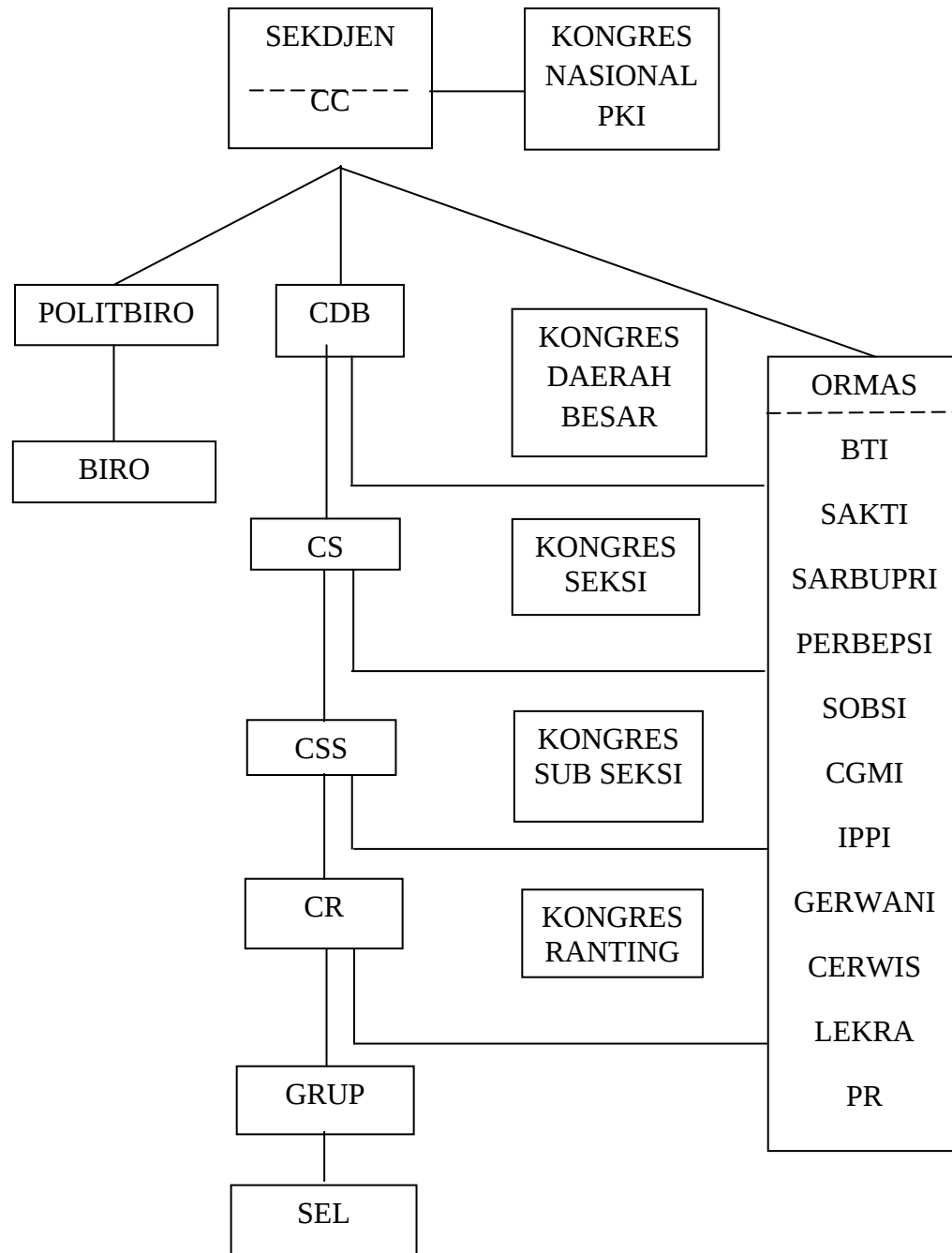
⁶⁶ Arbi Sanit, *Badai Revolusi...*, hlm. 74-75

ketiganya setingkat. Kemudian menyusul Komite Seksi (KS) yang meliputi daerah Kabupaten dan Kota Besar. Komite Sub Seksi (CSS) meliputi kecamatan atau kota kecil. Daerah yang terendah ialah Komite Ranting (KR) yang meliputi daerah suatu desa atau bagian kota, suatu pabrik, kampung, kantor, sekolah dengan sedikitnya 100 orang anggota. Kalau dilihat dari jumlah anggota, ada organ kecil lainnya yang menjadi sokoguru organisasi PKI yaitu Grup yang terdiri dari kira-kira 10 orang atau sel yang terdiri dari paling banyak 5 orang. Disamping organisasi yang didasarkan kepada fungsi organ tersebut, adalah bentuk organisasi yang didasarkan kepada tugas seseorang atau kelompok orang dalam hidupnya. Seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia (SAKTI), Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia (PERBEPSI) dan sebagainya.⁶⁷

Pada setiap tingkat organisasi, pembagian tugas praktis diperjelas dengan alat-alat kelengkapan partai yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan. Organisasi partai khususnya ditingkat pusat dapat membentuk Sekretariat atau Departemen Agit-Prop (Agitasi Propaganda), Departemen Tani, Departemen Pemuda, Departemen Ilmu dan Kebudayaan, Departemen Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, partai dapat pula membentuk komisi-komisi seperti komisi kontrol, komisi verifikasi, komisi redaksi, dan sebagainya.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 75-77

⁶⁸ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 47



Gambar 2. Struktur Organisasi PKI.

2. Memperbaiki Citra dan Tokoh Partai.

Setelah Aidit, Njoto, MH Lukman dan Sudisman berhasil menggantikan kepemimpinan Alimin. Usaha selanjutnya disamping membangun struktur organisasi, Aidit Cs juga berusaha merehabilitasi partai.

Aidit, Lukman dan Njoto berusaha memulihkan kepercayaan rakyat dari trauma terhadap PKI. Peran ketiga orang itu adalah sebagai pembersih noda pemberontakan Madiun. Pembersihan itu misalnya dilakukan lewat Koran *Bintang Merah* yang menulis ‘dua tahun peristiwa Madiun’. Aidit, Lukman dan Njoto menyebut Musso tidak memberontak atau bercita-cita mendirikan negara Soviet. Setahun kemudian, *Bintang Merah* memuat artikel “Tiga Tahun Provokasi Madiun”, yang ditulis Mirajadi- nama samara Sudisman.⁶⁹

Pada tahun 1953 Departemen Agitasi Propaganda PKI merehabilitasi nama PKI, dengan mengeluarkan “*Buku Putih*” tentang pemberontakan PKI Madiun.⁷⁰ Kata pengantarnya ditulis Aidit. Dalam resolusinya PKI dan tokoh-tokohnya seperti Aidit, Lukman, Njoto dan Sudisman menolak klaim Hatta, Natsir dan Sutan Syahrir bahwa peristiwa Madiun 1948 adalah pemberontakan dan kudeta PKI terhadap pemerintahan Hatta melalui jalan kekerasan. Demikian juga klaim bahwa Musso ingin membangun negara

⁶⁹ Seri Buku Tempo, *Musso: Si Merah di Simping Republik* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan tempo, 2011), hlm. 120

⁷⁰ Lihat D.N. Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948-Peristiwa Sumatera 1956*, (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1957).

Indonesia menurut model negara komunis Sovyet sebagai ‘mengada-ada’. Penolakan keras terhadap klaim-klaim lawan PKI itu disuarakan antara lain oleh Aidit. Menurut Aidit peristiwa Madiun itu adalah hasil dari provokasi Hatta yang berkolaborasi Jahat dengan Natsir (Masyumi) dan Syahrir (PSI) yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tragedi berdarah itu.⁷¹

Aidit menolak dengan keras jika PKI adalah dalang dari meletusnya “pemberontakan” di tanah air. Pemberontakan yang dimaksud Aidit adalah pemberontakan daerah yang dipimpin oleh para Komandan Militer seperti Kolonel Simbolon dan Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Dengan menyebut pemberontakan daerah itu, lawan-lawan ingin menyudutkan Partai Komunis sebagai pelopor pemberontakan Madiun 1948. Menurut analisa Aidit peristiwa Madiun adalah “memang provokasi dan dalam peristiwa Madiun tersebut tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs memang berlumur darah.”⁷² Begitu yakinnya Aidit dengan pandangannya, ia berani menantang Hatta untuk berhadapan menghadapinya di pengadilan sehubungan dengan peristiwa Madiun ia pun menegaskan:

“Saya tidak ingin menantang siapa-siapa, tetapi kapan saja Hatta ingin Peristiwa Madiun dibawa ke pengadilan, kami dari PKI selamanya bersedia menghadapinya. Kami yakin bahwa jika soal ini dibawa ke pengadilan bukanlah kami yang akan menjadi terdakwa. Kamilah yang akan tampil ke depan sebagai pendakwa atas nama Amir Sjarifoeddin, putera utama bangsa

⁷¹ Ahmad Suhelmi, *Islam dan Kiri: Respons Elite Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca-Soeharto* (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2007), hlm 35

⁷² *Ibid*, hlm. 36

Indonesia yang berasal dari tanah Batak, atas nama Suropto, Maruto Darusman, Dr. Wioreno, Dr. Rustam, Harjono, Djokosoejono, Soekarno, Sutrisno, Sardjono dan beribu-ribu lagi putra Indonesia terbaik dari suku Jawa yang menjadi korban keganasan satu pemerintah yang dipimpin oleh Borjuis Minangkabau, Mohammad Hatta.⁷³

Dengan nada mengejek, Aidit mengatakan bahwa maksud Hatta dan Natsir cs menghantam PKI sebagai dalang peristiwa Madiun 1948, kenyataan justru memukul balik keduanya. Pemberontakan di Sumatera Barat, dimana Natsir dan Sumitro Djoyohadikusumo terlibat, membuktikan bahwa sesungguhnya menurut Aidit Masyumi dan PSI yang sesungguhnya membela para pemberontak terhadap Republik. Maksud hendak memukul PKI dalam kamus Madiun, diibaratkan Aidit “seperti menepuk air didulang, bukan muka PKI yang kena tetapi justru muka Masyumi dan PSI”.⁷⁴

Tuduhan pemerintahan Hatta bahwa PKI ingin “merobohkan pemerintah Republik Indonesia”, tindakan “melakukan coup d’etat”, “mendirikan pemerintahan Sovyet di Indonesia’ dimata Aidit tuduhan itu tidak mendasar. Kalau PKI hanya mengangkat seorang Wakil Walikota di Madiun, lalu itu dikatakan sebagai upaya merobohkan Republik Indonesia kemudian bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh komplotan Kolonel Simbolon dengan “Dewan Bantengnya” di Sumatera. Tuduhan itu menurut Aidit menunjukkan bebalnya para penuduh PKI-termasuk Hatta, Natsir, Sukiman dan lain-lain sebagai pembuat makar di Madiun.⁷⁵

⁷³ DN. Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun.....*, hlm. 8

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 11

Lebih jauh lagi Aidit mengkritik Hatta amat tajam. Kali ini kritiknya sangat bersifat pribadi. Sebuah kritik personal yang jelas menunjukkan kemarahan dan kebencian tokoh PKI itu kepada salah satu Proklamator RI. Hatta yang disebut Aidit sebagai ‘agen provokator’ Peristiwa Madiun itu adalah seorang Borjuis Minangkabau yang picik dan sombong dan haus kekuasaan serta takut kepada komunisme secara berlebihan. Kepribadian Hatta yang demikian membuatnya secara gegabah telah mengerahkan alat-alat kekuasaan negara untuk menculik, membunuh dan mengobarkan perang saudara. Hatta juga kepala batu karena sempit pikirannya. Ia tidak mampu berkomunikasi, tukar pikiran secara sehat, dan tidak pandai bermusyawarah. Segala keputusannya dilakukan secara tangan besi.⁷⁶ Dengan gaya mengancam dan penuh kemarahan Aidit mengatakan bahwa Hatta tidak bisa lagi sewenang-wenang terhadap PKI seperti yang dilakukannya dalam peristiwa Madiun 1948 karena memang jumlah anggota PKI ketika itu masih berjumlah 10.000 orang yang tersebar tidak merata di Jawa dan Sumatra. Kini, tegas Aidit jumlah anggota PKI telah mencapai 1.000.000 orang yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.⁷⁷

Dengan kekuatan PKI yang cukup besar itu Aidit menolak segala bentuk kesewenang-wenangan yang ditujukan kepada PKI. Kaum komunis tidak ingin mengganggu siapa-siapa selama tidak diganggu. Akan tetapi PKI

⁷⁶ Pidato Aidit dalam sidang dihadapan Parlemen tanggal 11 Februari 1957. Lebih lengkapnya lihat DN. Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948-Peristiwa Sumatera 1956*, (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1957), hlm. 12-13. Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Islam dan Kiri: Respons Elite Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca-Soeharto* (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2007), hlm. 37

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 14

akan mengangkat senjata seandainya diperlakukan zalim seperti yang di katakan Aidit:

“Saya yakin, bahwa tiap-tiap orang yang mempunyai perasaan dan tanggung jawab tidak ingin terulang kembali tragedi nasional seperti peristiwa Madiun itu. Dari pihak partai komunis Indonesia, seperti sudah berulang-ulang kami nyatakan, dan sudah menjadi pelajaran di dalam sekolah-sekolah dan kursus-kursus partai kami, kami ingin dan kami yakin bisa mencapai tujuan-tujuan politik kami secara Parlementer. Kami akan menghindari tiap-tiap perang saudara selama kepada kami dijamin hak-hak politik untuk memperjuangkan cita-cita kami. Tetapi, kalau kepada kami disodorkan ujung bayonet dan didesingkan peluru seperti dalam peristiwa Madiun, juga seperti selama peristiwa itu, kami tidak akan memberikan dada kami untuk ditembus peluru kaum kontra-revolusioner.”⁷⁸

Dalam buku putih peristiwa madiun 1953, Aidit mengeluarkan resolusi yang menuding Soekarno-Hatta-Natsir provokatif dan kejam menyikapi peristiwa Madiun seperti yang sudah diuraikan di atas. Gara-gara resolusi itu, Aidit diajukan ke meja hijau tanggal 14 Oktober 1954, dengan tuduhan menghina Wakil Presiden Hatta. Di persidangan Aidit membuat gempar dengan menyebut Musso komunis patriotis. Ruang sidang geger. Hakim sempat memukul-mukul palu untuk meminta pengunjung kembali tenang. Dukungan untuk membebaskan Aidit mengalir. Empat ribu surat dan telegram diorganisir PKI dan dikirim ke pengadilan. Tetapi hakim tetap memvonis Aidit tiga bulan penjara bersyarat dengan enam bulan masa percobaan.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 14-15

⁷⁹ Seri Buku Tempo, *Musso: Si Merah di Simping Republik* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan tempo, 2010), hlm. 121

Menurut Asvi Warman Adam dalam majalah *Tempo* mengatakan: tudingan “Provokasi Hatta” itu lebih bersifat tendensius dan Hatta dijadikan “kambing hitam” dalam Peristiwa Madiun. Menurutnya perbedaan pandangan antara Hatta dengan Amir Sjarifoeddin mengenai pengelolaan tentara tinggal perdebatan sejarah. Yang jelas, terjadi ketegangan dan konflik sesama kelompok tentara di samping persaingan keras partai politik. Tapi apakah program rasionalisasi tentara (RERA) menjadi penyebab peristiwa Madiun masih perlu dikaji lanjut.⁸⁰

Awal tahun 1951, D.N. Aidit juga merehabilitasi Mohammad Jusuf (yang pernah dikutuk oleh orang-orang komunis karena tindakan penyelewengan garis partai dengan melakukan pemberontakan melawan Pemerintah RI di Cirebon pada tahun 1946).⁸¹ Selanjutnya, upaya untuk merehabilitasi nama PKI, Alimin juga turut berperan serta. Ia mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar dilakukan penggalian dan penguburan kembali tokoh-tokoh PKI yang dihukum mati akibat pemberontakan PKI-Madiun. Namun usaha ini ditolak pemerintah RI waktu itu.⁸²

⁸⁰ Asvi Warman Adam. Hatta Kambing Hitam Madiun. *Tempo*, 14 Nopember 2010, hlm. 97

⁸¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* (Jakarta, 1994), hlm. 24

⁸² *Ibid*, hlm. 23

3. Menyatukan Potensi Komunisme Serta Tantangan Yang di Hadapi.

Pada bulan Januari 1951, Njoto dan Sudisman ikut bergabung, *Comite Central* PKI memilih Politbiro baru yang terdiri atas D.N. Aidit, MH Lukman, Njoto, Sudisman dan Alimin. Pemimpin-pemimpin baru inilah yang kemudian membangun kembali Partai Komunis Indonesia pasca pemberontakan Madiun 1948. Kemudian Mereka berusaha menyatukan kembali semua potensi komunisme Indonesia. PKI sejak kegagalannya yang kedua pada masa itu terpecah menjadi: PKI legal yang berpusat di Yogyakarta di bawah pimpinan Djaetun, Partai Sosialis di bawah pimpinan Tan Ling Djie, Partai Buruh Indonesia di bawah pimpinan Asmu Sakirman serta PKI ilegal yang bergerak di bawah tanah.

Sejak tahun 1951 terjadi perubahan garis kiri (Zhdanov) ke garis kanan (Stalin). Setelah setahun melalui masa percobaan, garis kanan secara formal disahkan pada kongres Partai Bolshewik ke-19 yang diadakan pada tanggal 5-14 Oktober 1952. Pada kesempatan ini, Stalin mengumumkan garis politik baru yang dikenal dengan “koeksistensi damai Stalin” atau garis lunak. Perubahan garis keras (garis Zhdanov) ke garis lunak ini setelah melihat kegagalan-kegagalan garis keras yang pernah ditempuh. Dengan demikian, sejalan dengan garis Komunis Internasional maka PKI pimpinan Aidit

kemudian menempuh strategi politik garis lunak, yang tampaknya memang cocok bagi keadaan partai yang baru mengadakan konsolidasi.⁸³

Strategi yang digariskan Aidit berbeda dengan strategi sebelumnya. Ia mengarahkan partai agar menjadi besar dan mendapat simpati di kalangan masyarakat luas, tapi sekaligus membangun struktur partai dengan kuat agar posisi partai tidak mudah goyah. Kongkretnya dilakukan penggalangan berbagai kekuatan massa, dengan tanpa berhenti menciptakan kader-kader militant. Aidit sadar bahwa kekuatan partai begitu kecil sebagai akibat pemberontakan Madiun 1948. Ia menerapkan strategi yang lebih bersifat “kanan” dan juga menyatukan semua potensi komunisme yang ada.⁸⁴ Namun yang terjadi, ia mendapat kritikan dari pemimpin PKI lainnya.

⁸³ Soetopo Soetanto. PKI dan Gerakan Komunis Internasional. Dalam Alex Dinuth, , *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*, (Jakarta: Intermassa, 1997), hlm188. Lihat juga : Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Kajian Citra bangsa, 2009), hlm. 37.

⁸⁴ Strategi Kanan (*Right Strategy*) yang merangkul dengan taktis kaum borjuis, kerjasama dengan musuh masyarakat, dan kolaborasi dengan imperialis (jika diperlukan). Strategi ini menampilkan sikap kompromi, negosiasi, dan konsiliasi. Secara ekstrim strategi kanan ini bisa berganti menjadi apa yang digambarkan sebagai revisionisme. Strategi kiri dilakukan dengan memutarbalikkan kenyataan, menggunakan sikap kasar, anti kompromi, suka huru-hara, perselisihan, dan penentangan, menimbulkan kekerasan dalam skala kecil maupun besar, serta menyukai konfrontasi dan kekerasan. Secara ekstrim, strategi kiri ini dapat mengarah kepada dogmatisme.

a. Pertentangan Aidit dengan Lukman dan Sudisman, Tentang “Strategi Partai”.

Strategi kanan yang disampaikan Aidit ternyata banyak ditentang oleh tokoh-tokoh PKI lainnya. Terutama kawan dekatnya sendiri MH Lukman dan Sudisman. Kedua tokoh itu menghendaki strategi kanan diganti dengan strategi kiri yang lebih militan, agresif, dan progresif. Namun sebagai *supreme leader* partai, Aidit tidak mudah goyah dan menyerah begitu saja menghadapi kritik kawan-kawannya. Aidit malah menghadapi kritik tersebut dengan caranya sendiri. Aidit melakukan cara-cara persuasif untuk melunakkan kawan-kawannya. Ia berhasil meyakinkan para penentangannya bahwa kerjasama dalam front nasional sangat bermanfaat. Bahkan ia masih memperkuat dengan argumen yang rasional.⁸⁵

Aidit berbicara tentang kesulitan-kesulitan dalam menyelenggarakan perlawanan bersenjata. Menurut Aidit secara geopolitik PKI sangat lemah. Berbeda dengan Cina yang teritorialnya berbatasan langsung dengan negara-negara lain sehingga kemungkinan melarikan diri atau membangun basis perlindungan sangat berpeluang, jika partai terdesak dan dalam posisi yang sulit. Menurut Aidit Indonesia adalah negeri kepulauan, di mana tidak terdapat daerah-daerah pegunungan dan hutan, jauh dari kota-kota dan jalan-jalan, seperti mereka yang memungkinkan Tentara Merah berlindung setelah

⁸⁵ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 30-31

Long March, dan bahwa Indonesia tidak berbatasan dengan negara-negara sahabat sehingga bisa mendirikan basis bebas tanpa bahaya terkepung secara total.⁸⁶ Menurut Aidit dengan dikemukakan kenyataan-kenyataan di atas, apakah peperangan gerilya tidak bisa digunakan? Sama sekali tidak demikian. Akan tetapi ada cara yang lebih tepat, dalam hal ini Aidit mengatakan:

“Untuk membikin cara peperangan gerilya lebih efektif dalam keadaan-keadaan yang berlangsung di Indonesia, ialah mengkombinasi cara peperangan gerilya dengan aksi-aksi revolusioner kaum buruh di kota-kota yang diduduki oleh musuh, dengan aksi-aksi pemogokan ekonomi dan politik yang bersifat umum. Dalam keadaan-keadaan seperti di Indonesia, adalah mempunyai arti yang istimewa pemogokan-pemogokan, yaitu kereta api, mobil, lautan, udara, sebab pemogokan-pemogokan umum oleh ploretariat di lapangan ini bisa sangat melemahkan musuh revolusi dan dengan demikian berarti memberi bantuan yang kuat kepada perdjjuangan gerilya.”⁸⁷

Walaupun dalam pidato ini Aidit berbicara tentang periode perang anti-Belanda, sebenarnya ia menunjukkan kepada mereka yang berfikir bisa menyelenggarakan perang revolusioner di Jawa pada tahun 1950.

⁸⁶ “Lahirnya PKI dan Perkembangannya”, *Bintang Merah* nomor 7, 1950, hlm. 200-201. Tulisan yang sama diterbitkan kembali berupa pidato Aidit tanggal 23 Mei 1955. Lihat DN. Aidit: *lahirnya PKI dan Perkembangannya* (Jakarta: Penerbit Yayasan Pembaruan, 1955), hlm. 29-31. Lihat juga kutipan Jacques Leclerc, dalam *Prisma*, tanggal 7 Juli 1982, hlm. 78

⁸⁷ DN. Aidit: *Lahirnya PKI dan Perkembangannya*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Pembaruan, 1955), hlm. 30-31

b. Pertentangan Aidit dengan Wikana Tentang “Partai”.

Pada akhir tahun 1950 terjadi diskusi antara redaksi *Bintang Merah* dengan Wikana.⁸⁸ Sebenarnya “orang-orang yang bercita-cita menjadi komunis dan orang-orang yang sudah termasuk dalam PKI sendiri belum mempunyai kesanggupan dan kecakapan untuk berorganisasi dan berpolitik sebagai Partai Komunis”.⁸⁹ Diskusi yang berlangsung antara redaksi *Bintang Merah* dengan Wikana menunjukkan betapa sulit memahami istilah “berorganisasi dan berpolitik sebagai partai komunis”, betapa sulit memahami pengertian “peranan hegemoni dari partai komunis “ yang ingin diajukan grup Aidit. Diskusi terbentur pada konsepsi partai sebagai organisasi massa, dan sebagai wadah untuk menggeneralisasi dan menteoritisasi pengalaman gerakan itu, untuk mewujudkan “missi sejarah kelas buruh” yang telah dirumuskan oleh Karl Marx.⁹⁰

Wikana mempermasalahkan hubungan antara partai dan organisasi massa pemuda: “mana batas kepartaian, mana batas organisasi massa pemuda?”. Mengenai partai, Wikana mempertentangkan konsepsi partai sebagai “organisasi politik dari orang banyak” dan partai sebagai “bagian yang terdepan yang diorganisir, yang tertinggi, dari massa pekerja”.

⁸⁸ Wikana merupakan tokoh sangat penting dalam “Angkatan 45”. Pendiri Pesindo, pendiri Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, menjadi Menteri Negara Urusan Pemuda dari bulan Maret 1946-Januari 1948 yang langsung mewakili Badan Kongres Pemuda di dalam pemerintah. Menurut Jacques Leclerc dia adalah lambang sejati dari Pemuda dan Semangat Pemuda.

⁸⁹ “Proklamasi 17 Agustus dan PKI”, *Bintang Merah* 1, 1950, hlm. 5

⁹⁰ Jacques Leclerc. Aidit dan Partai Tahun 1950. *Prisma*, 7 Juli 1982, hlm. 75

Mengenai organisasi pemuda, Wikana mengajukan konsepsi agar organisasi semacam itu bisa mempunyai peraturan yang sama dengan partai.

Sebagaimana yang dikutip Jacques Leclerc, Wikana mengatakan:

“Perbedaan antara partai dan organisasi massa pemuda bukan harus diadakan dengan jalan membedakan azas, tujuan dan menyelundupkan tujuan strategi jadi tujuan perjuangan”. Juga masalah patokan usia adalah masalah yang salah. “dikatakan bahwa jika orang-orang sudah berumur lebih dari 25-30 tahun harus jangan dibolehkan menjadi anggota organisasi pemuda dengan alasan: jika banyak anggota yang umurnya lebih dari itu, organisasi itu akan kehilangan sifat kepemudaannya, dan menjadi partai kedua”. Yang penting adalah keinginan berjuang. Jika seseorang merasa sesuai, terutama berada dikalangan pemuda, maka sayangnya untuk menyisihkannya dari perjuangan dengan dalih bahwa usianya tidak cocok lagi. “jika ia bisa tetap dalam organisasi itu meskipun tidak ada hasrat untuk bekerja dilapangan lain, ia masih ada faedahnya buat perjuangan, sedikit-tidaknya lebih berfaedah jika ia tidak berbuat apa-apa. Kita rasa, tidak menguntungkan, bahwa golongan *simpatiserenden* dijauhkan dari perjuangan aktif dibagian manapun juga dalam perjuangan kita”.⁹¹

Wikana menuntut otonomi organisasi pemuda dari organisasi partai dan kemungkinan bagi organisasi massa pemuda menjadi semacam partai *simpatiserenden* sesuai dengan rumusan “partai massa”, berdampingan atau bersaing secara bersahabat dengan partai pelopor yakni PKI.

Redaksi *Bintang Merah* yang dimotori oleh Aidit dan Lukman menanggapi tuntutan Wikana, bahwa gerakan pemuda tidak mungkin menjadi kutub berdaya tarik sebagaimana halnya partai itu sendiri, tetapi

⁹¹ Wikana, “Organisasi Massa Pemuda”, *Bintang Merah* 7, 1950, hlm. 215-216. (Dalam Jacques Leclerc. Aidit dan Partai Tahun 1950. *Prisma*, 7 Juli 1982, hlm. 75).

adalah partai yang harus mewujudkan semangat pemuda, semangat Revolusi Agustus. Suatu organisasi pemuda yang menggunakan azas dan tujuan yang serupa dengan yang digunakan oleh Partai Komunis, tidak lagi merupakan organisasi massa yang harus lebih umum dan lebih luas dalam tujuannya dan azasnya, dan lebih luwes dalam organisasi dan gerakannya, dibanding partai pelopor. Ini supaya bisa berperan sebagai perantara dari rakyat biasa yang belum berorganisasi sampai ke dalam partai. Terlebih-lebih jika kepemudaan tidak lagi ditentukan oleh usia, maka organisasi semacam ini bukan saja menjadi suatu partai politik untuk pemuda melainkan sudah menjadi partai politik baru yang menyaingi partai komunis. Ini berarti menyangsikan, bahkan menolak, fungsi organisator massa dan fungsi pemusatan perjuangan massa yang dilakukan oleh partai pelopor. Jadi ini berarti menyangsikan, bahkan menolak, peranan pemimpin dari partai komunis juga keharusan adanya partai itu sendiri.⁹²

⁹² *Ibid*, hlm. 76

c. Pertentangan Aidit dengan Tan Ling Djie tentang kedudukan Partai Sosialis sebagai “Partai Penampung”.

Usaha Aidit untuk menyatukan kembali semua potensi komunisme Indonesia setelah PKI hancur akibat pemberontakan Madiun ternyata tidak mudah. Salah satu usaha yang dilakukan Aidit selanjutnya adalah melebur Partai Sosialis menjadi PKI yang ternyata mendapat tantangan dari pemimpinnya yakni Tan Ling Djie. Mengenai hal ini Aidit menuduh Tan Ling Djie menolak resolusi ‘Djalan Baru’⁹³ seperti yang dikatakan Aidit:

“Dari sikap kawan Tan Ling Djie yang mati-matian mau kembali kepada keadaan seperti sebelum ada resolusi “Djalan Baru” itu, dapat kita tarik kesimpulan umum bahwa Tan Ling Djie-isme sebenarnya sudah berkuasa di dalam PKI selama revolusi tahun 1945-1948 dan sampai pada permulaan tahun 1951, dan bahwa “Djalan Baru” pada hakekatnya tidak lain daripada penelanjangan terhadap Tan Ling Dji-isme.”⁹⁴

Pertentangan antara Aidit dengan Tan Ling Djie berkenaan dengan konsepsi Partai Sosialis sebagai “Partai Penampung”. Partai Komunis Indonesia (PKI) menurut Tan Ling Djie adalah Partai para aktivis yang tergembleng atau partai “orang hebat”.⁹⁵ Bagi orang yang belum berani

⁹³ Salah satu resolusi Djalan Baru adalah dilapangan organisasi; golongan kiri seperti Partai Buruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia Ilegal, dan Partai Sosialis, harus melebur dan hanya membentuk satu Partai dengan nama PKI.

⁹⁴ “Tentang Tan Ling Dji-isme”. *Bintang Merah*, Nomor 2-3, Tahun ke-IX-Februari/Maret 1954, hlm. 101

⁹⁵ Jacques Leclerc. Aidit dan Partai Tahun 1950. *Prisma*, 7 Juli 1982, hlm. 76

masuk PKI maka disediakan “Partai Penampung” (Partai Sosialis).⁹⁶ Inilah yang menjadi latar belakang awal berdirinya Partai Sosialis tahun 1945 dan menolak jika Partai Sosialis dilebur ke dalam PKI.

Kelompok *Bintang Merah* yang dimotori Aidit sepenuhnya melawan gagasan “Partai Penampung” itu. Reservoir PKI adalah organisasi-organisasi massa, yaitu organisasi yang khusus mengorganisasi golongan-golongan masyarakat dengan tujuan terbatas, sehingga mampu menyatukan banyak orang, tetapi tidak menentukan politik negara. Organisasi-organisasi massa itu tidak berfungsi untuk menggeneralisasi dan mensinteseikan politik sebagaimana halnya partai.⁹⁷

Sikap Tan Ling Djie, menurut Aidit membawa akibat, bahwa sejak tahun 1945 “PKI menjadi buntut Partai Sosialis, buntut Sayap Kiri, dan kemudian buntut Front Demokrasi Rakyat”.⁹⁸ Tan Ling Djie merendahkan peranan partai komunis di dalam semua hal. Ia mengabaikan partai komunis sebagai organisasi. Ia tidak tertarik pada pendidikan Marxis secara sistematis. Ia tidak berusaha untuk menggerakkan massa dan puas bekerja di tingkat Parlemen atau badan-badan perwakilan lain. Jadi masalah pimpinan

⁹⁶ Soetopo Soetanto, PKI dan Gerakan Komunis Internasional. Dalam Alex Dinuth. *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis :Kumpulan tulisan terpilih tentang gerakan komunis dan bahaya ekstrim lainnya di Indonesia* (Jakarta: Penerbit: Intermasa, 1997), hlm. 187

⁹⁷ Jacques Leclerc, *Aidit dan Partai....*, hlm. 76

⁹⁸ “Tentang Tan Ling Djie-isme”. *Bintang Merah*, nomor 2-3 Tahun ke-IX-Februari/Maret 1954, hlm. 101

gerakkan massa tidak menariknya. “Dia mau membangun Partai bukan dari kalangan rakyat tapi dari Parlemen”...⁹⁹

Menurut Aidit, konsepsi “partai penampung” bisa menjadi tanah tumbuh bagi berbagai ragam partai buruh yang masing-masing berjalan sendiri-sendiri, sehingga karena terpecah-belahnya pergerakan buruh itu, jalan untuk mewujudkannya demokrasi bagi rakyat pekerja juga tidak karuan. Pengalaman 1945-1948 harus tidak terulang kembali. Pemberontakan September-Desember 1948 bukanlah karena disebabkan oleh garis baru yang dinyatakan dalam manifest “Jalan Baru” tetapi sebenarnya karena garis baru ini datangnya terlalu terlambat.¹⁰⁰

Menurut Aidit, Tan Ling Djie mengabaikan teori telah berlayar tanpa pedoman, sehingga menyeleweng ke kiri dan ke kanan di hadapan halangan-halangan yang muncul. Ini adalah “empirisme” tulen yang tidak memungkinkan diikutinya strategi politik apapun. Tan Ling Djie berusaha supaya orang menelan “empirisme” itu pakai alasan-alasan semacam:

“Beladjar teori tidak penting, dan tidak praktis. Jang penting bukan membatja buku dan mengerti dalil-dalil revolusioner dari Marx, Engels, Lenin dan Stalin. Jang penting jalah mengetahui berapa harga telur bebek, harga beras, harga kain belatju, agar dengan mengetahui harga semuanya ini kita bisa membantu Rakjat untuk memperdjuangkan kepentinganja. Rakjat bukan mau dalil-dalil Marxis-Leninis tapi mau

⁹⁹ Jacques Leclerc, Aidit dan Partai 1950. Dalam Sobron Aidit: *Aidit, Sahabat dan Guru di Masa Pergolakan* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, hlm. 163

¹⁰⁰ *Ibid.*

perbaikan nasib, mau tahu, mau jamur, mau kecap, mau tempe, dan sebagainya...”¹⁰¹

Menurut Aidit teori tidak merintang perjuangan untuk tuntutan sehari-hari. Malahan sebaliknya, ia memungkinkan untuk memahami mereka lebih baik. Lebih baik mengarahkan mereka ke dalam suatu gerakan yang lebih pas demi perubahan-perubahan yang sesungguhnya. Pengabaian teori, menyebabkan Tan Ling Djie menentang terbitnya kembali *Bintang Merah* pada pertengahan tahun 1950. Tan Ling Djie tidak menerima usul ini dan lebih mementingkan majalah yang “bersifat umum”, yang diterbitkan oleh fraksi partai dalam parlemen, dimana di dalamnya banyak ditulis tentang perundang-undangan. Akan tetapi *Bintang Merah* tetap terbit karena oleh seluruh partai dirasakan penting untuk meninggikan tingkat teori anggota partai dan penting untuk memusatkan seluruh partai pada satu pimpinan sentral.¹⁰²

Pada Sidang Pleno Central Komite yang diselenggarakan tanggal 6-9 Oktober 1953, dilancarkan pembersihan pada pimpinan tua¹⁰³. Tanggal 9 Oktober 1953 Tan Ling Djie dikeluarkan dari CC karena dianggap

¹⁰¹ “Tentang Tan Ling Djie-isme”. *Bintang Merah*, nomor 2-3 Tahun ke-IX-Februari/Maret 1954, hlm. 109

¹⁰² *Ibid*, hlm. 110

¹⁰³ Saat itu bersamaan waktu dengan masalah penggantian Stalin dan “likwidasi Beria” (tokoh partai komunis Rusia) pada tanggal 10 Juli 1953 yang dituduh “agen imperialis internasional” dan “borjuis merosot”. Pembersihan dalam partai di Moskow, diikuti oleh Korea Utara, RRC, dan Jepang. Aidit mengatakan, “Likwidasi Beria, hendaknya menjadikan peringatan bagi gerakan-gerakan massa nasional maupun internasional.” Kemudian Aidit melakukan pembersihan khususnya pada pimpinan tua. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* (Jakarta: Penerbit: Antar Kota, 1989), hlm. 60

membuat kesalahan dan sangat merusak pertumbuhan partai dan pertumbuhan gerakan revolusioner.¹⁰⁴ Ia dianggap cukup merepotkan dengan tindakannya hendak membangkitkan Partai Sosialis secara terpisah. Tan Ling Djie di beri kesempatan sampai Kongres Partai ke V untuk "memproletarisasikan" ideologinya. Kongres Nasional yang diadakan PKI tahun 1954 Wikana dipecat dari PKI dan Alimin (mundur karena alasan kesehatan), mereka berdua adalah guru politik Aidit juga tidak dipilih lagi sebagai anggota Komite Central.¹⁰⁵ Habislah karir tokoh tua dalam jabatan di Central Komite.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 111

¹⁰⁵ Jacques Leclerc. Aidit dan Partai 1950. Dalam Sobron Aidit: *Aidit, Sahabat dan Guru di Masa Pergolakan* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia), hlm, 162

d. “Razia Agustus” Cobaan Yang Dihadapi Aidit Dimasa Awal Kepemimpinannya.

Strategi yang diterapkan Aidit diawal kepemimpinannya disamping mendapat tentangan dari kawan-kawannya, kelihatannya juga sangat berlawanan dengan peran-peran PKI dibawah kendalinya. Boleh jadi Aidit menjalankan dua cara sekaligus. Sebab kenyataan yang terjadi, sepanjang tahun 1950-1951 Partai Komunis Indonesia menjadi penggerak dalam aksi-aksi pemogokan dan kekerasan.

Pelaku pemogokan umumnya dilakukan oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI), Serikat Buruh Daerah Otonom (SEBDA), Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Partai Komunis Indonesia sendiri yang berdampak buruk bagi situasi politik ketika itu.¹⁰⁶ Bahkan membuat kondisi ekonomi semakin fluktuatif. Karena buruh-buruh sering melakukan pemogokan disarana vital seperti pabrik, perkebunan dan pelabuhan. Pemogokan yang digerakkan oleh SOBSI, semakin meningkat sejak

¹⁰⁶ Melalui SOBSI pada awal tahun 1951, PKI melakukan tekanan terhadap pemerintahan, dengan aksi-aksi mogok di perusahaan-perusahaan, perkebunan milik Belanda, pabrik-pabrik gula, perusahaan-perusahaan minyak dan angkutan kereta api serta perhubungan udara (Garuda Indonesia Airways). Pemogokan umum SARBUPRI dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dimulai tanggal 20 Agustus 1950. Mereka menuntut kenaikan upah yang wajar bagi kaum buruh, dan perbaikan nasib buruh. Sedangkan untuk kasus BTI terjadi di daerah Tanjung Morawa Sumatera Utara khususnya di Sumatera Timur. Berawal dari usaha pemerintah mengambil alih perkebunan yang terlantar yang sebelumnya dikuasai Jepang. Tanah tersebut sudah banyak yang digarap oleh rakyat. Akan tetapi pemerintah justru memberikan peringatan untuk menghentikan penggarapan. Sehingga mendapat perlawanan dari rakyat yang dimotori PKI-BTI. Lebih lengkapnya lihat: Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III* (Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009).

meletusnya perang Korea pada bulan Juni 1950. Pemogokan ini merupakan upaya boikot kelompok komunis dan bertujuan memberikan dukungan kepada Korea Utara. Dampaknya barang-barang tidak dapat diekspor ke luar negeri. Sehingga perekonomian negara semakin merosot dan menjadi ancaman bagi kepentingan nasional.¹⁰⁷

Pada tanggal 13 Februari 1951 Perdana Menteri Natsir mengeluarkan Dekrit Militer No.1 untuk meredam pemogokan. Yang isinya sebagai berikut:

“Barang siapa menjalankan pemogokan atau memerintahkan, menganjurkan, mengajak, memaksa atau memancing supaya diadakan pemogokan atau penutupan di dalam perusahaan, jawatan atau badan vital dapat dihukum kurungan (hechtenis) setinggi-tingginya satu tahun, denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah”.¹⁰⁸

Ternyata keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menambah keadaan lebih baik tetapi semakin buruk. Karena pemogokan semakin mengarah kepada kekerasan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Subhan Sd, *Langkah Merah.....*, hlm. 31

¹⁰⁸ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III* (Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 15. Dikutip dari *Sin Po*, 15 Februari 1951.

¹⁰⁹ Pada bulan Juni-Agustus 1951, serangkaian pemogokan terjadi, sebuah granat tangan dilemparkan kepada suatu kerumunan massa di Bogor, suatu gerombolan bersenjata melakukan penyerangan ke pos polisi Tanjung Priok, dan kasus-kasus tanah yang menimbulkan kerusuhan di daerah Sumatera Timur. Dalam kasus penyerangan di Tanjung Priok tersebut sering ditemukan lambang-lambang berwarna merah dan lambang palu arit sehingga tersiar kabar bahwa dibalik kasus-kasus tersebut PKI terlibat di dalamnya. Lihat MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*

Kabinet Natsir memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Kabinet Natsir merupakan Kabinet koalisi. Di masa kepemimpinannya, sempat diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda tanggal 4 Desember 1950 mengenai pengembalian Irian Barat. Akan tetapi perundingan tersebut mengalami jalan buntu. Hal ini menimbulkan mosi tidak percaya dari Parlemen terhadap Kabinet. Krisis menjadi lebih mendalam dengan adanya mosi Hadikusumo (PNI) sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang pemilihan anggota perwakilan daerah supaya lebih demokratis. Undang Undang No. 39 yang dikeluarkan pada masa Kabinet Hatta (RIS) menentukan pemilihan secara bertingkat. Mosi ini diterima Parlemen yang menyebabkan Menteri Dalam Negeri Assaat mengundurkan diri, namun ditolak oleh Kabinet. Natsir mengingatkan Parlemen bahwa pembentukan lembaga-lembaga perwakilan daerah menurut PP No. 39 itu sudah disetujui Parlemen. Hubungan Kabinet dengan Parlemen menjadi tegang. Sementara itu, tanggal 20 Maret 1951 Partai Indonesia Raya (PIR) yang merupakan partai pendukung Kabinet menarik Menteri-Menterinya dari Kabinet. Sehari kemudian, tanggal 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Berdasarkan keputusan

(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 482. Lihat juga *Indonesia Raya*, tanggal 9 Agustus 195.

Presiden No. 43 tahun 1951, maka sejak 21 Maret 1951 Kabinet Natsir didemisionerkan, sambil menunggu Kabinet baru dibentuk.¹¹⁰

Perdana Menteri berikutnya (April 1951-Februari 1952) adalah Sukiman Wirjosandjojo. Sukiman yang menggantikan Natsir membicarakan masalah aksi-aksi kekerasan selama ini dengan Presiden Soekarno. Pembicaraan tersebut diisukan sebagai usaha menetapkan langkah-langkah bagi pelarangan PKI. Akhirnya pemerintah memutuskan bahwa PKI memang bersalah, suatu tuduhan yang diingkari oleh Aidit.¹¹¹ Jaksa Agung dan ketua Mahkamah Agung selanjutnya mengeluarkan perintah penangkapan sebagai berikut:

- a) Membaca surat perintah tanggal 13 Agustus 1951, No. 13491/ Amat Rahasia di mana dinyatakan oleh pemerintah bahwa berhubungan dengan situasi yang menghangat dewasa ini dianggap perlu secepatnya mengambil tindakan untuk menahan orang-orang yang dianggap berbahaya.
- b) Membaca laporan-laporan yang berisi bahwa akhir-akhir ini telah disusun suatu rencana untuk melancarkan *coup de'etat* di Jakarta dan sekitarnya yang akan disertai dengan penculikan para Menteri dan pegawai tinggi.

Menimbang dan mengingat pasal 56 RG. Bahwa untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum, maka menganggap perlu sekali mengadakan penggeledahan terhadap rumah dan kantor yang dianggap berbahaya serta

¹¹⁰ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Edisi Pemutakhiran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 308-309

¹¹¹ Aidit mengatakan bahwa “serangan” terhadap pos Polisi di Tanjung Priok dianggap provokasi. Karena oleh pemerintahan Sukiman diproklamasikan sebagai “serangan komunis” dan dijadikan alasan untuk melarang PKI melakukan aksi-aksi selama ini. Selengkapnya lihat DN. Aidit, *Lahirnya PKI dan Perkembangannya* (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1955), hlm. 41

menangkap dan menahan orang-orang yang dicurigai sambil menunggu perintah selanjutnya.¹¹²

Pada tanggal 15 Agustus 1951 Perdana Menteri Sukiman melakukan razia massal terhadap orang-orang komunis diseluruh Indonesia.¹¹³ Razia berawal di Jakarta.¹¹⁴ Pemerintah menahan 16 anggota Parlemen yang umumnya wakil PKI (salah satunya adalah ayah Aidit yang menjadi anggota sebuah partai kecil), sedangkan 6 orang pegawai tinggi Kementerian Perburuan yang berhaluan komunis dikenakan tahanan rumah, dan seorang editor surat kabar pro komunis *Sin Po* ikut ditangkap. Beberapa hari kemudian razia meluas ke seluruh Pulau Jawa. Sekitar 200 orang ditangkap yang terdiri dari anggota PKI, SOBSI, BTI, dan orang-orang Cina pro-Peking.¹¹⁵ Dalam razia sampai akhir bulan Agustus 1951 pemerintah menahan sekitar 2.000 orang. Angkanya bertambah menjadi ribuan orang

¹¹² Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III* (Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 22. Dikutip dari *Keng Po*, 16 Agustus 1951.

¹¹³ Menurut Jacques Leclerc tindakan intimidasi tersebut antara lain ditujukan untuk mempermudah diterimanya Undang-Undang Perburuan yang sangat kontroversial (Jacques Leclerc. Aidit dan partai tahun 1950. Dalam *Prisma*, 7 Juli 1982, hlm. 74. Sedangkan menurut Sukiman razia tersebut adalah tindakan preventif terhadap ancaman yang sangat berbahaya. Dikarenakan ada pihak-pihak tertentu yang hendak mengacaukan keamanan, dan hendak membunuh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta adanya organisasi “kran” yang digerakkan ekstrim kiri dan mendapat dukungan dari luar negeri. (Dikutip oleh Subhan Sd dari Surat kabar *Harian Rakyat*, 30 Oktober 1951).

¹¹⁴ Sebelumnya, pada tanggal 11 Agustus 1951, para pemimpin PKI di Medan ditangkap. Beberapa hari kemudian baru menyusul suatu gelombang penangkapan besar-besaran di Jakarta. (MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 482

¹¹⁵ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 32

pada akhir bulan November. Pemerintah menyebut sampai pada akhir bulan Oktober 1951 orang yang ditahan sebanyak 15.000 orang.¹¹⁶

Tokoh-tokoh kiri yang tertangkap dalam Razia Agustus diantaranya Tjugito, K. Werdojo, Peris Pardede, Tan Ling Djie, dan Siaw Giok Tjan. Sementara Alimin Prawirodirdjo minta perlindungan RRC, sedangkan Aidit¹¹⁷, serta golongan muda lainnya menghilang.¹¹⁸

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan beberapa Undang-Undang Darurat untuk mencegah aksi-aksi pemogokan kembali. Diantaranya pada tanggal 17 September 1951 Pemerintah mengeluarkan berlakunya kembali larangan mogok yang telah ditetapkan oleh Kabinet terdahulu (Natsir). Disusul kemudian UU Darurat No. 16, yang merupakan cara penyelesaian yang harus ditempuh apabila terjadi sengketa buruh. Tanggal 18 September 1951 pemerintah mengeluarkan peraturan tambahan/informasi No.2 yang melarang pegawai negeri melakukan tindakan-tindakan yang merugikan

¹¹⁶ Herbeth Feith, *The Decline of Constitutional Democracy In Indonesia* (Jakarta: Equinox, 2007), hlm. 189. Lihat juga: MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 483. Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism: A History*, (New York: Penerbit: Frederick A. Praeger, 1963), hlm. 156

¹¹⁷ Menurut pengakuan Sobron Aidit. Selama terjadi “Razia Agustus” yang dilakukan oleh Perdana Menteri Sukiman, Aidit dalam keadaan menyamar sering menemuinya di tempat kos-kosannya di daerah Matraman Raya No. 25 Jakarta. Untuk Lebih jelasnya lihat: Sobron Aidit, *Abang, Sahabat dan Guru di Masa Pergolakan* (Bandung: Penerbit: Yayasan Nuansa Cendekia, 2003). Lihat juga Kumpulan Cerpen Sobron Aidit, *Razia Agustus* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹¹⁸ Subhan Sd, *Langkah Merah.....*, hlm. 33

pemerintah. Peraturan ini tujuannya untuk mengurangi pengaruh SOBSI dalam Serikat Buruh Pegawai Negeri.¹¹⁹

Perdana Menteri Sukiman mengeluarkan pernyataan kepada wartawan *New York Times*, bahwa komunisme di Indonesia tidak banyak dan pemerintah telah berhasil mematahkan setiap langkah dari gerakan mereka. Penangkapan yang dilakukan adalah upaya untuk mengikis komunisme di Indonesia.¹²⁰

Razia Agustus yang dilakukan ternyata menimbulkan masalah, karena orang-orang yang anti komunis ikut pula tertangkap. Sehingga muncul protes dari berbagai pihak, seperti Sutan Syahrir dari Partai Sosialis Indonesia. Pihak PSI mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, namun mosi PSI ditolak oleh parlemen dengan perbandingan suara antara 91 lawan 21 suara. Mr. Sunarjo (PNI) meminta pemerintah agar terdakwa yang tidak bersalah segera dilepaskan, dan yang salah diadili dalam sidang terbuka di muka hakim dengan pembelaan secukupnya.¹²¹ Parlemen juga menuduh pemerintah telah melanggar hak azazi manusia. Akan tetapi mayoritas anggota parlemen menerima penjelasan mengenai serangkaian kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah guna mengatasi situasi krisis. Situasi ini dimanfaatkan pula oleh Aidit. Aidit memberikan penjelasan

¹¹⁹ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III* (Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 26

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 27. Dikutip dari *Harian Rakyat*, 23 Oktober 1951.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 89

mengenai peristiwa ini. Ia mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan resep klasik kaum reaksioner untuk menghancurkan rakyat.

Di parlemen, terjadi reaksi dari fraksi PKI terhadap tindakan Kabinet Sukiman. Ir. Sakirman (Ketua Fraksi PKI), Ny. Mudigdo (Anggota Fraksi PKI), dan Sidik Kertapati (Tani) memprotes keras penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang PKI, dan meminta supaya para tahanan tersebut segera dikeluarkan dan direhabilitasi. Sidik Kertapati menyatakan perlakuan-perlakuan para petugas pemerintah sewaktu itu ditahan sangat tidak demokratis tetapi fasistis, sedang Nyonya Mudigdo mengatakan bahwa penangkapan-penangkapan dilakukan tanpa dasar hukum.¹²²

Dengan munculnya protes-protes dari berbagai kalangan, akhirnya Menteri Kehakiman Muh. Yamin membebaskan 950 tahanan Razia Agustus yang dilakukan oleh Pemerintah Sukiman.¹²³

¹²² *Ibid.*

¹²³ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, Edisi Pemutakhiran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 309

BAB VII
STRATEGI AIDIT MENGEMBANGKAN PARTAI KOMUNIS
INDONESIA PASCA PEMBERONTAKAN MADIUN 1948 HINGGA
PEMILU 1955

A. Membangun PKI Menjadi Partai Massa.

Dimasa kepemimpinan Alimin, ia berusaha membangun PKI sebagai partai kader. Ia menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan selektif untuk mendapatkan kader yang cakap dan berkualitas serta militan. Ia tidak terpaku pada faktor massa. Alimin tidak ingin mengulangi kekeliruan yang selama ini terjadi, yakni seperti dilakukan Musso yang terpaku pada massa namun lemah secara ideologi, sehingga mudah saja dihancurkan. Akan tetapi, belum sempat ia menjalankan keinginannya, posisi kepemimpinannya digantikan oleh Aidit yang justru bertolak belakang dengan keinginan Alimin.

Aidit serta tokoh PKI muda lainnya justru bertentangan dengan kebijakan Alimin, mereka justru menghendaki partai PKI sebagai partai massa. Mereka takut jika PKI dijadikan partai kader, maka PKI menjadi partai yang teralienasi dan tidak populer di masyarakat. Meskipun partai massa, Aidit justru menghendaki partai tersebut menjadi partai yang kuat dan tidak mudah goyah. Kongkretnya adalah menggalang berbagai kekuatan massa, tetapi menjadikannya sebagai kader-

kader yang militan dan berkualitas. Garis kebijakan Aidit ini boleh dikatakan sebagai garis tengah.

Garis kebijakan yang ditempuh Aidit sejalan dengan garis Komunis Internasional yakni garis kanan (Stalin) sejak tahun 1952. Strategi politik garis lunak, sangat cocok bagi keadaan partai yang masih lemah setelah pemberontakan PKI Madiun 1948. Aidit setelah mengadakan analisisnya kemudian mengambil kesimpulan:

- Bahwa strategi yang disusun harus strategi jangka panjang karena kekuatan politik lain tidak akan memberikan tempat kepada PKI dalam pemerintah seperti dalam masa sebelum pemberontakan Madiun.
- Bahwa PKI harus meluaskan massanya dengan jalan membentuk organisasi-organisasi massa yang meliputi kaum buruh, kaum tani, seniman, pemuda, mahasiswa, wanita, veteran dan lain-lain.
- Bahwa PKI perlu menunjukkan toleransi dan kerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak anti-komunis.¹

Hal yang terakhir merupakan implementasi garis front persatuan nasional. Dalam pelaksanaan front persatuan nasional digambarkan sebagai persatuan dalam bentuk persahabatan dan kerjasama antara PKI dengan kekuatan-kekuatan non komunis. Aidit kemudian mencanangkan PKI sebagai partai massa yang berpangkal pada kaum buruh dan tani. Menurut Poedji R. Soegiri sebagaimana yang dikutip oleh Subhan mengatakan:

¹ Soetopo Soetanto, PKI dan Gerakan Komunis Internasional. Dalam Alex Dinuth. *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis :Kumpulan tulisan terpilih tentang gerakan komunis dan bahaya ekstrim lainnya di Indonesia* (Jakarta: Penerbit: Intermasa, 1997), hlm. 188

“Untuk mendapatkan dukungan dari kaum tani, Aidit telah “memperbaiki” nasib mereka dengan mengajukan “kenaikan upah” dan “perubahan tanah” bagi mereka, disamping melakukan “turba” (turun ke bawah) ke desa-desa. Sedangkan untuk memperoleh dukungan dari golongan buruh, Aidit telah mengajukan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut antara lain adalah kursus pemberantasan buta huruf, kursus masak-memasak, kerajinan tangan, pembentukan olahraga, musik, dan seni drama, disamping tugas pokok untuk menyelenggarakan kursus-kursus politik dan pengetahuan umum”.²

Gerakan massa yang dijalankan oleh Aidit pada dasarnya berpedoman pada struktur kuantitas, merekrut anggota secara besar-besaran. Partai Komunis Indonesia dalam keadaan demikian dapat diklasifikasikan sebagai partai massa (*mass party*).

Dalam rangka penggalangan front persatuan nasional, Aidit berusaha mendekati berbagai organisasi massa. Hasil kerja keras Aidit, Njoto dan Lukman berhasil menguasai Barisan Tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Organisasi Veteran, Wanita, Pemuda, pelajar, Seniman dan Budayawan.³

² Poedji Rahajoe Soegiri. 1985. Beberapa Pokok Pemikiran Mao Zedong di Bidang Gerakan Politiknya dan Pengaruhnya Pada Aidit (1951-1965). *Persepsi*, No. 1/ Th. VII, hal 68-69. Dalam ² Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 45. Lihat juga Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III*, (Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 12

³ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia.....*, hlm. 13

1. Menguasai Organisasi Buruh

SOBSI adalah organisasi buruh yang federatif di mana organisasi-organisasi buruh bergabung di dalamnya. Sekalipun organisasi ini berjuang untuk kepentingan buruh, namun sejak didirikan pada tahun 1945 pimpinannya direbut dan dikuasi oleh orang-orang komunis. Organisasi buruh yang tergabung dalam SOBSI adalah: Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI), Serikat Buruh Gula (SBG), Serikat Pegawai Daerah Autonum (SEPDA), Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SPBU), Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKSB), Serikat Buruh Pos dan Telegraf (SBPTT), Serikat Buruh Angkutan Udara (SERBAUD), Serikat Buruh Kapal Dok dan Pelayaran, Serikat Buruh Film Indonesia (SARBUFIS) dan sebagainya. Sejak bulan Maret 1952, PKI mulai menancapkan pengaruhnya dalam tubuh SOBSI. PKI mengadakan disiplin partai atau pembersihan terhadap pimpinan SOBSI yang bukan komunis. Pimpinan SOBSI yang tidak setuju dominasi komunis kemudian disingkirkan. Sejak tanggal 1 Maret 1952 CC PKI menyerukan agar SOBSI memainkan peranan dalam front nasional, dan karakter radikal SOBSI diperbaharui untuk mendukung politik front persatuan nasional. Pada bulan November 1954 secara umum kepemimpinan SOBSI dari tingkat yang paling tinggi sampai terendah sudah didominasi oleh orang-orang PKI.⁴

⁴ *Ibid*, hlm. 61-65

2. Menguasai Organisasi Tani

Di awal kepemimpinan Aidit, pada bulan Januari 1951, PKI telah berhasil menguasai tiga organisasi petani yaitu Rukun Tani Indonesia (RTI), Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Serikat Tani Indonesia (SAKTI). Pada tanggal 14-20 September 1953 BTI dan RTI mengadakan kongres bersama yang kemudian kedua organisasi sepakat bergabung di bawah satu nama BTI. Kemudian disusul dengan SAKTI setelah mengadakan kongres pada bulan Juni 1955 yang juga bergabung dan meleburkan diri ke dalam BTI. Dengan demikian petani mempunyai organisasi yang lebih kuat dan dapat menghasilkan kebijaksanaan yang tunggal serta pengawasannya oleh PKI lebih intensif dapat diusahakan.⁵

Setelah kongres, pada kepemimpinan baru BTI didominasi oleh orang-orang yang loyal kepada Aidit. Mereka ditugasi mengintensifkan program agraria, sebagai sarana menguasai petani. Dalam program agraria ini PKI melakukan beberapa tuntutan kepada pemerintah seperti: pembagian pupuk, memperbaiki saluran air, memperbaiki kolam ikan dan pemasarannya, pengurangan sewa tanah dan sebagainya. Para kader PKI diinstruksikan agar membantu para petani bila mereka sakit, atau mendapat musibah kematian. Pada kesempatan itu dimasukkan propaganda bahwa segala penderitaan yang mereka alami disebabkan oleh penghisapan dan penindasan para tuan tanah.

⁵ Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 148

Karena akibat penindasan itu, tingkat kesehatan para buruh tani dan petani menjadi sangat buruk. Umur mereka menjadi sangat pendek karena kelelahan, anak-anak mereka bahkan mati sebelum berumur 6 tahun. Istri-istri mereka juga sering meninggal sewaktu melahirkan dan sebagainya.⁶

3. Menguasai Organisasi Pemuda dan Pelajar

Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI juga melakukan pendekatan dengan pemuda dan organisasi massa pemuda. Organisasi massa yang semula bernama Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), lalu pada kongres pemuda di Jakarta tanggal 4-12 November 1950 berubah nama menjadi Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat keanggotaannya terdiri atas pemuda segala lapisan masyarakat. Diantaranya yang terbesar adalah pemuda petani miskin, buruh, karyawan, pelajar dan mahasiswa. Dalam kongres tersebut PKI berhasil menguasai organisasi ini. Sedangkan Wikana kelompok yang menentang Aidit disingkirkan dari Kepemimpinan Pemuda Rakyat.⁷ PKI memperjuangkan tuntutan Pemuda Rakyat beberapa diantaranya yang menyangkut kepentingan buruh muda seperti perbaikan gaji, keamanan kerja dan kondisi kerja, penghapusan diskriminasi gaji berdasarkan jenis kelamin

⁶ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia*....., hlm. 67-69

⁷ *Ibid*, hlm. 70

dan umur, pembagian kebutuhan pokok yang harganya terjangkau dan bea siswa pendidikan dari pemerintah maupun pemilik pabrik.⁸

PKI juga mendekati pelajar. Organisasi pelajar yang didekati adalah Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). IPPI adalah organisasi pelajar yang dibentuk pada bulan September 1945 di Yogyakarta. Pada waktu perang kemerdekaan IPPI aktif memobilisasi para pemuda untuk menentang Belanda. Tahun 1950 Sujono Atmo seorang komunis terpilih menjadi pimpinan IPPI. Sejak saat itu PKI berhasil menguasai beberapa cabang IPPI di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemimpin komunis dari IPPI mengkonsentrasikan kegiatannya pada bidang olahraga, sosial dan budaya dan mereka sering mendapat bantuan dari Pemuda Rakyat.

Pendekatan PKI terhadap mahasiswa kurang berhasil dan hanya sedikit mahasiswa yang tertarik pada ideologi komunis. Banyak faktor yang menyebabkan, salah satunya karna sikap pemimpin PKI yang memusuhi golongan intelektual dan menyatakan bahwa ideologi borjuis dan individualisme dominan dalam universitas.⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 72

⁹ *Ibid*, hlm. 73

4. Menguasai Organisasi Wanita

Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis), didirikan tanggal 4 Juni 1950. Gerwis merupakan hasil peleburan tujuh organisasi wanita yang tersebar di seluruh pulau Jawa. Diantaranya: Rukun Putri Indonesia (Rupindo); Persatuan Wanita Sedar Surabaya; Persatuan Wanita Sedar Bandung; Gerakan Wanita Rakyat Indonesia; Perdjoangan Putri Republik Indonesia; Wanita Madura dan Persatuan Wanita Indonesia.¹⁰

Ketika Gerwis terbentuk, Gerwis sangat lambat menarik dukungan massa kaum wanita. Dikarenakan para pemimpinnya enggan turun ke bawah mendekati wanita miskin. Karena umumnya pemimpin Gerwis dalam status sosial mereka berada pada level kelas menengah. Oleh karena itu Gerwis dikritik habis-habisan oleh para pemimpin PKI. Pada bulan Maret 1954 Gerwis mengadakan kongres di Jakarta. Pada saat kongres Umi Sardjono yang menjadi ketua mengganti nama Gerwis menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Sejak saat itu Gerwani terbuka untuk semua wanita Indonesia.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan oleh PKI untuk menarik simpati kaum wanita disesuaikan dengan tingkat sosial ekonominya. Metode yang digunakan ditujukan kepada tiga kelas sosial, yaitu wanita kelas buruh dan petani, wanita kelas menengah dan wanita kelas atas. Untuk wanita kelas

¹⁰ *Ibid*, hlm. 75-77

¹¹ *Ibid*, hlm. 78

buruh dan petani yang umumnya miskin, PKI mengatakan kemiskinan mereka hanyalah akibat dari penghisapan imperialisme. Masalah kemiskinan yang mereka hadapi dapat dilakukan lewat penyelesaian politik yang dipelopori PKI. Untuk kaum wanita kelas menengah PKI mencoba dengan cara memberikan penerangan mengenai hak-hak mereka dan membantu masalah kepegawaian dan pensiun. Untuk kaum wanita kelas atas, tentunya tidak mudah bagi PKI mendekati mereka dan perlu cara khusus yakni dengan cara menerangkan kepada mereka bahwa komunis itu suatu ideologi yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan sifatnya terbuka.¹²

5. Melakukan Pendekatan kepada Seniman dan Budayawan.

Usaha PKI dalam menarik massa juga dilakukan terhadap para seniman dan budayawan. PKI menganggap potensi kebudayaan bisa dijadikan suatu kekuatan revolusi yang ampuh. Karena alasan tersebut PKI membentuk organisasi : Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) tanggal 17 Agustus 1950 di Jakarta. Pendirinya adalah: Aidit, AS Dharta dan MS Ashar. Slogan yang digunakan adalah “seni untuk rakyat”. Dengan adanya organisasi ini PKI berusaha memasukkan pengaruh marxisme dalam perkembangan kebudayaan, dan sastra Indonesia, disamping itu untuk membangkitkan kesadaran politik dikalangan seniman dan budayawan untuk mengubah nasib para seniman.

¹² *Ibid*, hlm. 76

Para seniman yang tergabung dalam Lekra antara lain: AS. Dharta dan Boejoeng Saleh (aktivis serikat buruh), MS. Ashar, Njoto (anggota CC PKI), SW. Kuntjahjo, Bachtiar Siagian (petualang), Sobron Aidit (pelajar), Bakri Siregar (Guru SMA), Banda Harahap (redaktur Harian Rakyat, Medan).

Usaha lain yang dilakukan PKI untuk menarik seniman masuk kedalam Lekra adalah dengan cara menyediakan berbagai fasilitas yang baik, seperti mengadakan kunjungan ke luar negeri sebagai hasil kerjasama Lekra dan PKI, dengan negara-negara sosialis. Dengan cara ini diharapkan banyak seniman yang masuk ke dalam Lekra.¹³

Gerakan massa yang dijalankan Aidit pada dasarnya berpedoman pada struktur kuantitas, dalam arti merekrut secara besar-besaran. Dalam keadaan demikian maka PKI dapat diklasifikasikan sebagai partai massa. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 82-84

¹⁴ Miriam Budiarto, *Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

B. Ideologi dan Disiplin Partai Pada Masa Kepemimpinan Aidit.

Aidit, seperti juga umumnya pemimpin-pemimpin Komunis, mementingkan pekerjaan di lapangan ideologi partai. Menurut Schurmann sebagaimana dikutip Rex Mortimer, Ideologi adalah “seperangkat ide sistematis dengan sejumlah tindakan yang mengikutinya yang bertujuan melayani tujuan dari penciptaan dan penggunaan organisasi”.¹⁵ Ideologi PKI tidak semenonjol kreativitasnya. PKI selalu menyoroti tugas-tugas politis masa depan sebagai visinya sehingga jarang menemui protes dalam loyalitas doktrin dari pengikutnya karena pengejaran arah yang diputuskan pemimpin dianggap sebagai pengakomodasi terbaik kepentingan mereka.¹⁶

Awalnya kepemimpinan Aidit bekerja dengan konsep front persatuan nasional, strategi yang diadopsi dari Soviet, namun sejak tahun 1954 strategi ini dimodifikasi, dengan meninggalkan peran perjuangan kelas dan tugas menghegemoni untuk menuju front baru aliansi tingkat tinggi dengan PNI, dimana PKI siap menerima status subordinat untuk kurun waktu tidak terbatas. Kecenderungan ideologi PKI semacam ini terus berlangsung selama masa kepemimpinan Aidit. Ideologi PKI bisa dikatakan eklektis, artinya untuk mengkaji seluruh ideologi PKI kita tidak bisa sekadar membandingkannya dengan doktrin-doktrin yang ada, melainkan harus dipahami bagaimana persepsi partai-partai

¹⁵ Rex Maortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 6

¹⁶ Rex Maortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno...*, hlm. 8-9.

Indonesia, dalam hal ini persepsi PKI sebagai partainya orang Indonesia terkait persyaratan yang dibutuhkannya untuk meraih tujuan.¹⁷

Menurut Rex Mortimer “Pemimpin PKI di generasi Aidit cenderung memiliki semangat bebas. Walaupun sedikit terpengaruh dari Moskow dan Peking di awalnya, namun mereka menampilkan peran-peran politis yang orisinal dan khas miliknya contohnya penekanannya pada nasionalisme, konsep-konsep “persatuan” nasional, dan sebagai kerangka bagi front persatuan nasionalnya lebih memanfaatkan perpecahan sosial vertikal daripada horizontal”.¹⁸

Di dalam masyarakat modern, masyarakat kapitalis, pada pokoknya terdapat dua kelas. Kelas kapitalis, yaitu mereka yang memiliki alat-alat produksi, yang tidak bekerja dan hidup dari menghisap kerja kaum buruh. Kelas buruh, yaitu mereka yang tidak memiliki alat-alat produksi, bekerja keras pada kapitalis, tetapi tidak mendapat hasil yang cukup untuk hidup yang layak.¹⁹

Kelas buruh tidak memiliki alat-alat produksi. Kelas buruh bekerja di dalam pabrik-pabrik, bekerjasama dan mengadakan pembagian pekerjaan dengan mempunyai tanggungjawab perseorangan menurut pembagian pekerjaan masing-masing, dan menjalankan produksi secara kolektif. Dalam produksi yang maju di pabrik-pabrik, terpeliharalah kebiasaan kaum buruh untuk bersatu, untuk saling membantu, berorganisasi dan berdisiplin. Untuk perkembangan diri kelas buruh

¹⁷ Rex Maortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno...*, hlm. 11

¹⁸ Rex Maortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno...*, hlm. 13

¹⁹ Depagitprop CC PKI, *Apakah Partai Komunis Itu*. Jakarta 1958.

sendiri, klas buruh harus bersatu dengan massa rakyat pekerja lainnya. Hanya dengan persatuan dikalangan klas buruh dan massa rakyat pekerja lainnya itulah, klas buruh dapat membebaskan dirinya dan selanjutnya membebaskan seluruh massa rakyat pekerja dari penghisapan kapitalisme.²⁰

Klas buruh menaruh perhatian pada perjuangan-perjuangan untuk pembebasan Rakyat pekerja sedunia, pada kemenangan-kemenangan dan kekalahan-kekalahannya. Mereka mengerti, bahwa setiap kemenangan atau kekalahan rakyat pekerja dimana saja adalah berarti kemenangan atau kekalahan mereka sendiri. Jadi kepentingan klas buruh ialah pembebasan semua rakyat pekerja dari kapitalisme. Semua cita-cita dan pandangan-pandangan yang diwujudkan dalam perbuatan untuk mencapai kepentingan klas buruh merupakan ideologi klas buruh. Partai Komunis adalah Partainya klas buruh. Karena itu ideologi Partai Komunis adalah ideologi klas buruh. Setiap anggota Partai Komunis harus memiliki ideologi klas buruh.²¹

Partai Komunis Indonesia adalah barisan depan yang terorganisasi dan bentuk organisasi daripada klas proletar Indonesia. PKI berjuang untuk menciptakan sistim Demokrasi Rakyat Indonesia, sedangkan tujuannya yang lebih lanjut ialah mewujudkan masyarakat sosialis sebagai tingkat permulaan dari

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

masyarakat komunis Indonesia.²² Seluruh pekerjaan PKI didasarkan atas teori-teori Marx, Engels, Lenin, Stalin dan fikiran Mao-Tse-tung. Revolusi Indonesia yang sesuai pada masa Aidit adalah revolusi demokrasi rakyat, yaitu revolusi massa rakyat yang luas, yang dipimpin oleh proletariat dan ditujukan untuk melawan imperialisme, feodalisme dan kaum borjuis komprador.

Revolusi Indonesia mempunyai banyak sekutu baik di dalam maupun di luar negeri. Kewajiban PKI ialah ke *dalam*, mengorganisasi dan mempersatukan kaum buruh, kaum tani, kaum intelektual, pengusaha kecil, pengusaha nasional, warga negara keturunan asing, semua suku bangsa dan semua elemen anti imperialis dan anti feodal; ke *luar*, bersatu dengan proletariat internasional, dengan semua rakyat yang tertindas, bangsa-bangsa yang terjajah dan negara-negara yang memandang bangsa Indonesia sederajat, yang mencintai kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian dunia. Semua itu adalah untuk memajukan Indonesia dari sebuah negeri setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia menjadi negeri merdeka, demokratis, makmur dan maju, untuk mengganti pemerintah tuan-tuan feodal dan komprador dan menciptakan pemerintah rakyat, pemerintah demokrasi rakyat. Pemerintah demokrasi rakyat adalah pemerintah yang mendasarkan dirinya atas massa, suatu pemerintah front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani di bawah pimpinan kelas buruh. Pemerintah demokrasi rakyat adalah pemerintah yang mampu

²² Program Umum Konstitusi Partai Komunis Indonesia, *Bintang Merah*, nomor 2-3 tahun Ke-IX-Februari/ Maret 1954, hlm 112.

mempersatukan semua tenaga anti feodal dan anti imperialis, yang mampu memberikan tanah dengan cuma-cuma kepada kaum tani, yang mampu menjamin hak-hak demokrasi dan menjamin kebebasan beragama bagi rakyat, suatu pemerintahan yang mampu membela industri dan perdagangan nasional terhadap persaingan asing, yang mampu meningkatkan tingkat hidup materil kaum buruh dan menghapuskan pengangguran. Dengan singkat pemerintah demokrasi rakyat adalah pemerintah yang mampu menjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannya melalui jalan demokrasi dan kemajuan.²³

Karena banyaknya kekuatan-kekuatan yang mempunyai kepentingan sebelum masyarakat sosialis tercapai, serta kaum buruh dan tani belum sanggup berdiri sendiri, maka PKI mengusahakan berlangsungnya proses demokrasi nasional. Dalam demokrasi ini PKI bekerjasama dengan golongan-golongan lain yang bukan komunis dalam front nasional.²⁴

Melalui front nasional, PKI melaksanakan usaha-usaha, yaitu *pertama*, membentuk partai massa yang berdisiplin; *kedua*, memobilisasikan dan memimpin kelas-kelas penting dalam masyarakat yang dianggap paling revolusioner yakni buruh, petani dan borjuis kecil serta borjuis nasional yang merupakan klas keempat dalam front nasional; *ketiga*, berusaha menarik toleransi dan kerjasama

²³ Program Umum Konstitusi Partai Komunis Indonesia, *Bintang Merah*, nomor 2-3 tahun Ke-IX-Februari/ Maret 1954, hlm. 113

²⁴ Arbi sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), hlm. 67

sebanyak mungkin dari elemen-elemen politik yang tidak anti kepada komunisme secara terbuka.²⁵

Sejak Aidit memimpin PKI, tindakan yang dilakukannya adalah memperluas anggota. Pada tahun 1950 Aidit mengubah watak partai dari organisasi elite menjadi organisasi massa. Sesuai dengan resolusi komite sentral tentang ‘perluasan keanggotaan partai’ yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 1952.

Dengan demikian, maka dilakukan perluasan baik dari segi keanggotaan dan juga lingkup wilayahnya. Di tahun pertama anggota PKI bertambah dari 8.000 menjadi 100.000 orang. Akhir tahun 1953 anggota PKI mencapai 170.000. Pada bulan November 1954, Aidit mengklaim anggotanya mencapai 500.000 orang anggota dan calon anggota. Meluasnya partai komunis bukan hanya dalam jumlah anggotanya, tapi juga lingkup wilayahnya. Tahun 1951, cabang-cabang PKI hanya ada di pulau Jawa dan Madura. Pada tahun 1954 anggotanya sudah terorganisasikan hampir disemua propinsi.²⁶

Untuk menjadi anggota partai syaratnya adalah warga negara yang sudah berumur 18 tahun, yang menyetujui program dan konstitusi partai, masuk dan bekerja aktif di salah satu organisasi partai, taat kepada putusan-putusan partai dan membayar uang pangkal dan iuran partai, mengunjungi rapat-rapat dan kursus-kursus partai serta membaca penerbitan-penerbitan partai. Pada saat seseorang

²⁵ Arbi sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI...*, hlm. 68

²⁶ Boyd Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-Surat Rahasia Boyd. R. Compton* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1993), hlm. 173

menjadi calon anggotapartai dan pada saat seseorang calon anggota disahkan menjadi anggota partai terlebih dahulu harus melakukan pernyataan dan sumpah partai sebagai berikut:

“ Saya...,menyatakan persetujuan saya pada program dan konstitusi partai, dan dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk menjadi calon anggota/anggota PKI.

“Saya bersumpah akan memenuhi semua kewaaajiban partai: memelihara kesatuan partai; melaksanakan putusan-putusan partai; menjadi contoh dalam perjuangan untuk tanah air dan rakyat; berusaha menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari; meneguhkan hubungan massa dengan partai; berusaha memperdalam kesadaran dan menguasai prinsip Marxisme-Leninisme; berterus terang dan jujur kepada partai; mentaatidisplin partai; menjaga keselamatan partai.

“Demikianlah pernyataan dan sumpah saya kepada Partai Komunis Indonesia, partai yang saya junjung tinggi dan saya cintai’.

PKI menerima saja secara sembarangan pelamar yang masuk menjadi calon anggota PKI. Dengan harapan masa latihan yang keras (6 sampai 24 bulan) bisa mengubah mayoritas pelamar menjadi komunis yang militan dan taat. Dengan demikian, semakin banyak saja jumlah anggota yang masuk. Akan tetapi, menurut persyaratan-persyaratan komunis, ‘kesadaran komunis merosot tahun 1953’, organisasi disusupi oleh mata-mata polisi, dan kejujuran anggotannya sangat diragukan.²⁷

Untuk membasmi para penyusup yang masuk ke dalam partai, PKI melancarkan gerakan studi secara besar-besaran. Gerakan studi mulai dilaksanakan tahun 1952 dan berlanjut dimasa mendatang. Hal yang sama

²⁷ *Ibid*, hlm. 174

sebelumnya dilakukan oleh Partai Komunis Uni Sovyet dan Partai Komunis Cina yang menerapkan ‘gerakan studi’ sebagai teknik pendisiplinan dan pengorganisasian yang harus ada dalam kehidupan partai.

Di masa kepemimpinan Aidit, gerakan studi pertama kali dilakukan tahun 1953 mengiringi kampanye perluasan anggota tahun 1952. Kelompok-kelompok studi tekun mempelajari karya-karya berikut:

The National Question (Stalin)
Dialectical and Historical Materialism (Stalin)
Communist Manifesto (Marx & Engels)
Introduction to Marxist Political-Economy
New Democratic Dictatorship (Mao Ze Dong)
The Mass Line (Liu Shao-qi)
Nationalism and Internationalism (Liu Shao-qi)
Thought, Work, Criticism and Self Criticism (Kian Ling)
On Theory The Nature of The Party
Djalan Rakyat (Aidit)
Tugas Front Serikat Buruh (Aidit)
Djalan Baru (Musso)
Anggaran Dasar Partai Komunis Indonesia
Asal-Usul Dan Perkembangan Partai Komunis Indonesia
*Kebijaksanaan Agraria Partai Komunis Indonesia*²⁸

Partai mewajibkan setiap anggota untuk membaca karya-karya klasik komunis Cina dan Rusia, melakukan diskusi kelompok rutin, penghafalan dogma, ujian, pengakuan dosa tokoh silam, sidang-sidang kritik dan kritik diri, dan kegiatan organisasional ala misionaris di tengah massa.

²⁸ *Ibid*, hlm. 177

Kampanye kedua untuk memperluas anggota dilakukan berdasarkan hasil sidang pleno Komite Sentral pada bulan Oktober 1953, dan berhasil merekrut sebanyak 500.000 anggota pada bulan Oktober 1954. Partai sudah mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan studi pertama guna menatar calon anggota dengan karya-karya klasik elementer. Sementara anggota yang sudah tingkat lanjut mengerjakan perintah lain. Seperti: pergi ke toko buku komunis, untuk mendapatkan bacaan studi lanjutan terutama karya Mao Ze Dong yang sengaja didatangkan dari Beijing dengan jumlah besar.²⁹ Disamping itu setiap anggota juga diwajibkan untuk membaca buklet Aidit tentang “Tan Ling Djie-Isme”.³⁰

Untuk menunjang aktivitas partai, PKI menetapkan sumber-sumber keuangan partai, antara lain melalui iuran anggota, usaha-usaha ekonomi yang produktif, dan sumbangan dari para donator. Uang iuran anggota ditetapkan berdasarkan penghasilan para anggotanya. Ketentuannya sebagai berikut:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tentang Tan Ling Dji-Isme, yang berisi serangan Aidit terhadap Tan Ling Djie yang telah menyimpang ke kanan, waktu itu Tan Ling Djie sudah ditendang dari partai. Bisa dilihat selengkapnya pada majalah *Bintang Merah*, nomor 2-3, tahun ke-IX-Februari/Maret 1954, hlm. 100-111

Tabel 2. Besarnya Fonds Partai.

Penghasilan Bruto (PB)	Besar Iuran
Rp. s/d Rp. 150,00	Rp. 0,50
151,00-250,00	1,00
251,00-350,00	2,00
351,00-450,00	3,00
451,00-550,00	4,00
551,00-650,00	5,00
651,00 ke atas	Minimal 1,5% dari PB

Sumber: CC-PKI, *Konstitusi PKI*, 1951, halaman 54.

Iuran anggota tersebut disampaikan secara langsung oleh anggota, sehingga mereka dididik secara aktif untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap partai. PKI juga melakukan usaha-usaha ekonomis berupa pengumpulan barang-barang seperti beras, kelapa, daun pisang, barang-barang bekas, dan sebagainya yang kemudian dijual kembali. Hasil penjualan tersebut masuk ke dalam kas partai. Kas partai masih ditambah dari penghasilan anggota yang mempunyai kedudukan penting karena privilese dari partai. Selain itu PKI juga mendapat sumbangan dari para donator, seperti Negara-negara Blok Komunis seperti Uni Soviyet dan RRC, serta orang-orang Cina di Indonesia.³¹

Demikianlah, dimasa kepemimpinan Aidit, Partai telah menyelenggarakan pendidikan untuk calon dan anggota partai dengan serius. Mayoritas anggota partai

³¹ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 50-51

yang terangkul adalah para buruh dan tani. Mereka melewati masa studi dan latihan selama enam bulan untuk bisa menjadi anggota tetap PKI.

C. Strategi Aidit: PKI Menggalang Front Persatuan Nasional.

Sekembalinya dari Moskow dan RRC (Republik Rakyat Cina) pada tahun 1952, Aidit melontarkan konsep yang dikenal dengan “*Djalan ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia*”. Melalui konsep ini D.N Aidit sekaligus menegaskan jalan yang revolusioner disamping cara-cara yang parlementer. PKI dibawah kepemimpinan Aidit berusaha menyatukan kembali semua potensi komunisme Indonesia setelah pemberontakan yang ia sebut sebagai “Provokasi Madiun”. Dalam konsepsi “Djalan Ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia”, Aidit menyampaikan tentang pembahasan kritik dan otokritik partai setelah razia Agustus 1951. Ia juga menjelaskan tentang pentingnya perluasan keanggotaan dan organisasi partai untuk membangun kekuatan partai.

Aidit menerangkan tentang dua kewajiban urgen yang harus dilakukan partai yakni: menggalang kekuatan front persatuan nasional antikolonialisme yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani serta meneruskan pembangunan PKI yang meluas di seluruh negeri dan mempunyai karakter massa

yang luas, yang sepenuhnya dikonsolidasikan dilapangan ideologi, politik, dan organisasi.³²

Munculnya Aidit membawa warna baru bagi gerakan partai dengan melakukan interpretasi terhadap ideologi maupun propaganda komunisme. Menurut Aidit, kaum komunis Indonesia jangan mengikuti ajaran marxisme secara dogmatis. Ia menyampaikan bahwa ajaran itu cukup dijadikan pegangan karena yang seharusnya dilakukan oleh kaum komunisme di Indonesia adalah melakukan transformasi ajaran marxisme ke dalam permasalahan kongkrit di Indonesia. Analisis Aidit juga menjalankan strategi kanan yang merangkul kaum borjuis nasional. Sesuai pembabakan periodisasi pembentukan front persatuan nasional yang ia sampaikan, dalam periode kelima pembentukan front persatuan nasional perlu untuk merangkul kaum borjuis nasional. Akan tetapi, ia juga menekankan tentang pentingnya menjaga keseimbangan melihat hal tersebut ia mengatakan:

Periode kelima.....ialah periode dimana persatuan dengan burdjuasi nasional makin bertambah erat, tetapi persekutuan buruh dan kaum tani masih belum dengan kuat. Dengan perkataan lain, partai masih tetap belum mempunyai fondamen yang kuat. Dalam tingkat ini partai dengan keras harus melawan penjelewengan ke kanan yang memberi arti berlebihan kepada persatuan dengan burdjuasi nasional dengan menjetjilkan arti pimpinan kelas buruh dan arti persekutuan kaum buruh dengan kaum tani. Bahaya ini ialah bahaya melepaskan sifat bebas daripada partai, bahaya meleburkan diri dengan burdjuasi. Disamping itu, sudah tentu partai juga harus dengan keras menjegah penjelewengan ke kiri, menjegah sektarisme, yaitu sikap yang tidak mementingkan politik front persatuan nasional dengan

³² Sekretariat Negara RI, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 25

burdjuasi nasional dan memelihara front persatuan itu dengan sekuat tenaga.³³

Bila dicermati perubahan strategi yang dilakukan Aidit, ada dua faktor yang dapat dilihat yang menjadi pemicu. Faktor pertama adalah garis politik komunis Cina yang dikenal dengan nama “*Djalan Mao Tse Tung*”. Komunis Cina menghendaki persoalan disesuaikan dengan kondisi obyektif mereka sendiri karena mereka yang paling mengenal wilayahnya.³⁴ Dalam perkembangannya, pada dasawarsa 1950-an, mulai tampak polarisasi dunia komunis antara Uni Soviet dan Cina. Kedua kubu komunis itu seringkali terjebak dengan perdebatan sengit mengenai arah gerakan komunis dunia. Garis komunis Cina seolah menjadi inspirasi Aidit dalam merumuskan program PKI. Faktor kedua adalah berbagai pengalaman sejarah pahit PKI dalam kasus Madiun 1948 dan razia Agustus 1951 yang membuat Aidit harus memikirkan keselamatan partainya. Dalam wadah front persatuan nasional tersebut, PKI berusaha menunjukkan kesan nasionalis dan patriotis serta memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan dukungan massa yang luas.

Sejak awal tahun 1951, terjadi perubahan garis kiri (Zhdanov) ke garis kanan (Stalin). Setelah setahun melalui masa percobaan, garis kanan secara formal disahkan pada Kongres Partai Bolshevik ke-19 yang diadakan dari tanggal 5-14

³³ DN. Aidit, *Djalan ke Demokrasi Rakyat Bagi Indonesia*, hlm. 248

³⁴ Lebih lengkapnya baca Priyanto Wibowo, *Mao dan perubahan sosial dipedesaan Cina 1949-1959. Kebijakan-Kebijakan Untuk Menuju Masyarakat Baru*, Depok: *Disertasi* tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2006.

Oktober 1952. Pada kesempatan ini Stalin meletakkan garis kanan baru, tentang kerjasama dengan gerakan nasional atau gerakan non komunis lainnya. Intinya adalah berselimutkan nasionalisme, dengan cara *united front kolaborasi* dengan non komunis, serta kerjasama dengan nasionalis untuk melawan imperialisme AS di Eropa dan imperialisme barat di negara-negara sedang berkembang. Hal ini mengakibatkan para pemimpin komunis di Indonesia lebih leluasa untuk bertindak berdasarkan tanggung jawab sendiri.³⁵ Disamping itu, di Cina telah berhasil merumuskan garis perjuangannya sendiri yang dikenal dengan “Jalan Mao Tse Tung”. Cina menghendaki penyelesaian persoalan ditinjau dari pihak mereka sendiri dan dengan tegas menyatakan bahwa Marx dan Lenin bukanlah orang Asia sehingga mereka tidak mengenal dan tidak bisa memecahkan persoalan Asia.³⁶

Perkembangan baru tersebut memacu Aidit untuk menerapkan strategi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Aidit lalu melakukan gerak manuver dalam menjalankan garis politik partai, yaitu dengan ditandai adanya perubahan strategi. “Strategi kiri” yang selama ini dijalankan diubah secara radikal menjadi “strategi kanan”. Akibat Pemberontakan Madiun 1948 dan razia Agustus 1951, PKI mengalami kehancuran. Aidit selaku Sekretaris Jenderal CC PKI menyadari bahwa PKI masih lemah. Aksi-aksi dan tindakan kekerasan yang diuji cobakan dari

³⁵ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III* (Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 37. Lihat juga Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* (Jakarta: Penerbit Antar Kota, 1989), hlm. 57-58. Serta Soetopo Soetanto: *PKI dan Gerakan Komunis Internasional*. Dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis* (Jakarta: Penerbit: Intermassa, 1997).

³⁶ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 42

bawah selama ini, gagal secara politis maupun gerakannya. Oleh karena itulah Aidit menempuh garis kanan sebagaimana yang digariskan oleh Moskow, yaitu jalan legal parlementer dengan dilengkapi taktik merangkul golongan non komunis. Perubahan strategi ke garis kanan yang diikuti oleh DN. Aidit menurut Soetopo Soetanto bukanlah ciptaan Aidit melainkan merupakan garis politik yang telah diletakkan oleh Komunis Internasional, jadi merupakan pengetrapan di Indonesia oleh Partai Komunis Indonesia.³⁷

Aidit menyatakan tekadnya untuk “meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme” dan menempuh taktik komunis yang klasik, yaitu “front persatuan nasional” yang luas dan kuat, yang bersendikan persekutuan klas buruh dan kaum tani.³⁸ Selain itu juga bekerjasama dengan golongan-golongan non komunis dan bersedia mendukung pemerintah (kabinet) sekalipun dianggap borjuasi nasional.

Menurut MH. Lukman yang dimaksud dengan front persatuan nasional oleh PKI ialah front persatuan nasional yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan tani, front persatuan nasional yang dipimpin oleh klas buruh (PKI), front persatuan nasional dimana partai klas buruh yaitu partai komunis bisa tetap mempertahankan kebebasannya dilapangan ideologi, politik dan organisasi, dan

³⁷ Soetopo Soetanto: PKI dan Gerakan Komunis Internasional. Dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis* (Jakarta: Penerbit: Intermassa, 1997), hlm 190

³⁸ Pidato Aidit pada pembukaan Kongres Nasional ke-V PKI. *Bintang Merah*, Nomor 2-3. Tahun ke-IX-Februari/ Maret 1954, hlm. 85

front persatuan nasional yang terbentuk sebagai hasil gerakan rakyat yang seluas-luasnya dan perjuangan revolusioner daripada massa.³⁹

Petani sebagai orang biasa tidak dapat diandalkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di desa-desa. Untuk itu PKI mencari dukungan dari golongan lain. Melalui front nasional, PKI melaksanakan usaha-usaha, yaitu *pertama*, membentuk partai massa yang berdisiplin; *kedua* memobilisasikan dan memimpin kelas-kelas penting dalam masyarakat yang dianggap paling revolusioner yakni buruh, petani dan borjuis kecil serta borjuis nasional yang merupakan kelas keempat dalam front nasional; *ketiga* berusaha menarik toleransi dan kerjasama sebanyak mungkin dari elemen-elemen politik yang tidak anti kepada komunisme secara terbuka”.⁴⁰

Kebijaksanaan front nasional ini diambil, juga didasarkan pada pertimbangan praktis, seperti kesulitan PKI dalam mengembangkan kader di pedesaan karena petani yang miskin tidak mempunyai keahlian untuk dijadikan kader. Karena itu terpaksa dicari dari kalangan golongan tani kaya dan menengah. Walaupun mereka dibarengi dengan kemungkinan kelemahan-kelemahan, seperti

³⁹ MH. Lukman. Tentang Kesungguhan Menggalang Front Persatuan Nasional, *Bintang Merah*, Nomor 2-3. Tahun ke-IX-Februari/ Maret 1954, hlm. 49-56

⁴⁰ Arbi Sanit. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta: Penerbit pustaka pelajar, 2000), hlm. 68

mengambil tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Disamping itu berarti dapat pula mengharapkan dari mereka bantuan/ sumbangan materi.⁴¹

“Garis Kanan” diterapkan Aidit di Parlemen dengan memberikan dukungan kepada Kabinet Baru setelah jatuhnya Kabinet Sukiman pada tanggal 23 Februari 1952.⁴² Pada tanggal 22 April 1952 PKI mengeluarkan pernyataan yang mendukung Kabinet Wilopo (PNI), beberapa hari kemudian PKI melarang SOBSI⁴³ untuk tidak melakukan aksi-aksi pemogokan. Dukungan PKI kepada Kabinet Wilopo kembali diperkuat dan dinyatakan oleh CC PKI dalam surat kabar *Harian Rakjat* tanggal 14 Juli 1952.⁴⁴ Dukungan terhadap Kabinet Wilopo juga disampaikan oleh Ir. Sakirman (Ketua Fraksi PKI) dan K. Werdoyo (Ketua Fraksi Buruh di parlemen) dalam sidang parlemen tanggal 19 Juni 1952. Mereka

⁴¹ *Ibid*, hlm. 70

⁴² Jatuhnya Kabinet Sukiman disebabkan karena adanya persetujuan *Mutual Security Act* (MSA) antara Menteri Luar Negeri Mr. Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran di Indonesia. Fraksi PKI dari PKI, Ir. Sakirman berpendapat bahwa negara-negara yang menerima MSA, akan kehilangan kedaulatan, kemerdekaannya dan dengan demikian akan menjadi negara jajahan Amerika dimana akan dapat dilakukan eksploitasi sepenuhnya atas kekayaan benda dan tenaga manusia negeri-negeri yang terjajah itu untuk kepentingan peperangan dunia yang baru. Tanggal 21 Pebruari 1952 Menlu Mr. Soebardjo mengundurkan diri. Akibat peristiwa itu Sukiman mengalami krisis. Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III* (Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 90. Dikutip dari *Sin Po*, 23 Pebruari 1952.

⁴³ Pada tanggal 8 April 1952, Sekretaris BIRO SOBSI menyampaikan surat kepada Perdana Menteri Wilopo dan menyatakan harapan dan selamat atas terbentuknya Kabinet Wilopo tersebut. Pada tanggal 30 April 1952, SOBSI menanggukkan pemogokan, sesuai dengan garis Aidit, yaitu “Strategi Kanan” maka aksi-aksi pemogokan berakhir.

⁴⁴ Isi pernyataan tersebut antara lain untuk mencegah kembalinya kepemimpinan Sukiman dan Hatta. Karena PKI menganggap mereka melaksanakan politik Amerika di Indonesia. PKI akan tetap memberikan dukungan kepada Kabinet Wilopo dengan catatan bahwa Kabinet tersebut tetap progresif dan antifasis. Lebih jauh lagi PKI melihat beberapa kemungkinan dalam Kabinet Wilopo: 1. Adanya kelonggaran hak-hak demokrasi sehingga memudahkan rakyat berjuang demi perbaikan nasib serta penggalangan organisasi. 2. Dicabutnya SOB (*Staat van Oorlog Beleg*) atau keadaan darurat perang, yang berarti terbuka kemungkinan bagi rakyat di daerah untuk melawan tindakan-tindakan yang tidak demokratis. 3. Hak-hak parlemen semakin besar diakui, sehingga semakin besar pula peluang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat agar pemerintah melepaskan politik luar negeri yang tergantung pada pihak asing (Dikutip oleh Subhan Sd dari, *Harian Rakjat*, 14 Juli 1952).

mengemukakan pendapat dan memuji bahwa Kabinet Wilopo lebih demokratis daripada kabinet-kabinet sebelumnya.

Dalam pembentukan front persatuan nasional Aidit kemudian memberikan tugas kepada Alimin. Alimin kemudian mendekati pimpinan tertua Masyumi sekaligus rekannya waktu di SI yakni H. Agus Salim untuk diajak bekerjasama, H. Agus Salim sangat gembira bertemu dengan Alimin yang sudah sejak tahun 1920 tidak pernah bertemu, akan tetapi H. Agus Salim waspada akan maksud Alimin dan menolak ajakannya. Kemudian Alimin menghubungi PSI akan tetapi hasilnya juga tetap sama. Berbeda dengan Masyumi dan PSI, kali ini yang didekatinya adalah ketua PNI Sidik Djokosukarto. Sidik Djokosukarto menerima ajakan Alimin untuk bekerjasama dengan PKI. Menurut pendapatnya kerjasama dengan PKI lebih menguntungkan terutama dalam menghadapi masa-masa kampanye pemilihan umum nanti.⁴⁵

Dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional yang jatuh tanggal 20 Mei 1952, PKI beserta 62 organisasi massanya mengajak PNI untuk ikut ambil bagian dalam panitia bersama. Ajakan ini diterima, lalu terbentuklah suatu komite yang beranggotakan 17 orang. Terdiri dari tokoh-tokoh Front Demokrasi Rakyat seperti Tjugito, Sutanti, Utaryo, serta dari PNI sendiri adalah Sabilal Rasjad. Mereka mengeluarkan statement bersama yang berisi mengharapkan supaya

⁴⁵ Pusjarah TNI. *Komunisme di Indonesia.....*, hlm. 50. Lihat juga Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* (Jakarta: Penerbit Antar Kota, 1989), hlm. 59

kehidupan demokrasi diterapkan pada setiap lapangan kehidupan, dan mengajak semua rakyat untuk bersatu dan bekerjasama merebut kembali Irian Barat.⁴⁶

Disamping mendekati PNI, dalam rangka menjalankan front persatuan nasional PKI juga berusaha mendekati Presiden Soekarno. Ketika diadakan resepsi peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Istana Negara, Alimin hadir dalam acara tersebut sebagai perwakilan dari PKI. Presiden menunjukkan sikap tidak senang terhadap PKI dan kegiatan-kegiatannya.⁴⁷ Presiden kemudian menyerukan kepada Ketua Fraksi PNI di Parlemen yakni Manai Sophian untuk memboikot setiap pertemuan dan aktivitas yang diadakan komite yang sudah dibentuk sebelumnya.

Ketidaksenangan presiden Soekarno ditanggapi secara persuasif. Pada perayaan hari ulang tahun PKI yang ke-32 pada tanggal 23 Mei 1952, Aidit dan Alimin dalam pidatonya mengeluarkan slogan-slogan atau yel-yel "*Hidup Bung Karno, Hidup PKI*". Hal ini dimaksudkan untuk menetralisasi sikap keras Presiden terhadap PKI.

Pada tanggal 3 Juli 1952 di Balai Kota Jakarta Raya PKI dan Ormas-ormasnya, PNI serta Persatuan Marhaen Indonesia (PERMAI) mengadakan pembentukan Panitia Perayaan hari 17 Agustus. Wakil dari PKI Supardi terpilih menjadi Ketua Panitia. Hal ini mendapat reaksi dari Masyumi cabang Jakarta.

⁴⁶ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia*, hlm. 51

⁴⁷ Presiden Soekarno tidak senang karena masih trauma dengan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun dan sekitarnya pada bulan September 1948 serta aksi-aksi pemogokan dan kekerasan sepanjang tahun 1950-1951 yang dilakukan oleh PKI dan ormas-ormasnya.

Masyumi menilai kepanitiaan tersebut sangat bersifat komunistis. Pada tanggal 16 Juli 1952, Masyumi Cabang Jakarta beserta 15 Organisasi Islam mendirikan pula panitia perayaan 17 Agustus, yang dinamakan “Panitia Pembela Hari Proklamasi”. Mereka mengeluarkan pernyataan akan melebarkan dirinya dengan seluruh gerakan-gerakan Islam dan gerakan-gerakan non komunis di Jakarta untuk bekerja membela hari proklamasi menurut isi yang sebenarnya.⁴⁸ Supardi, sebagai Ketua Panitia, anggota PKI, mundur dan meminta maaf karena tak ada maksudnya untuk menimbulkan pertentangan antar golongan.

Ketika Kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 2 Juni 1953,⁴⁹ kabinet selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo (Juli 1953-Juli 1955). Dukungan PKI terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo disampaikan dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah dalam sidang pleno terbuka parlemen tanggal 29 Agustus 1953 oleh Ir. Sakirman Ketua Fraksi PKI dalam Parlemen. Selama masa Kabinet Ali, PKI memberikan dukungan penuh kepada PNI. Meskipun pada masa kabinet ini banyak terjadi korupsi namun PKI tetap membela kabinet tersebut.⁵⁰

⁴⁸ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia.....*, hlm. 52

⁴⁹ Jatuhnya Kabinet Wilopo disebabkan karena terjadinya peristiwa Tanjung Morawa tanggal 16 Maret 1953 dan peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa Tanjung Morawa di Medan dianggap merugikan PKI karena usaha pemerintah mengambil paksa tanah perkebunan bekas pemerintah Jepang yang selama ini terlantar dan sudah digarap oleh rakyat sejak lama. PKI, BTI, RTI dan SOBSI berusaha menghalangi usaha pemerintah tersebut. Di Parlemen PKI dan SAKTI mengajukan mosi atau yang dikenal dengan “Mosi Sidik Kertapati” yang menuntut agar pemerintah menghentikan usaha pengosongan tanah tersebut. Mosi ini kemudian menjadi perdebatan di Parlemen. Tanggal 2 Juni 1953 Parlemen mengadakan pemungutan suara terhadap mosi Sidik Kertapati, hasilnya Kabinet Wilopo memutuskan untuk membubarkan diri.

⁵⁰ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia.....*, hlm. 93

Ketika PKI melaksanakan rapat umum di lapangan Tegalle Priangan, Bandung, Aidit dalam pidato yang disampaikannya memberikan alasan mengapa PKI harus menyokong Kabinet Ali. Dalam pidato yang disampaikan Aidit mula-mula Aidit menyampaikan penghargaan terhadap perjuangan rakyat Priangan yang telah berani membasmi para gerombolan pemberontak DI/TII. Dalam rangka Front Persatuan Nasional PKI perlu bekerjasama dengan segala golongan termasuk bekerjasama dengan Masyumi dan PSI.

Kebijakan front persatuan nasional ditegaskan kembali dalam Kongres Nasional PKI ke- V tanggal 16-20 Maret 1954. Sejak saat itu, PKI dengan sungguh-sungguh menggalang front persatuan nasional yang luas dan kuat, yang bersendikan persekutuan kelas buruh dan kaum tani. Demikianlah kebijakan Aidit dan kawan-kawannya dalam rangka melaksanakan strategi front persatuan nasional. PKI melakukan berbagai upaya untuk menarik anggota dan mau bekerjasama dengan pihak-pihak non komunis untuk mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan. Yakni mewujudkan masyarakat komunis tanpa kelas di Indonesia.

D. Strategi Subversi Partai Komunis Indonesia Tahun 1954.

saat Aidit, Lukman dan Njoto berhasil menguasai pimpinan PKI dalam sidang pleno CC PKI tahun 1951, Aidit sebagai Sekjend PKI mencanangkan suatu program baru sebagai ganti program “Jalan Baru Untuk Republik Indonesia” yang pernah diajukan Musso.⁵¹ Strategi baru yang diajukan Aidit dengan nama “Jalan Baru” mengisyaratkan bahwa PKI menempuh/ menjalankan strategi kanan yang berarti melaksanakan jalan damai dan perundingan melalui usaha mengkompromikan masalah di dalam badan perwakilan (terlibat dalam usaha-usaha mempengaruhi dan membuat keputusan politik).⁵²

Namun yang terjadi setelah strategi kanan dicanangkan, pada bulan Agustus 1951 pemerintah Sukiman mengadakan penangkapan-penangkapan “Razia Agustus”. Kemudian pada masa kabinet Wilopo pemerintah bersikap lunak, sehingga PKI bisa berkembang kembali. Masa-masa sulit tersebut dialalui dengan menyembunyikan diri. Kemudian dalam sidang pleno CC PKI pada bulan Oktober 1953, kedudukan Aidit sebagai Sekretaris I CC PKI kembali diperkuat dan hal ini dilakukan pada kongres Nasional ke V pada bulan Maret 1954 yang juga menghasilkan strategi yang diperbaiki akibat peristiwa Agustus 1951.⁵³

⁵¹ Selengkapnya lihat: Musso, *Djalan Baru Untuk Republik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1952.

⁵² Hasil sidang Pleno CC PKI 1951, seperti yang termuat dalam hasil Kongres Nasional PKI Ke V 1954.

⁵³ Zulfikar Gazali, Pola Kepemimpinan PKI 1945-1966. Dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis* (Jakarta: Intermassa, 1997), hlm 162-163

Memahami pola kepemimpinan dapat dimengerti melalui suatu pendekatan yang berlandaskan pada pendapat bahwa kepemimpinan atau pemimpin suatu organisasi/kelompok ditentukan oleh situasi yang membentuknya di samping juga perlu mengetahui adanya kaitan erat antara pemimpin dengan yang dipimpin melalui sifat atau corak dari kelompok-kelompok tertentu.⁵⁴

Situasi pada masa tahun 1954 memerlukan seorang pemimpin PKI yang dapat memenangkan kemungkinan menguasai lembaga perwakilan sebagaimana maksud strategi dasar pada tahun 1951. Pada Kongres Nasional PKI ke V yang diadakan pada bulan Maret 1954 diadakan perbaikan strategi dasar 1951 yang diajukan oleh Aidit dengan nama “Jalan Baru Yang Harus Ditempuh untuk Memenangkan Revolusi”. Strategi ini menghasilkan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) yang pokok-pokoknya meliputi:

1. Perjuangan gerilya di desa-desa dengan kaum tani sebagai intinya.
2. Gerakan “revolusioner” di kota-kota oleh kaum buruh, terutama buruh transport.
3. Pekerjaan partai dikalangan kekuatan bersenjata.⁵⁵

MKTBP merupakan konsep subversi PKI dalam menyebarluaskan pengaruhnya, menetralisasi lawan politik, serta menyiapkan dukungan secara luas di kalangan rakyat Indonesia terhadap program-program PKI. untuk mencapainya,

⁵⁴ Veitchal Rifai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 36-37.

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *gerakan 30 Septembe : Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 37.

disusupkan kader-kader PKI ke dalam partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat dengan tujuan membina anggota-anggota partai politik dan organisasi masyarakat supaya bersedia bersimpati dan masuk menjadi anggota PKI. anggota-anggota atau kelompok yang berhasil dijadikan pengikut PKI tersebut disebut “fraksi”. Di dalam setiap fraksi akan ditunjuk ketua dan sekretaris fraksi. Tugas sekretaris fraksi adalah menerima perintah dari pemimpin komite PKI setempat dan meneruskannya kepada semua anggota fraksi. Dengan demikian, fraksi PKI pada dasarnya merupakan sel PKI yang berada di partai-partai politik dan organisasi masyarakat. Untuk mengikat kesetiaan anggota sel-sel PKI tersebut, setiap anggota partai politik dan organisasi masyarakat yang telah menyatakan diri bersimpati dan menjadi anggota PKI diambil sumpah oleh pembinanya.⁵⁶

Untuk pelaksanaan metode ketiga MKTBP, yakni bekerja secara intensif di kalangan musuh-terutama di kalangan Angkatan Bersenjata- mengingat tingkat kerahasiaannya, maka pelaksanaannya hanya dilakukan oleh kader-kader PKI yang benar-benar terpilih dan sangat terbatas. Oleh Karen itu, Politbiro CC PKI memutuskan untuk hanya memberi wewenang sepenuhnya kepada DN. Aidit selaku ketua CC PKI guna merealisasi metode MKTBP tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, hlm. 37-38.

⁵⁷ Ibid.

Berdasarkan akan kebutuhan dan situasi yang ada, maka pimpinan PKI menjalankan dua pola pembinaan dan pengembangan partai. *Pertama*, untuk kepentingan intern (ke dalam) yang ditujukan kepada kader-kader partai dan dalam pembinaan dan pengembangan organisasi dipergunakan cara modern yang berarti diberlakukannya aturan-aturan yang jelas dan tegas bagaimana jaringan hubungan antara sesama anggota partai, antara sesama pimpinan dan antara anggota dengan pimpinan. *Kedua*, untuk kepentingan ekstern (keluar) yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan dukungan, dipergunakan cara tradisional yang berarti pimpinan PKI mencari dukungan massa melalui kemampuan menggalang kerjasama dengan para pemimpin/ pemuka masyarakat setempat. Usaha pemanfaatan ini dimaksudkan agar program PKI terutama program menggalang kekuatan di desa dapat dijalankan tanpa mengalami gangguan.⁵⁸

Demikianlah dengan strategi Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan dan di bawah pimpinan Aidit, PKI berhasil masuk ke dalam empat besar dalam perolehan suara dalam pemilu 1955.

⁵⁸ Zulfikar Gazali, Pola Kepemimpinan PKI 1945-1966. Dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis* (Jakarta: Intermassa, 1997), hlm 166.

E. Strategi Pemimpin PKI Untuk Memenangkan Pemilu 1955.

Sejarah pemilihan umum di Indonesia sudah dimulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional sudah diumumkan pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada tahun 1946 diselenggarakan pemilihan umum di Keresidenan Kediri dan Surakarta. Pada tahun 1948 BP-KNIP menyetujui undang-undang yang menetapkan sistem pemilihan umum tidak langsung berdasarkan perwakilan proporsional dan memberikan hak pilih kepada semua warga negara yang berusia di atas 18 tahun.⁵⁹ Akan tetapi tidak bisa dilaksanakan, karena setelah Agresi Belanda II selesai, Indonesia belum juga mendapat pengakuan kedaulatan secara penuh, serta adanya rangkaian perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang berujung dengan Konferensi Meja Bundar. Berdasarkan hasil KMB tanggal 27 Desember 1949, barulah Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh.⁶⁰

Keputusan pemerintah mengenai pemilu secara kongkrit tertuang dalam agenda nasional sejak RI dibentuk kembali tahun 1950. Sejak tahun 1950, janji-janji mengenai pemilihan umum nasional sering dikemukakan oleh berbagai kabinet, akan tetapi langkah-langkah nyata kearah itu selalu terhambat oleh beberapa faktor. Termasuk kedalam hambatan itu timbulnya urusan pemerintahan

⁵⁹ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 2

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 3

yang lebih mendesak dan gerakan menentang pemilihan umum yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota parlemen sementara.

Kabinet Natsir dan Sukiman mencanangkan pemilu sebagai program politik, akan tetapi belum dapat dilaksanakan karena kedua kabinet keburu jatuh. Eksperimen pemilihan umum diselenggarakan pada tahun 1951 dan awal tahun 1952 di Sulawesi (Minahasa, Sangir-Talaud, dan Kotapraja Makassar), serta di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶¹ Dari pemilihan umum ini, yang diselenggarakan berdasarkan sistem pemilihan yang berbeda-beda, pemerintah memperoleh banyak pengalaman mengenai masalah-masalah penyelenggaraan pemilihan umum. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional berjalan sangat lambat. Selama delapan belas bulan RUU Pemilu dijadikan permainan bola pingpong antara kabinet dan parlemen. Lalu, pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi peristiwa yang membuat pemilihan umum menjadi persoalan politik yang terpenting.⁶²

Pada masa kabinet Wilopo program pemilu baru menunjukkan kepastian. Pada tanggal 25 Nopember 1952 kabinet Wilopo menyampaikan Rancangan Undang-Undang pemilu kepada parlemen. Lima bulan kemudian, tanggal 4 April

⁶¹ Boyd R. Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1993), hlm. 233-235

⁶² Di pagi buta tanggal 17 Oktober 1952, terjadi demonstrasi oleh tentara, tokoh politik dan orang-orang sipil. Sasarannya adalah gedung parlemen kemudian diteruskan ke Istana Presiden. Jalan-jalan dipenuhi dengan kendaraan tentara dan sipil yang bertuliskan "bubarkan parlemen". Presiden diminta untuk mengambil alih pemerintahan. Akan tetapi Presiden menolak untuk mengambil alih kekuasaan karna Presiden bukan seorang dictator, dan Presiden berjanji akan mempelajari situasi.

1953, RUU pemilu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 1953.⁶³

Daerah pemilihan dibagi menjadi 16, yaitu Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Maluku, dan Irian Jaya. Khusus daerah Irian Jaya tidak bisa dilaksanakan pemilihan karena masih dikuasai Belanda.⁶⁴

Panitia pemilihan Indonesia (PPI) dibentuk berdasarkan keputusan Presiden tanggal 28 Nopember 1953, kemudian PPI dilantik tanggal 28 Nopember 1953. PPI diketuai S. Hadikusumo dan wakil Rustam Sutan Palindih, dengan disertai beberapa anggota. PPI pusat dibantu oleh lembaga-lembaga daerah, yaitu panitia pemilihan ditingkat daerah pemilihan, panitia pemilihan kabupaten ditingkat kabupaten, panitia pemungutan suara di tingkat kecamatan, dan panitia pendaftaran pemilih ditingkat desa. Disamping terdapat 15 daerah pemilihan, juga terdapat 208 daerah kabupaten, 3.141 kecamatan, dan 43.259 desa. Dimasa kabinet Ali Sastro Amidjojo diselenggarakan konferensi panitia pemilihan antar daerah di Bandung.⁶⁵

⁶³ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 55

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 55

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 56

Jumlah penduduk Indonesia saat itu diprediksikan sebanyak 77.987.879, sementara jumlah pemilih yang terdaftar 43.104.464, sedangkan jumlah pemilih yang sah adalah 37.875.299. setiap pemilih boleh menggunakan cara “mencoblos atau menulis” nama calon atau tanda gambar kontestan baik partai/organisasi maupun perorangan.⁶⁶

Pada masa Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo maupun Ali Sastroamidjojo I, rencana untuk mengadakan pemilu selalu gagal. Baru pada waktu kabinet Burhanuddin Harahap, pemilihan umum dapat dilaksanakan. Pemilu diselenggarakan dua kali, pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih dewan perwakilan rakyat. Kedua, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota konstituante (Badan Pembuat Undang-Undang Dasar).⁶⁷

Sebelum dilakukan pemungutan suara ada masa kampanye. Menurut Herbeith Feith, kapan tepatnya kampanye dimulai sangat mustahil ditentukan, tetapi ada dua tanggal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan awal bagi beberapa aspek kampanye. Tanggal 4 April 1953, ketika RUU pemilu disahkan menjadi undang-undang, dapat dianggap sebagai awal kampanye tahap pertama. Sejak hari itu sudah timbul perasaan bahwa kemungkinan besar pemilu tidak akan lama lagi dilaksanakan. Tanggal 31 Mei 1954 bisa dianggap awal kampanye tahap

⁶⁶ Herberth Feith, *Pemilihan Umum....*, hlm. 57

⁶⁷ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI 1950-1959* (Jakarta: Pusjarah TNI dan Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 58

kedua; ketika tanda gambar partai disahkan oleh panitia pemilihan Indonesia, dan dengan demikian terbukalah jalan untuk kampanye berdasarkan tanda gambar.⁶⁸

PKI menjalankan kampanye dengan tiga tema yang menyentuh masyarakat: *pertama*, PKI menampakkan diri sebagai pembela Pancasila. *Kedua*, PKI menampilkan figur Soekarno. *Ketiga*, PKI menampakkan diri sebagai pembela kaum tertindas. Propaganda yang menyentuh rakyat adalah adanya pernyataan bahwa satu-satunya calon presiden PKI adalah Bung Karno. PKI juga membonceng Pancasila untuk mengelabui massa rakyat dalam pemilu. Ketika kampanye foto Presiden Soekarno dipajang dan dibuat dalam ukuran besar.⁶⁹

Semua tokoh-tokoh PKI turun untuk kampanye. Aidit kampanye di daerah Yogyakarta, Semarang, Purwokerto dan Palembang; Lukman kampanye di daerah banyuwangi dan Surabaya; Njoto kampanye di Bandung, Subang, dan Ciamis (Priangan); lalu Sakirman kampanye untuk mahasiswa di daerah Yogyakarta. Aidit sewaktu kampanye di Yogyakarta berpidato yang intinya mencela kabinet Masyumi. Ia berbicara di atas panggung raksasa, yang dihiasi oleh gambar-gambar para seniman yang tergabung dalam pelukis rakyat, gambar palu arit, gambar raksasa DN Aidit sendiri serta foto ukuran besar Presiden Soekarno, guna menarik perhatian masyarakat.⁷⁰

⁶⁸ Herberth Feith, *Pemilihan Umum....*, hlm. 10

⁶⁹ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia.....*, hlm. 58

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 58-59

Aidit mengatakan “kewajiban kaum komunis (PKI) yang pertama-tama ialah menarik kaum tani kedalam “front persatuan nasional”. Untuk mempengaruhi petani, PKI mengadakan propaganda secara besar-besaran dengan tema melenyapkan sisa-sisa feodalisme, dan anti tuan tanah. Kaum tani yang tak bertanah, dan petani yang punya tanah tapi miskin, *diiming-imingi* akan diberi tanah secara cuma-cuma sebagai milik perseorangan mereka, apabila PKI menang dalam pemilihan umum.⁷¹

Janji-janji PKI kepada kaum tani ini, tujuannya untuk membujuk agar petani ‘menusuk’ PKI dalam pemilihan umum nantinya. Propaganda yang dilakukan dengan pembagian tanah terutama bagi petani miskin di Jawa sangat menarik, sehingga para petani mau menjadi anggota BTI atau organisasi massa PKI yang lain.⁷² Landasan utama strategi PKI mendekati kaum tani berdasarkan penafsiran Lenin terhadap marxisme, mengenai petani. Petani disejajarkan dengan kaum buruh. Petani dianggap sebagai golongan yang dieksploitasi melalui faktor-faktor produksi. PKI membedakan masyarakat pedesaan menjadi dua bagian yaitu kelas revolusioner dan kelas reaksioner.⁷³ Yang termasuk kelas revolusioner menurut PKI adalah kelas intelektual desa yang terdiri dari guru-guru desa, para pengrajin dan tukang, pedagang kecil, pekerja kantor, buruh perkebunan, buruh

⁷¹ DN. Aidit, *Djalan ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia* (Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1955), hlm. 368

⁷² Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid 3* (Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa bekerjasama dengan Pusjarah TNI, 2009), hlm. 53

⁷³ Arbi Sanit, Kegiatan PKI di Kalangan Petani Jawa Tengah dan Jawa Timur Pada Tahun 1950-An, *Majalah Persepsi*, Desember 1989, hlm. 148

industri dan petani. Sedangkan yang termasuk kelas reaksioner adalah tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis birokrat dan petani kaya.⁷⁴ Dengan melakukan pendekatan terhadap petani, PKI memperoleh dukungan dalam menghadapi Pemilihan Umum 1955.

Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum, PKI mengeluarkan manifest pemilihan umum. Dalam manifest pemilihan umum dijelaskan bahwa, pemerintah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia adalah ‘pemerintah demokrasi rakyat’. Pemerintah demokrasi rakyat bukan pemerintah sosialis atau pemerintah komunis karena tidak mungkin bisa dilaksanakan di Indonesia. Pemerintah demokrasi rakyat adalah pemerintah yang mampu mempersatukan semua partai dan golongan yang anti feodal dan anti imperialis, pemerintah yang mampu menjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannya, melalui jalan demokrasi dan kemajuan.⁷⁵

Pemerintah ini akan menjamin hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara yang sudah mencapai usia 18 tahun, dan menjamin hak-hak azasi manusia, menjamin kebebasan demokratis dan menjamin kemerdekaan beragama, membatalkan persetujuan KMB, menyita dan menasionalisasi pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan lainnya milik Belanda di Indonesia, mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah yang sah dari republik,

⁷⁴ Aidit, Pokok-Pokok Kesimpulan Dari Riset Hubungan Agraria di Jawa, *Harian Rakyat*, 1 September 1964.

⁷⁵ Manifest Pemilihan Umum PKI, *Bintang Merah*, Nomor 2-3 tahun-IX-Februari/Maret 1954, hlm. 93

dan mengusir semua agen kolonialisme. Pemerintah demokrasi rakyat selanjutnya akan mengadakan peraturan pajak yang ringan untuk yang kecil dan berat untuk yang besar, mengadakan wajib belajar dengan cuma-cuma, menjamin pemakaian dan perkembangan bahasa dan sastra daerah, dan mencurahkan usaha sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki dan menjamin kesehatan rakyat.⁷⁶

Untuk kepentingan kaum tani dan kemajuan pertanian, pemerintah demokrasi rakyat akan menyita semua tanah tuan tanah, asing maupun bumiputra, dan membagi-bagikannya dengan cuma-cuma dan sebagai milik perseorangan kepada kaum tani, pertama-tama kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tani miskin. Pemerintah demokrasi rakyat tidak akan menyita tanah-tanah kaum tani kaya dan akan melindungi tanah-tanah kaum tani sedang. Pemerintah demokrasi rakyat akan menghapuskan rodi, pologoro dan perbudakan-perbudakan feodal lainnya, akan menghapus hutang-hutang kaum tani, nelayan dan tukang-tukang kerajinan tangan kepada tuan tanah dan lintah darat, dan sebaliknya akan memberikan kredit panjang yang gampang dan murah. Pemerintah demokrasi akan memperbaiki dan memperbaharui sistem irigasi, dan menyelenggarakan dengan berangsur-angsur pemindahan sukarela sebagian penduduk dari pulau-pulau yang padat penduduknya (terutama Jawa) ke pulau-pulau lainnya dengan jaminan tanah, alat-alat bekerja, alat kesehatan dan kredit yang cukup.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

Untuk kepentingan kaum buruh dan kemajuan industri, pemerintah demokrasi rakyat akan melindungi industri-industri nasional terhadap persaingan asing dan akan mengembangkannya, menuju keindustrialisasi negeri dengan menggunakan semua tenaga dan sumber-sumber negara. Pemerintah demokrasi rakyat akan menetapkan upah minimum yang menjamin penghidupan yang berperikemanusiaan bagi kaum buruh dan pegawai, mengadakan kerja 6 jam sehari untuk kaum buruh tambang di bawah tanah dan industri-industri lain yang mengganggu kesehatan, mengadakan liburan sekurang-kurangnya 14 hari setahun dengan upah penuh, mengadakan jaminan-jaminan sosial lainnya atas biaya negara dan kaum kapitalis, menjamin upah sama untuk pekerjaan sama bagi kaum wanita, melarang pekerjaan yang mengganggu kesehatan untuk wanita dan anak-anak, menjamin perkembangan bebas bagi serikat buruh, dan mengadakan kontrol keras atas harga-harga barang.⁷⁸

Untuk memelihara dan memperkuat perdamaian dunia pemerintah demokrasi rakyat akan setia menjalankan politik perdamaian, melarang propaganda perang dan melakukan segala usaha untuk mencegah tiap-tiap bahaya perang, menuntut pelarangan mutlak atas pemakaian senjata-senjata atom, hidrogen, kuman, dan senjata-senjata pembunuh massal lainnya, menuntut penarikan semua tentara asing dari negeri manapun di dunia, dan memajukan

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 94

hubungan diplomatik, dagang dan kebudayaan atas dasar persamaan saling menguntungkan dengan semua negeri.⁷⁹

Jika rakyat memberikan kepercayaan kepada PKI untuk memegang pemerintahan, PKI berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan yang diberikan dan akan membalas tiap-tiap kepercayaan dengan perbuatan yang besar. Memberikan suara di dalam pemilihan umum nanti bukan hanya sekedar memberikan saja. Memberikan suara didalam pemilihan umum nanti berarti turut menentukan apakah Indonesia dibiarkan dikuasai oleh kaum imperialis, komprador dan tuan tanah, dan dengan demikian membiarkan penindasan, penghisapan, korupsi, birokrasi, kekacauan terus berlangsung.

Kalau tidak menginginkan krisis ekonomi berlangsung terus, dan krisis ini bisa di atasi, maka serahkan pimpinan pemerintah kepada partai kelas buruh, partai yang terpercaya, partai yang terlatih dan teruji: Partai Komunis Indonesia. Begitulah PKI dalam melakukan kampanye untuk meyakinkan rakyat. Selanjutnya, dalam manifest pemilu PKI juga memberikan janji sebagai mana yang termuat dalam *Bintang Merah*:

Bagi kaum buruh, memilih PKI berarti beras, upah yang pantas, dan jaminan sosial yang adil.

Bagi kaum tani, memilih PKI berarti tanah.

Bagi kaum intelegensia, memilih PKI berarti kesempatan dan syarat kerja yang cukup untuk memajukan ilmu guna kebahagiaan manusia.

⁷⁹ *Ibid.*

Bagi prajurit dan anggota-anggota dan alat negara lainnya, memilih PKI berarti jaminan hak-haknya dan gaji yang adil.

Bagi pegawai negeri, memilih PKI berarti gaji dan jaminan social yang adil.

Bagi pedagang kecil, memilih PKI berarti kredit dan pasar.

Bagi pengusaha, memilih PKI berarti perlindungan terhadap saingan modal monopoli.

Bagi seniman, memilih PKI berarti kebebasan mencipta dan syarat kerja yang cukup.

Bagi pelajar dan mahasiswa, memilih PKI berarti jaminan pekerjaan dan hari depan yang baik.

Bagi kaum wanita, memilih PKI berarti emansipasi dan jaminan persamaan hak.

Bagi kaum agama, memilih PKI berarti pemerintah yang menjamin kebebasan beragama dan keyakinan.

Singkatnya memilih PKI berarti memilih kemerdekaan penuh, memilih demokrasi, memilih kesejahteraan dan perdamaian.⁸⁰

Janji-janji PKI ketika berkampanye sangat membakar emosi rakyat.

Banyak petani miskin bergabung karena PKI berjanji membela kepentingan mereka, tetapi banyak pula yang bergabung karena alasan lain. Tim PKI memperbaiki jembatan, sekolah, rumah, bendungan, WC dan kamar mandi umum, saluran air, dan jalan; mereka membasmi hama dan mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, mengorganisasi kelompok-kelompok olah raga dan musik desa, serta memberikan bantuan kepada anggota pada saat-saat sulit. PKI unggul dibandingkan organisasi lainnya. Partai ini begitu lunak dan tidak menganut kekerasan kepada masyarakat, sehingga banyak penduduk desa yang mau masuk menjadi anggota PKI. Di tingkat desa, PKI seringkali dipimpin oleh guru-guru, kepala desa, petani menengah dan kaya, serta beberapa tuan tanah,

⁸⁰ Manifesto Pemilihan Umum PKI, *Bintang Merah*, Nomor 2-3 tahun-IX-Februari/Maret 1954, hlm. 99

yang membawa bersama-sama mereka seluruh komunitas atau kelompok pengikut mereka kedalam PKI.⁸¹ Komunitas-komunitas tersebut hampir seluruhnya muslim abangan.⁸²

Pada masa kepemimpinan Aidit, ia mengadakan kursus-kursus umum pemberantasan buta huruf dan kursus-kursus pendidikan dasar sebelum partai dapat mengungkapkan gagasan-gagasan Marxis-Leninis kepada sebagian besar pengikutnya yang dengan cepat bertambah banyak.⁸³

Partai Komunis Indonesia sejak awal sudah unggul dan sangat luar biasa giatnya dalam memperagakan lambang partainya. Papan-papan reklame yang memperagakan lambang partai sudah bertebaran baik di kota-kota besar, kota kecil bahkan sampai ke tingkat desa.

Selama kampanye, semua partai besar menyadari akan pentingnya anggota sebanyak mungkin. Untuk itu, penduduk yang mendukung partai perlu diberi kartu anggota untuk menciptakan ikatan yang efektif. PKI sangat menyadari pentingnya kartu anggota. Selain dua anggota yang ada, yakni anggota penuh dan calon anggota, ada lagi satu golongan yakni anggota pencinta. Jumlah anggota partai

⁸¹ Mc Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 517-518

⁸² Mengenai orientasi golongan muslim abangan memilih PKI atau sebaliknya diuraikan secara lengkap oleh Arbi Sanit. Lihat: Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2000), Bab V.

⁸³ *Ibid*, hlm. 518

PKI pada awal tahun 1952 berjumlah 7.190, pada bulan Maret 1954 berjumlah 165.206, dan 1.000.000 anggota pada bulan Februari 1956.⁸⁴

PKI juga membuat stiker, spanduk, pamflet dan brosur untuk dijual atau dibagi-bagikan secara massal. Satu lagi metode kampanye, yang dilakukan oleh PKI dengan berhasil melampaui partai-partai lain, adalah kegiatan kesejahteraan sosial. Bagi PKI kegiatan semacam ini dimaksudkan tidak hanya untuk memenangkan pemilihan umum, tetapi juga membangun basis massa yang lebih permanen. Dengan slogan “kegiatan kecil tapi bermanfaat”, aktivis PKI di desa-desa, secara terang-terangan ataupun tersamar, tidak hanya memimpin dalam tuntutan-tuntutan politik lokal seperti menurunkan sewa tanah dan sukubunga utang, serta memperbaiki pembagian air desa, tetapi juga dalam kegiatan nonpolitik, seperti mengorganisir pemakaian alat-alat pertanian secara bersama, gotong royong untuk pesta, pembangunan saluran air, dan membantu korban kebakaran atau banjir.⁸⁵

Sebagian masyarakat Jawa pada dasawarsa ini, setiap orang menganggap dirinya dengan sadar termasuk golongan santri atau golongan abangan. Golongan santri kemungkinan besar akan mendukung partai politik Islam tertentu, sedangkan abangan tidak. Untuk itu PKI berusaha memperoleh dukungan golongan

⁸⁴ Lihat, *Bintang Merah*, Februari-Maret 1954 dan April-Mei 1954.

⁸⁵ Herberth Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 36

abangan.⁸⁶ Menjelang Pemilu PKI sangat ulet mendekati tiga grup kekuatan yang satu sama lain bersaing mempengaruhi massa tani. *Pertama*, adalah lurah beserta pembantu-pembantunya para pamong desa dan golongan tuan tanah. *Kedua*, dukun dan guru-guru mistik, dalang, dan pendekar pencak silat terkemuka. *Ketiga*, pemuda-pemuda desa, mantan pejuang/gerilyawan, mahasiswa yang gagal, guru sekolah, orang-orang berpendidikan yang memberontak terhadap tradisi desa.⁸⁷

Pada tanggal 29 September 1955, lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ketempat pemungutan suara. Sebanyak 37.875.299, atau 87,65 % dari 43.104.464 orang terdaftar sebagai pemilih setahun sebelumnya, memberikan suara secara sah. Hasil pemilihan umum untuk parlemen yang berlangsung tanggal 29 September 1955, baru diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956. Hasil pemilu memperlihatkan fenomena, disatu sisi citra PSI dan Partai Nasionalis PIR memudar. Disisi lain NU muncul sebagai kekuatan baru sejak NU keluar dari Masyumi, dan yang paling tidak terduga, PKI muncul sebagai partai terbesar nomor empat. Berikut ini komposisi hasil pemilu tahun 1955:

⁸⁶ Lihat selengkapnya dalam: Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 161-220

⁸⁷ Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI 1950-1959* (Jakarta: Pusjarah TNI dan Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2009), hlm. 59

Tabel 1. Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Parlemen

No	Partai	Jumlah Suara Sah	Persentase Seluruh Suara
1	PNI (Partai Nasionalis Indonesia)	8.343.653	22,3
2	Masyumi	7.903.886	20,9
3	Nahdlatul Ulama	6.955.141	18,4
4	PKI (Partai Komunis Indonesia)	6.176.914	16,4
5	PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia)	1.091.160	2,9
6	Parkindo (Partai Kristen Indonesia)	1.003.325	2,6
7	Partai Katholik	770.740	2,0
8	PSI (Partai Sosialis Indonesia)	753.191	2,0
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	541.306	1,4
10	Perti (Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah)	483.014	1,3
11	PRN (Partai Rakyat Nasional)	242.125	0,6
12	Partai Buruh	224.167	0,6
13	GPPS (Gerakan Pembela Pancasila)	219.985	0,6
14	PRI (Partai Rakyat Indonesia)	206.261	0,5
15	PPPRI (Persatuan Pegawai Polri)	200.419	0,5
16	Partai Murba	199.588	0,5
17	Baperki	178.887	0,5
18	PIR-Wongsonegoro	178.481	0,5
19	Gerinda	154.792	0,4
20	Permai (Persatuan Marhaen)	149.287	0,4
21	Partai Persatuan Daya	146.054	0,4
22	PIR-Hazairin	114.644	0,3
23	PPTI (Partai Persatuan Tharikhah Islam)	85.131	0,2
24	AKUI	81.454	0,2
25	Partai Rakyat Desa	77.199	0,2
26	Partai Rakyat Indonesia Merdeka	72.523	0,2
27	Acoma (Angkatan Komunis Muda)	65.514	0,2
28	R. Soedjono Prawirosoedarso dkk	53.305	0,1
29	Partai-partai, organisasi-organisasi dan calon perseorangan	1.022.433	2,7
Jumlah		37.785.299	100,0

Sumber: Herberth Feith: *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, halaman 84-85.

Kemenangan PKI merupakan sukses paling menonjol. Mengingat PKI pada bulan Maret 1952 anggotanya hanya sekitar 7.910 orang, sedangkan pada bulan September 1955 PKI telah berhasil mengumpulkan suara lebih dari enam juta orang. Bagi PKI sendiri kemenangannya dalam pemilu tersebut dinilai cukup baik walaupun belum memuaskan. Aidit dengan bangga mengatakan bahwa PKI sebagai salah satu unsur kekuatan nasional sudah tidak dapat disangkal lagi.

BAB VIII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan merujuk kepada temuan penelitian, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebangkitan Kembali Partai Komunis Indonesia sesudah pemberontakan Madiun 1948, berkat usaha yang dilakukan para pemimpin PKI diantaranya: a) pada masa kepemimpinan Alimin, Ia berusaha mengaktifkan kembali PKI dengan membentuk *Sekretariat Komite Central Sementara*, menghidupkan Partai Sosialis dan Partai Buruh yang berguna untuk menampung kader-kader partai yang belum berani memasuki PKI, menghapus citra buruk partai di mata masyarakat, dan menginginkan membangun PKI menjadi partai kader. b) pada masa kepemimpinan Aidit usaha yang dilakukan diantaranya adalah: membangun struktur organisasi dan menjadikan PKI sebagai partai massa yang berdisiplin, menyatukan semua potensi komunisme yang tercerai berai serta menyingkirkan tokoh-tokoh komunis yang menentang untuk disatukan, memperbaiki citra buruk

partai dan tokoh pemberontakan yang pernah dilakukan PKI, bekerjasama dalam front persatuan dengan elemen-elemen politik yang tidak anti komunis, dan dalam menghadapi pemilihan umum PKI melakukan kampanye dengan segala bentuk serta kegiatan sosial menjelang pemilu untuk menarik simpati massa. Dimasa kepemimpinan Aidit, Partai Komunis Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai partai massa (*mass party*). Dimana Partai massa lebih mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; yang terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang memiliki idiologi dan tujuan yang sama. Aidit tidak menginginkan PKI menjadi partai yang teralienasi dan tidak populer di mata masyarakat. Untuk itu, Aidit menjadikan PKI menjadi partai massa dengan berusaha bekerjasama dengan seluruh elemen-elemen politik yang tidak anti komunis. Jika dilihat dari situasi yang terjadi pada tahun sesudah pemberontakan Madiun 1948, maka pola kepemimpinan Aidit dapat dimengerti melalui suatu pendekatan yang berlandaskan pada pendapat bahwa pemimpin atau pemimpin suatu organisasi/kelompok ditentukan oleh situasi yang membentuknya.

2. Tokoh-tokoh yang berperan membangun dan mengembangkan partai setelah pemberontakan PKI madiun 1948 antara lain: Alimin, Aidit, Lukman, Njoto dan Sudisman. Mereka tergabung dalam *Comite Central* PKI dan Aidit merupakan pemimpin tertinggi di *Comite Central*. Dimasa kepemimpinan Alimin strategi yang digunakan Alimin adalah melakukan infiltrasi ke dalam organisasi kepemudaan, buruh, petani, wanita dan sebagainya. Dalam membangun partai Alimin menghendaki PKI sebagai partai kader. Dimasa kepemimpinan Aidit, Lukman, Njoto dan Sudisman strategi yang dijalankan adalah strategi kanan yakni menjalin kerjasama dengan berbagai kekuatan massa dan menggalang front persatuan nasional yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan tani. Dengan demikian, Aidit Cs yang duduk dalam anggota *Comite Central* menjadikan PKI menjadi partai massa namun berdisiplin, Menerapkan Strategi Front Persatuan Nasional yang dipimpin oleh klas buruh (PKI) dan Strategi dalam memenangkan pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa keunikan dari kepemimpinan PKI pasca pemberontakan Madiun dibandingkan partai politik lainnya adalah tampilnya golongan pemuda dalam pucuk pimpinan. Hal ini senada dengan yang dikatakan Rex Mortimer

bahwasanya...”kemunculan kelompok Aidit dipucuk kepemimpinan PKI Januari 1951 merepresentasikan penguasaan organisasi tersebut oleh generasi “pemuda”...Aidit, Lukman, Njoto dan Sudisman, mereka adalah orang-orang muda yang usianya kurang dari 30 tahun ketika memimpin PKI. mereka memiliki ikatan yang kuat, sama-sama ditempa oleh tokoh-tokoh nasional, mendapatkan pengalaman dan orientasi pada masa revolusi, sehingga kepemimpinan mereka luar biasa solid, dan tidak mau berkompromi sampai ajal menjemput ke-empatnya.

Mengenai strategi, di masa Kepemimpinan Alimin, Ia berusaha menerapkan strategi seperti yang pernah dilakukan PKI pada tahun 1920-an, namun tidak terealisasi. Strategi yang dimaksud adalah politik “di dalam blok” yang pertama kali dikembangkan di Indonesia. Seperti yang diutarakan Mc Vey (2009: xxi) “...Politik di dalam blok” Indonesia tidak pernah benar-benar dianggap sebagai kebijakan Komintern”. Kemudian dimasa kepemimpinan Aidit, Ia berusaha merealisasikan kebijakan tersebut. Para kader komunis diharuskan memasuki berbagai macam organisasi massa untuk kemudian menjebak, menguasai dan menyingkirkan orang-orang yang menentang PKI. Dengan

demikian PKI memperoleh basis massa yang besar sehingga partai tidak dapat diabaikan ataupun dilumpuhkan dan memungkinkan partai ini menekan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Ricklefs (2009: 579) "... bahwasanya PKI yang semakin besar dan berkuasa berusaha dirangkul Soekarno, kemudian di bawah tekanan Soekarno, para pemimpin PNI yang tidak bersedia bekerjasama dengan PKI dan yang mempunyai teman-teman yang anti PKI di kalangan Angkatan Darat disingkirkan".

3. Kondisi negara sesudah pemberontakan di Madiun 1948 yang belum stabil, serta adanya Agresi Militer Belanda II, membuat pemerintah tidak sempat menyelesaikan masalah pemberontakan PKI secara tuntas. Disamping itu, pemerintah yang tidak tegas dalam menghukum PKI selaku partai yang melakukan pemberontakan bahkan bersikap toleran terhadap PKI, hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh PKI untuk muncul kembali dalam gelanggang politik nasional dan membangun kembali PKI dari puing-puing kehancuran.

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan, dapat dikemukakan implikasi penelitian sebagai berikut: Partai Komunis Indonesia tidak pernah berhenti menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis seperti yang dicita-citakan. Meskipun PKI dihancurkan bahkan dilarang keberadaannya akan tetapi PKI tetap berusaha untuk bangkit. Partai Komunis Indonesia berusaha untuk bangkit terutama jika situasi dalam keadaan krisis yang menimpa bangsa ini. Disaat itulah pemimpin PKI berusaha mencari peluang-peluang untuk tampil dan ambil bagian dalam masyarakat. Jika kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk tampil secara terbuka maka cara-cara yang digunakan bisa berbentuk lain seperti cara illegal atau melakukan gerakan bawah tanah sepanjang hal itu dapat melemahkan lawan-lawannya.

PKI selalu memanfaatkan setiap situasi yang ada dalam masyarakat, terutama sekali apabila timbul rasa ketidakpuasan dan ketidaksenangan akan keadaan sosial, politik dan ekonomi untuk melancarkan agitasi dan mengorganisasi golongan-golongan dalam masyarakat yang tidak puas tersebut. PKI bisa saja menyusup kedalam suatu organisasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang tidak anti dengan komunis. Perlahan-lahan menghapus citra buruk partai yang selama ini buruk dimata masyarakat lalu dengan sabar menunggu momen yang menguntungkannya tiba, untuk kemudian bergerak mengambil kesempatan itu.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi pada penelitian, dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Kepada pemerintah untuk tidak mencabut TAP MPRS No. XXV/1996 tentang larangan Marxisme-Leninisme di Indonesia. Karena hal ini akan memberikan peluang bagi PKI untuk bangkit kembali.
2. Kepada masyarakat agar selalu mewapadai dan menjadikan pembelajaran bahwasanya PKI sewaktu-waktu bisa muncul kembali, serta tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran komunis yang progresif-revolusioner. Karena saat ini bisa dilihat maraknya buku-buku tentang komunis yang beredar di masyarakat. Situs-situs tentang PKI yang bertebaran di internet dan sekelompok organisasi yang berwatak progresif-revolusioner. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan PKI ada disekitar kita.
3. Penelitian ini membahas tentang bangkitnya Partai Komunis Indonesia setelah Pemberontakan PKI Madiun 1948 dan berhenti sampai Pemilu 1955. Disarankan bagi peneliti lanjutan agar melakukan penelitian dengan aspek temporal yang diperluas atau aspek wilayah yang dipersempit. Disamping itu disarankan agar menggunakan sumber-sumber arsip, karena itulah yang menjadi kelemahan dari penelitian ini yakni tidak menggunakan sumber arsip tetapi menggunakan sumber sekunder dan koran-koran atau majalah sezaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. 2005. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta Pusat: Fakultas Hukum UI.
- Abi Sujak. 1990. *Kepemimpinan Manajer: Eksistensinya Dalam Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- AH. Nasution. 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan: Pemberontakan PKI 1948. Jilid 8*. Bandung: DISJARAH-AD dan Angkasa Bandung.
- , 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Agresi Militer Belanda II. Jilid 9*. Jakarta: DISJARAH-AD.
- Ahmad Husein Dkk. 1992. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/ Riau 1945-1950. Jilid I&II*. Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPSIM).
- Ahmad Suhelmi. 2007. *Islam dan Kiri: Response Elit Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca-Soeharto*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti.
- Alex Dinuth. 1997. *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*. Jakarta: Intermassa.
- Al Rafni, Suryanef. 1996. *Partai Politik*. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Padang: IKIP Padang.
- Aminuddin Kasdi. 2009. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa dan Centre Indonesian Communities Studies Surabaya.
- Apter, David E. Diterjemahkan Oleh Hermawan Sulistyو Dan Wardah Hafidz. 1987. *Politik Modernisasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Arbi Sanit. 2000. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arnold C. Brackman. 1963. *Indonesian Communism: A History*. New York: Frederick A. Praeger.
- Audrey R Kahin. 1990. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: PT Pustaka Grafiti.